

Swantara



Majalah Triwulanan Lemhannas RI No. 13 TAHUN IV/JUNI 2015

Mayjen TNI (Purn) Chasib:
Strategi Alternatif Mengatasi
Berkembangnya Radikalisme Dan
Terorisme Di Indonesia

Sidney Jones:
ISIS Sebagai Ancaman, Solusi
Mengatasinya

Dr. Poempida Hidayatullah:
Mengurangi Dan Deteksi Radikalisme
Dengan Teknologi Pengolahan BIG DATA

Yon Machmudi, Ph.D:
Merespon Radikalisme Global

RADIKALISME

**RADIKALISME KEPENTINGAN:
AGAMA ATAU POLITIK?**

Selamat Hari Lahir

Pancasila

1 Juni 1945 - 1 Juni 2015



*Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai
jasa para pahlawannya
(Ir. Soekarno)*



Pelindung
Budi Susilo Soepandji
Pembina
Didit Herdiawan
Pengarah
Suhardi Alius
Penasehat
M. Nasir Madjid
Yuhastihar
Pemimpin Redaksi
E. Estu Prabowo
Redaktur Pelaksana
Wahyu Widji P
Editor
Trias Noverdi, B. Iman Aryanto,
Dedy Kusnaedy
Staf Redaksi
Aditya Soleha,
Erlin
Koordinator Fotografer
M. Isdar
Fotografer
Suryadi, Suyono
Grafis
PT. Ultima Sarana Abadi
Pemimpin Administrasi
Sumurung
Staf Administrasi
Linda Purnamasari, Gatot
Sirkulasi
Supriyono
Alamat Redaksi
Lemhannas RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta
Telp. (021) 3832108, 3832109
Fax (021)-3451926
Email : humas.lemhannasri@gmail.com
Website : www.lemhannas.go.id
Dicetak oleh : PT. Ultima Sarana Abadi

Isi di luar tanggung jawab percetakan
Swantara menerima artikel dan opini dari luar
Lemhannas RI dan akan dimuat apabila

sesuai dengan kebijakan redaksi

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera
Om Swasti Astu

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Majalah Triwulan Lemhannas RI "Swantara" Edisi 13 Bulan JUNI 2015, kembali hadir ditengah-tengah para pembaca setia.

Pembaca yang budiman, pada edisi ke 13 ini, redaksi sengaja mengangkat Tema Radikalisme : Kepentingan Agama Atau Politik" mengingat dewasa ini, gerakan radikal dan teror kerap dilekatkan pada agama tertentu baik secara nilai maupun simbol, padahal agama tidak pernah sama sekali mengajarkan kekerasan.

Pada edisi ke 13 ini, redaksi kembali menampilkan para pemangku kebijakan, pengamat terorisme, tenaga professional dari Lemhannas RI, pengamat sosiologi, tokoh agama untuk mengulas tuntas apa yang dimaksud dengan Radikalisme sebagai ancaman Ketahanan Ideologi, upaya dan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Paham Radikalisme di Indonesia.

Redaksi menyadari jika tulisan yang disajikan dalam Majalah Swantara edisi kali ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami tetap mengharapkan kritik dan masukan demi eksistensi dan kemajuan dari karya jurnalistik yang akan kami sajikan di edisi mendatang. Tak lupa kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang berkenan untuk meluangkan waktu menulis pada rubrik opini.

Semoga, Majalah Swantara Edisi 13 tetap dihati para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SalamSejahtera

Om Shanti Shanti Shanti Om

Pemimpin Redaksi



Suara Pembaca

Lemhannas RI Sebaiknya Memiliki "TV Sendiri"



SEBAGAI lembaga pendidikan dan kajian yang mumpuni untuk mencekatak pemimpin bangsa, ditengah era

keterbukaan atau transparansi dimana masyarakat sangat membutuhkan informasi penting tentang ber-

bagai kegiatan rutin dan bermanfaat yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI.

Saran saya, ada baiknya Lemhannas RI memiliki stasiun "TV" yang merupakan TV berita dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Mulai dari penayangan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI seperti *President Lecture*, Seminar Internasional, orasi ilmiah, *talk show* dan kegiatan lainnya.

"TV" yang dimaksud tidak perlu siaran 24 jam. Cukup beberapa jam di pagi hari dan beberapa jam di malam hari. Sebaiknya "TV" tersebut dapat terkoneksi dengan berbagai TV lainnya sehingga masyarakat memperoleh informasi yang bermanfaat dari Lemhannas RI.

Semoga usul dan saran saya menjadi bahan pertimbangan. (Vira Humas)

Desain Majalah Lemhannas RI Terlalu Kaku dan Formal



SAYA adalah pembaca setia Majalah Swantara, namun demikian ada beberapa kritik dan masukan kepada tim redaksi, diantaranya terkait dengan Desain dan Layout Majalah Swantara agar dibuat tidak terlalu kaku, tetapi dibuat lebih artistik. Kedua, agar Majalah Swantara dibuatkan rubrik yang simple namun menghibur dan memberikan pesan dan kesan tertentu. Terima kasih, semoga usulan saya dapat ditampung.

(Bhayu-Ditjian Ekonomi)

DAFTAR ISI



» hal.50



» hal.15



» hal.13



» hal.55



» hal.60

54 RESENSI BUKU

Menggugat Jurnalisme Modern *hal. 54*

55 SOSOK

Toeti Heraty Noerhadi Roosseno:
Jiwa Bebas yang Tak Ingin Dikalahkan
Kekalahan *hal. 55*

59 SERAMBI MONAS

Peluang dan Penciptaan Kerukunan *hal. 59*

6 SEJARAH

Radikalisme dalam Sebuah Riwayat Singkat *hal.6*

10 LAPORAN UTAMA

Radikalisme: Kepentingan Agama atau Politik? *hal. 10*

Pokok Pikiran Radikalisme Dalam Katolik *hal. 13*

Menkominfo Gandeng Pihak Terkait Awasi Situs Radikal *hal. 15*

Hotspot Potensi Kekerasan *hal. 17*

Pemisahan Paham Fundamentalisme dan Radikal Cara Ampuh
Basmis Terorisme *hal. 18*

Modernisasi Organisasi Radikal Melalui Dialog Penting Dilakukan *hal. 20*

Cegah Radikalisme, BNPT Ciptakan Program Damai Di Dunia Maya *hal. 21*

Pada Dasarnya Agama Tidak Mengajarkan Kekerasan *hal. 24*

Pancasila Senjata Ampuh Hadapi Gempuran Paham Radikalisme *hal. 26*

NU, Tegaskan Menolak Semua Bentuk Tindak Kekerasan Guna
Mencapai Tujuan *hal. 28*

30 OPINI

Strategi Alternatif Mengatasi Berkembangnya Radikalisme Dan
Terorisme Di Indonesia *hal. 30*

ISIS Sebagai Ancaman, Solusi Mengatasinya *hal. 34*

Mengurangi Dan Deteksi Radikalisme Dengan Teknologi
Pengolahan BIG DATA *hal. 37*

Merespon Radikalisme Global *hal. 39*

42 HOT ISSUE

WHO: Wabah Mers Di Korsel Tidak Akan Jangkiti Masyarakat *hal. 42*

TNI Bentuk Satuan Khusus Gabungan Atasi Terorisme Dan Makar *hal. 43*

46 SEPUTAR KITA

Serah Terima Jabatan 15 Pejabat Eselon I, II, dan III Di
Lingkungan Kerja Lemhannas RI *hal. 46*

Lemhannas RI Gelar Acara International *Conference Terrorism and
Deradicalization hal. 47*

Gubernur Lemhannas RI Lantik Pejabat Eselon I, II, III, dan IV *hal. 48*

Gubernur Lemhannas RI Resmikan Pembukaan PPSA XX *hal. 49*

50 PROFILE

Laksamana Madya TNI DR Didit Herdiawan, MPA, MBA:
Selalu Berbahagia Menerima Amanah *hal. 50*

53 SUARA ALUMNI

Deradikalisasi Garda Terdepan Pencegahan Merebaknya Paham
Radikalisme *hal. 53*



Radikalisme dalam Sebuah Riwayat Singkat

Dalam beberapa dekade terakhir, kita terus dikejutkan oleh aksi-aksi kekerasan dan teror yang telah menghilangkan hak hidup banyak orang dan menyebabkan kerusakan psikologis dan fisik lainnya. Aksi tersebut telah dengan sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang (mungkin saja) dilakukan untuk mencari perhatian negara tempat terjadinya, masyarakat dan dunia.

PERISTIWA Bom Bali, Bom JW Marriott yang kemudian diikuti aksi aparat negara dalam membongkar jejaring dan keberadaan para pelaku teror di berbagai tempat di Indonesia, mau tak mau membuat kita harus mengakui betapa dekatnya keberadaan kelompok-kelompok gerakan yang secara nyata mengancam keutuhan dan ketentraman suasana kehidupan berbangsa dan negara.

Semenjak tahun 2012 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah melakukan pemetaan terhadap seluruh wilayah di Indonesia terkait potensi ancaman dan tindakan terorisme. Pemetaan yang melalui riset terus diperbaharui itu menunjukkan cukup banyak kawasan yang telah terpapar oleh gejala tersebut. Setidaknya ada 12 titik rawan di wilayah di Indonesia yang memiliki potensi ancaman dan penyebaran ideologi radikal yang masih tinggi. Beberapa yang bisa disebutkan adalah Aceh, Lampung, Banten, Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Poso, Palu, dan NTB. (Deputi I BNPT Mayjen TNI Agus Surya Bakti)

Indonesia sebagai anggota masyarakat negara-negara dunia, tidak dapat

Islam sebenarnya yang paling akhir mengembangkan garis fundamentalis, ketika budaya modern mulai berakar di dunia muslim pada 1960-an dan 1970-an. Pada masa itu, fundamentalisme sudah cukup mapan di kalangan Kristen dan Yahudi, yang telah terpapar pengalaman modern lebih lama

mungkin-kemungkinan adanya pengaruh (eksternal) negara lain dalam berbagai hal yang berkembang di tanah air. Dalam banyak hal, apa yang menjadi trend di Indonesia memang tidak dapat lepas dari trend yang terjadi secara global, kiranya demikian juga dalam soal teror dan kekerasan yang kerap mengarah kepada beberapa paham yang dianggap sebagai akar terjadinya yakni fundamentalisme, radikalisme dan terorisme.

Jika persoalan-persoalan "isme-isme" tersebut di atas adalah sebuah gunung api, maka serangan teror terhadap Pentagon dan *World Trade Center (WTC)*, yang notabene berada di negara adikuasa; telah menjadi letusan gunung yang berhasil melahirkan puncak baru. Sebuah puncak baru yang mendorong negara-negara dunia melihat kembali setiap upaya mereka dalam memandang, menyikapi dan menangani tumbuh kembang fundamentalisme, radikalisme dan terorisme, termasuk di Indonesia.

Sebuah Riwayat

Kekerasan dan teror adalah sebuah tindakan yang bisa mengakar pada banyak hal, dan yang paling banyak mendapat sorotan adalah ketika ia mengakar dari agama, secara lebih khusus lagi adalah Agama Islam. Meski pada kenyataannya, kemungkinan pelaku kekerasan dan teror bisa datang dari agama manapun. Sebab pada dasarnya "bibit" kekerasan ada pada manusia bukan pada agamanya. Hanya kadang, potensi melakukan kekerasan itu berhasil dimanipulasi sehingga menemukan legitimasinya dalam agama.

Fundamentalisme adalah salah satu paham yang dianggap keras dan kerap dilekatkan dengan Islam, meskipun kenyataannya tidak demikian. Karen Amstrong dalam buku *Sejarah Islam* menyebut *fundamentalisme* juga ada pada Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Sikh bahkan Konghucu.

Bahkan ia menerangkan bahwa "Islam sebenarnya yang paling akhir mengembangkan garis fundamentalis, ketika budaya modern mulai berakar di dunia muslim pada 1960-an dan 1970-an. Pada masa itu, fundamentalisme sudah cukup mapan di kalangan Kristen dan Yahudi, yang telah terpapar pengalaman modern lebih lama."

Dalam Islam, sejumlah literasi menyebutkan relasi antara pemikiran *Maududi dan Sayyid Quthb (1906-66)*. *Quthb* dianggap telah memperluas pandangannya tentang konsep jahiliyah yang harus diperangi kaum muslim. Jika sebelumnya, Maududi hanya memandang jahiliyah itu adalah orang-orang non-muslim, maka Quthb memandang karakter jahiliyah juga bisa muncul dalam diri orang muslim.

Nor Huda dalam bukunya *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* menulis bahwa penggunaan istilah "Fundamentalisme Islam" baru dikenal media barat pada 1979 ketika terjadi Revolusi Iran. Sebuah revolusi yang memunculkan kekuatan Muslim Syia'ah radikal dan fanatik yang siap mati melawan Amerika Serikat yang dianggap sebagai setan besar.

Di Indonesia sendiri perkembangan fundamentalisme Islam mau tak mau kerap terjadi mengikuti perkembangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah yang notabene menjadi sumber kedatangan ajaran Islam.

Di masa pra-kemerdekaan, fundamentalisme Islam di Indonesia dapat dilacak akarnya melalui Gerakan Paderi di Minangkabau. Dan jika ditelisik, maka Gerakan Paderi ini dianggap memiliki kemiripan dengan Gerakan Wahhabi yang pada masa itu sedang memegang kendali di Tanah Suci. Pun begitu ketika *neo-fundamentalisme* muncul di Indonesia dan dinilai dipengaruhi oleh Organisasi Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada 1928 di Mesir. Organisasi

yang diikuti oleh Quthb yang dianggap pendiri fundamentalisme Islam di Dunia Sunni oleh Karen Amstrong.

Karen memandang fundamentalisme berada dalam hubungan simbiosis dengan sekularisme koersif. Para fundamentalis hampir selalu merasa diserang oleh pendiri liberal atau modernisasi, dan sebagai akibatnya pandangan serta perilaku mereka menjadi lebih ekstrim. Sayangnya, perasaan takut bercampur putus asa yang menggerakkan fundamentalisme cenderung juga membawa fundamentalisme ke arah yang lebih agresif dengan mengabaikan tradisi keagamaan yang justru ingin diperjuangkan.

Kiranya dua hal yang disebut Karen menggerakkan *fundamentalisme* perlu mendapat perhatian, sebab bisa jadi kedua bagian psikis itu yang mendorong perjumpaan nilai antara fundamentalisme dan radikalisme di sebuah ruang kosong sebelum kemudian “bersepakat” memunculkan tindakan kekerasan atau teror. Atau hal itu pula yang mendorong fundamentalisme dan radikalisme bersenyawa dengan terorisme.

Radikalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Jika melihat definisi di atas, maka telah jelas parameter mengenai kapan sebuah gerakan dapat sebut sebagai gerakan yang mengakar pada radikalisme.

Parameter yang paling mudah dan sudah secara nyata disebutkan adalah adanya “cara kekerasan atau drastis”. Cara-cara kekerasan yang tentunya secara sadar diyakini, kemudian dipilih sebagai jalan teror agar negara, masyarakat serta kelompok tertentu memperhatikan dengan serius apa yang menjadi kehendak kelompok-kelompok radikal.

Namun tidak selamanya radikalisme dengan seketika diartikan sebagai kekerasan itu sendiri. Dalam definisi radi-

kalisme ada kata “drastis” yang dalam KBBI sendiri, “drastis” memiliki definisi yang tidak melulu dapat dilekatkan dengan “cara kekerasan”. Drastis diartikan sebagai tegas dan cepat; keras dan berpengaruh cepat; menyeluruh; radikal; hebat; luar biasa.

Untuk menemukan pembanding, kiranya kita bisa mengutip apa yang dikatakan Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Prof. Dr Franz Magnis Suseno, bahwa radikalisme tidak berarti kekerasan, namun kesediaan seseorang untuk secara penuh atau 100 persen menghayati dan menjalankan iman sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Pengamat Terorisme Indonesia yang juga mantan anggota gerakan Negara Islam Indonesia (NII), Al Chadar mengungkapkan kelompok teroris bukanlah kelompok baru di Indonesia. Kaum teroris adalah gabungan dari inti ajaran fundamentalis dan radikal yang bertemu dalam satu titik perencanaan perang melawan apa yang mereka persepsikan sebagai ‘kezaliman’. Contoh atau model perjumpaan yang bisa dikatakan mirip dengan apa yang diterangkan Al Chaidar kiranya dapat kita lihat dalam perkembangan Islam-Komunis di Indonesia (1922-1926).

Sekitar 1920 banyak tokoh Islam yang berafiliasi kepada Marxisisme dalam ideologi perjuangan. Di Surakarta ada Haji Misbach yang dikenal dengan “haji merah” yang cukup terkenal dengan doktrin Islam dan Komunis adalah sama. Dalam perkembangannya; Misbach diduga menggerakkan serangkaian kekerasan yang terjadi di Surakarta hingga ia ditangkap dan diadili meski tidak terbukti secara hukum.

Konsep Islam-Komunis ini sempat menyebar ke Minangkabau yang diperkenalkan oleh Magas yang pernah tinggal di Jawa. (selengkapnya lihat: Nor Huda; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia).

Dalam konteks yang mirip dengan

hal tersebut di atas, As’ad Said Ali dalam bukunya Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya memaparkan adanya kesamaan agenda antara apa yang ia sebut dengan Islam Radikal Kontemporer dengan agenda Gerakan Sosialis.

Ia menerangkan gerakan radikal kontemporer yang salah satunya direpresentasikan oleh Osama bin Laden, memiliki konsentrasi gagasan yang bertumpu pada perlawanan terhadap sistem politik modern, khususnya ekspansi neo-liberalisme kapitalisme Amerika yang menyerbu dunia Islam.

Sejarah Islam di Indonesia adalah juga sejarah pergulatan kekuasaan (khilafah) yang belum juga selesai hingga sekarang. Upaya mewujudkan kekuasaan itu berimplikasi pada munculnya pemberontakan (DI/TII tahun 1949) hingga terorisme (1999 hingga sekarang).

Sebenarnya ada fase ketika Islam di Indonesia cukup berhasil menghormati pluralitas dan menghargai kultur masyarakat yang ada. Semangat pluralisme dikembangkan dan toleransi ditegakkan dengan khasanah intelektual yang diperkaya.

Kerja sama kultural ini, seperti dicatat Anthony Reid, tampak dalam banyak cara orang-orang Islam, Hindu-Budha dan Kristen menjalankan kehidupan dan kebudayaan. Bahkan di era pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan, kaum pluralis ini berjuang dalam spirit Sumpah Pemuda 1928. Dan sampai era demokrasi parlementer Bung Karno pada 1950-an, kaum Muslim dan non-Muslim itu hidup dalam suasana penuh peradaban, saling hormat, dan saling mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni budaya. Tidak ada sedikitpun diskriminasi, karena pembangunan bangsa dan karakternya (nation and character building) berjalan wajar. Karena itu, masalah pluralisme adalah masalah bagaimana kaum Muslim mengadaptasikan diri mereka dengan dunia modern, yang sampai kurun 1950-an itu dijamin

oleh konstitusi.

Akan tetapi, di bawah Orde Baru Soe-harto, semua itu mengalami kere-takan: *state building* (pembangunan negara) telah melebihi dan menghan-curkan *nation building* (pembangunan bangsa). Negara kian represif dan he-gemonik, melibas masyarakat di seluruh etnis, kelas, dan lapisan.

Politik belah bambu dan regimen-tasi Orde Baru Soeharto kemudian meluluh lantakkan spirit kebangsaan dan kemanusiaan. Karena itu, para in-telektual dan elite Islam harus mencari jalan keluar dari krisis-krisis sosial, eko-nomi, politik dan ideologi dewasa ini, agar reformasi tidak mengalami stag-nasi, agar bangsa ini tidak mengalami disintegrasi. Giddens menyebut poli-tik “jalan ketiga” dengan menekan-kan “tak ada hak tanpa tanggung jawab”. Di dalam Islam era Ra-sulullah, “tak ada hak tanpa tanggung jawab” itu teraksen-tuasikan dalam Piagam Madi-nah, yang menjamin kebebasan, persamaan dan keadilan.

Hari ini, perjumpaan inti ajaran fundamentalisme dan radikalisme cenderung mengarah kepada terorisme, maka tepat ki-ranya apa yang dikatakan Al Chaidar. Bahwa secara ideologis, cara menga-tasi terorisme adalah memisahkan an-tara paham fundamentalisme Islam dan paham radikalisme Islam agar tidak bertemu dalam satu wadah yang utuh.

Jika pemisahan ini berhasil dilakukan, maka terorisme akan mengalami kema-tiannya secara pelan-pelan. Namun, jika radikalisme dan fundamentalisme terus-menerus mendapatkan momen-tum untuk bersatu, maka terorisme akan tumbuh subur di kalangan dimana an-tara simbol dan hakikat bertemu.

Dari pemaparan singkat di atas ada point penting menyangkut “kekuatan” yang menyatukan “isme-isme” itu ke arah tindakan teroris. Jelas bahwa ke-samaan inti ajaran adalah sesuatu yang

dapat menyebabkan pertemuan paham-paham tersebut. Bahwa terlihat adanya persamaan inti ajaran pada masing-masing “isme” bisa jadi karena tiap kelompok membentuk garis kompromi dengan mendistorsi bagian-bagian ter-tentu dari ajaran itu sendiri yang mung-kin menyebabkan “isme-isme” tersebut menjadi berbeda. Yang artinya, untuk mencapai pertemuan inti ajaran itu sendiri, masing-masing kelompok telah memotong-motong pemahamannya terhadap agama sehingga penggunaan pemahaman agama yang sepotong-sepotong cenderung menjadi lazim



dilakukan sebagai bagian dari nego-siasi dalam kelompok-kelompok yang cenderung menginginkan kekerasan.

Selain itu, pertemuan masing-masing “isme” juga dimungkinkan karena ada-nya “musuh bersama” yang begitu menakutkan dan mengancam masing-masing kelompok baik itu fundamen-talisme, radikalisme, dan terorisme dalam Islam.

Musuh bersama tersebut adalah modernitas yang kerap kemudian diang-gap datang dari negara-negara Barat. Modernitas yang dianggap membawa

“sesuatu” yang membahayakan tradisi adat maupun keagamaan yang telah mapan.

Pada fase pra-kemerdekaan Indo-nesia, “musuh bersama” tersebut dire-presentasikan oleh penjajah, kolonial dan atau negara-negara ekspansionis. Sehingga gerakan perjuangan sebelum ia memusar menjadi satu sebagai ke-hendak untuk merdeka sebagai kesatuan bangsa, digerakkan juga oleh motivasi melindungi keyakinan (baik adat maupun agama dan kepentingan lokal lainnya). Maka tidak heran istilah “perang suci” melawan “kafir” sempat muncul para era perang kemerdekaan.

Jika sampai hari ini, ketiga “isme” tersebut mungkin dipertemukan dalam ruang pertemuan bernama perlawanan terhadap musuh bersama, maka bukan hal yang tidak mung-kin pula mereka diikeluarkan dari “ruang pertemuan” tersebut. Tentu hal ini bisa dilakukan dengan membuktikan bahwa mereka tidak memiliki apa yang mungkin mereka anggap se-bagai “musuh bersama”.

Proses menemukan ketia-daan musuh bersama yang mung-kin menjadi pemicu lahirnya ke-kerasan terkait keberadaan “isme-isme” tersebut yang harus terus dilaku-kan. Dan membuka sebanyak-banyaknya keran diskursus lintas agama, kelompok berbasis agama, organisasi keagamaan menjadi sangat penting untuk terus dilakukan.

Dalam kenyataan “dunia tanpa batas” seperti hari ini, menunjukkan kebera-daan dan ketiadaan musuh bersama adalah sesuatu yang sangat memung-kinkan untuk terjadi. Internet telah se-cara nyata dijadikan alat oleh kelompok-kelompok teror untuk membesarkan dirinya. Maka dari itu, Program Damai di Dunia Maya yang diluncurkan pe-merintah menjadi sangat tepat. Tentu saja tindakan-tindakan selain itu juga tidak kalah pentingnya.

Radikalisme: Kepentingan Agama atau Politik?

Radikalisme yang Tak Mengakar pada Nilai Agama Islam

Selama ini, aksi-aksi radikal dan teror kerap dilekatkan pada Agama Islam baik secara nilai maupun simbol, padahal Islam tidak mengajarkan kekerasan.

Kekerasan yang selama ini banyak mengatas-namakan agama sebenarnya lebih mengakar kepada kepentingan politik, misalnya pembentukan Negara Islam seperti keinginan ISIS. Alasan politik itulah yang membuat ISIS melakukan kekerasan dan teror demi menyingkirkan lawan politik ataupun kelompok yang tidak bersepakat dengan mereka. Parahnya, aksi kekerasan dan teror itu menggunakan ajaran agama sebagai pembenaran.

Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra mengingatkan, tak pernah Islam mengajarkan terorisme? Al-quran dan hadis tidak ada yang mengajarkan kekerasan.

Memahami Garis Lurus Iman Radikal

Penggunaan istilah radikalisme kerap diikuti kesalah-pahaman memaknainya. Orang yang mendengar "radikalisme" cenderung membayangkannya hal yang berbau kekerasan dan teror.

Padahal radikalisme sendiri tidak selalu berarti kekerasan. Radikalisme dianggap bisa sejalan dengan sikap terbuka, toleran, atau pluralis yang dimiliki sesama penganut agama dan kepercayaan.

Seseorang yang bersedia secara penuh (100%) menghayati dan menjalankan iman sesuai dengan agama dan kepercayaannya dapat pula disebut sebagai radikalisme. Dan hal itu secara pasti berbeda dengan fanatisme dan fundamentalisme.

Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Prof. Dr Franz Magnis

Religion

Suseno mengungkapkan seseorang yang fanatik akan bertindak menyingkirkan semua pertimbangan kemanusiaan dan ideologi di luar nalar dan keyakinannya.

Membidik Soal Eko-Pol Di Balik Radikalisme

Faktor ekonomi dan politik dianggap sebagai gejala utama yang mendorong seseorang dan kelompok bergabung dalam gerakan radikal, sementara faktor lain dianggap sebagai gejala skunder.

Maka tidaklah heran jika kaum muda kerap jadi sasaran rekrutment pelaku radikalisme. Sebab anak muda adalah elemen masyarakat yang paling mudah terkena dampak negatif persoalan ekonomi dan politik.

Untuk itu, penataan kondisi-kondisi ekonomi dan politik yang mampu mendatangkan manfaat bagi orang yang berpotensi bergabung dengan kelompok radikal sangatlah perlu.

Pengamat Sosiologi Politik FISIP UI, Andi Rahman Alamsyah meyakini, jika orang sudah merasakan manfaat ekonomi politik maka orang tentu berpikir beberapa kali untuk bergabung dengan kelompok radikal.

Matikan Terorisme, Pisahkan Fundamentalisme dan Radikal

Fundamentalisme dan Radikalisme dinilai memiliki kesamaan inti ajaran yang bisa mem-

Politics

buat keduanya bertemu dan bersepakat pada tindakan teror (terorisme).

Untuk itu, salah satu langkah ideologis mematikan terorisme Islam di Indonesia adalah dengan memisahkan paham fundamentalisme Islam dan paham radikalisme Islam agar tidak bertemu dalam satu wadah.

Jika kedua paham tersebut terus mendapatkan momentum bersatu, maka akan sulit sekali mengatasi terorisme. Dan terorisme akan tumbuh subur di kalangan di mana antara simbol dan hakikat bertemu.

Pengamat Terorisme Al Chaidar mengatakan, jika pemisahan ini berhasil dilakukan, maka terorisme akan mengalami kematiannya secara pelan-pelan.

Cara lain yang harus dilakukan adalah membuka ruang dialog dengan kaum fundamentalis. Langkah ini harus didukung oleh atmosfir terbuka, hangat, bersahabat dan tanpa ancaman-ancaman yang mungkin membuat mereka semakin mengisolasi diri.

Dengan begitu, kelompok-kelompok tersebut dapat keluar dari dunia bawah tanah yang suram, gelap dan penuh intrik ke dunia terbuka, hangat dan saling menghargai.

Tokoh Agama Harus Dekati Masyarakat Kecil

Masyarakat kecil dengan kemampuan ekonomi dan pendidikan lemah sangat rawan terkena paham radikal. Masyarakat seperti ini biasanya banyak berada di perkotaan yang menjadi tujuan urbanisasi. Di kota-kota tersebut kepadatan penduduk sudah

memperhatikan dan makin membuka peluang terjadinya aksi radikal berbasis berbagai kepentingan, baik ekonomi, suku dan agama.

Untuk itu tokoh agama harus mampu merubah pendekatan elitis yang selama ini digunakan dalam berdakwah. Pendekatan elitis yang lebih memilih berdakwah di tempat-tempat tertentu mewah atau melalui media-media elektronik, daripada turun langsung ke pinggiran perkotaan dan perkampungan.

Pendekatan elitis tersebut dinilai telah berkontribusi menyebabkan semakin maraknya aksi radikal, sebab pendekatan itu telah menjauhkan nilai-nilai agama dari masyarakat kecil.

Pengamat Sosiologi Prof. Dr. Thamrin Amal Tamagola berpendapat kegagalan tokoh agama terjadi ketika mereka melupakan orang-orang kecil yang sebenarnya butuh arahan, butuh tuntunan. Sebab kurangnya perhatian menyebabkan mereka cepat terkena pengaruh ajaran radikal.

Awasi Situs Radikal Bersama-sama

Pengawasan sebaran radikalisme melalui media internet terus dimaksimalkan oleh pemerintah, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Dalam hal ini, Kemkominfo menggandeng berbagai pihak untuk mengawasi situs radikal seperti, termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Langkah lain adalah membentuk tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) yang anggotanya berasal dari beragam unsur. Tim ini yang nantinya diharapkan mampu memberikan penilaian yang lebih objektif dan rekomendasi atas keberadaan situs-situs radikal. Kemkominfo meyakinkan, tim tersebut tidak akan berubah menjadi alat sensor yang membahayakan keinginan bebas orang dalam memanfaatkan internet dengan baik.

Tidak hanya langkah yang bersifat pencegahan, Kemkominfo juga menjalin kerjasama dengan Kepolisian untuk mempidanakan pemilik *blog* yang diduga radikal melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

BNPT Sebar Pesan Damai di Dunia Maya

Memiarkan kekerasan terus tumbuh sama saja dengan memiarkan lahirnya budaya kekerasan di tengah masyarakat dan dengan sendirinya akan menyebabkan berkembangnya ancaman bagi keutuhan bangsa.

Mengingat pentingnya persoalan tersebut, maka penanganan terorisme dan radikalisme haruslah sangat komprehensif baik dalam aspek penindakan (*hard approach*) dan pendekatan pencegahan (*persuasive approach*).

Salah satu langkah penting yang diambil BNPT adalah dengan meluncurkan Program "Damai di Dunia Maya" di mana 2015 dicanangkan sebagai "Tahun Damai di Dunia Maya."

Ada dua alasan mengapa program tersebut diluncurkan yakni, internet telah dijadikan media efektif oleh kelompok radikal teroris dalam melakukan propaganda, komunikasi dan rekrutmen keanggotaan. Selain itu internet merupakan media yang banyak digandrungi anak muda yang banyak jadi sasaran pelaku radikalisme dan terorisme.

Portal yang disediakan BNPT dalam pencegahan terorisme di dunia maya adalah www.damailahindonesiaku.com (bersifat informatif) dan www.jalandamai.org (bersifat edukatif). Sedangkan pada 2015 akan diperkenalkan portal www.damai.id sebagai jejaring portal komunitas damai yang merangkul seluruh pihak terutama anak muda dalam meramaikan dunia maya dengan paham dan ajaran damai dan cinta NKRI di dunia maya.

Ormas Islam sebagai Pilar Penjaga Toleransi

Pengaruh radikalisme dan ekstrimisme yang semakin terasa sejak reformasi 1998 sudah seharusnya membuat negara lebih serius dalam melibatkan Ormas-ormas Islam dalam meluruskan faham-faham tersebut.

Langkah tersebut kiranya akan menempatkan persoalan terorisme dan radikalisme sebagai permasalahan bersama, dan tidak hanya akan menjadi beban pemerintah dan aparat keamanan saja.

Ormas-ormas besar seperti NU dan Mu-

hamadiyah hendaknya dilibatkan dalam memoderasi pandangan-pandangan yang terlanjur ekstrim dan membentengi lingkungan internal masing-masing dari perembesan radikalisme.

Namun demikian, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Said Aqil Siraj menegaskan agar bentuk dan substansi moderasi diserahkan kepada masing-masing Ormas. Dan di sisi lain, pemerintah mengajak ormas-ormas untuk memikirkan konsep toleransi yang dapat memelihara iklim toleransi.

Gempur Radikalisme dengan Ideologi Pancasila

Luntarnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai Ideologi dinilai sebagai pemacu timbulnya berbagai paham radikalisme di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang dewasa ini tidak diimplementasikan secara murni dan konsekuen, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hal ini memicu timbulnya paham radikalisme di Indonesia.

Padahal Pancasila merupakan ideologi terbuka dan memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya di dunia, seperti Ketuhanan, Keberadaban, Persatuan Nasional, Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat, Perdamaian dan Keadilan Sosial.

Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Ketahanan Nasional Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar meyakini implementasi nilai-nilai Pancasila, tetap aktual dalam menghadapi ancaman global seperti gerakan radikalisme, terorisme dan separatisme.

Untuk mencegah gerakan radikalisme dan terorisme Lemhannas RI telah melakukan beragam kegiatan. Di antaranya pendidikan untuk menyiapkan kader-kader pemimpin nasional, membuat kajian strategis dan melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh komponen bangsa baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai sosialisasi secara struktur dan berkelanjutan mengenai pemahaman dan pengama-

lan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD 1945.

Selain itu, Lemhannas RI kerap menggelar *Round Table Discussion* yang mengangkat isu-isu strategis terkini seperti radikalisme. Melalui acara itu diharapkan didapatkan rumusan rekomendasi strategis untuk diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia.

Radikalisme Dalam Konteks Hubungan Kepentingan Politik atau Agama

Radikalisme, sendiri dapat dilihat dalam konteks hubungan kepentingan politik atau agama. Radikalisme tidak dapat dipahami hanya dengan menganalisis perilaku keberagamaan seseorang atau sekelompok orang. Radikalisme tidak hanya dapat dilihat dalam rentang hubungan teologis antara ajaran agama dengan para pengikutnya.

Fenomena radikalisme dapat dianalisis dengan melibatkan berbagai variabel, diantaranya variabel sosial, politik, ekonomi, termasuk didalamnya kebudayaan.

Oleh sebab itu, dalam perspektif peran negara sebagai kekuatan politik pada kehidupan bermasyarakat beragama sangat penting. Munculnya konflik dimasyarakat akibat gerakan radikalisme secara seder-

hana memperlihatkan jika negara dinilai telah gagal dalam menciptakan harmoni dan mencegah konflik.

Negara dalam hal ini, seperti dikemukakan Thomas R. Dye (1988: 1), dibangun dengan tujuan mengelola konflik. Disinilah, pemerintah menjadi aktor penting memelihara iklim harmoni dengan memberikan ruang demokratis bagi para pemeluk agama atau keyakinan apapun.

Pemerintah memiliki peran strategis termasuk memiliki otoritas dalam melakukan pengawasan atas berbagai faksi yang ada untuk tujuan memelihara suasana harmoni tersebut.

Posisi agama, walaupun sebagai persoalan privat yang hanya menyentuh wilayah individu orang perorang dalam hubungannya dengan Tuhan, tapi dalam perspektif sosiologis agama melibatkan wilayah komunal. Oleh karenanya, dalam konteks komunal inilah negara dapat terlibat "campur tangan" mengatur, khususnya dalam memelihara hubungan di antara para pemeluk agama.

Lebih-lebih ketika radikalisme sendiri memberi warna pada setiap agama dan mendominasi keberagamaan para pemeluknya, karena alasan apapun.

Dinamika masyarakat yang berlangsung baik karena adanya peran negara ataupun tanpa adanya peran negara, dapat menginspirasi terjadinya proses transformasi (pemikiran) agama. Masyarakat miskin, misalnya, dapat lebih mudah memainkan fungsi konflik yang dimiliki agama ketimbang masyarakat yang secara ekonomi lebih makmur. Karena itu tafsir atas ayat-ayat jihad yang lebih bernuansa radikal dan fundamental lebih dimungkinkan lahir dari lapisan komunitas yang kurang makmur atau secara politis tertindas.

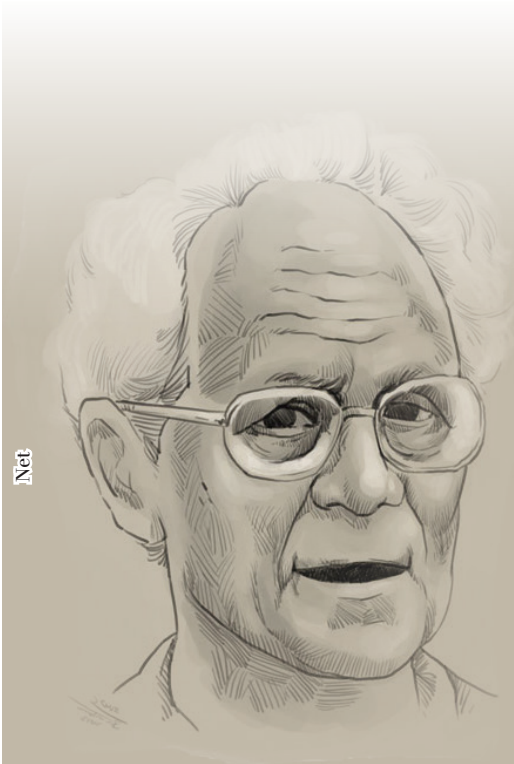
Jadi, jika potensi radikalisme itu ada pada setiap agama dan dapat diperankan oleh pemeluk agama apapun, ia tidak serta merta muncul mendominasi keberagamaan para pemeluknya hanya karena mereka meyakini kebenaran ajarannya.

Radikalisme dalam agama tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang dapat mendorong munculnya tindakan radikal atas nama agama, seperti faktor ekonomi, sosial, ataupun politik para pemeluknya. Daniel Pipes (1983: 6) bahkan mencatat adanya motif-motif materialisme dalam perilaku keberagamaan seseorang atau sekelompok orang terutama jika berhadapan dengan problem kehidupan yang dihadapinya.



Prof. Dr Franz Magnis Suseno
 Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi
 Filsafat Driyarkara

Pokok Pikiran Radikalisme Dalam Katolik



JAKARTA - Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Prof. Dr Franz Magnis Suseno yang akrab

disapa Romo Magnis mengaku secara terang-terangan jika dirinya sebagai penganut radikal dalam iman, namun sebagai penganut paham radikalitas tidak membuat dirinya memandang sinis agama lain.

Romo Magnis berpendapat jika radikalisme sendiri kemudian dapat berjalan beriringan dengan sikap terbuka, toleran, atau pluralis yang dimiliki sesama penganut agama dan kepercayaan.

Lebih lanjut kata dia, pengertian Radikalisme sendiri tidak berarti kekerasan namun kesediaan seseorang untuk secara penuh atau 100 persen menghayati dan menjalankan keimanannya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. "Radikalisme sendiri berbeda dengan sikap fanatisme dan fundamentalisme seseorang. Seseorang yang fanatik akan bertindak menyingkirkan semua pertimbangan kemanusiaan dan ideologi yang diyakininya," jelas Romo Magnis kepada Majalah Swantara beberapa waktu lalu.

Menurut Romo Magnis, seseorang yang fanatik dapat bertindak radikal karena dirinya menganggap telah berjuang demi membela agamanya. Se-

mentara fundamentalisme adalah interpretasi tertentu terhadap iman. "Seorang fundamentalis mengira dia sudah paham tentang agamanya," jelas Romo Magnis.

Dalam kosakata Gereja Katolik Roma kata Romo Magnis, radikalisme sangat sering identik dengan oposisi keagamaan. "Oposisi muncul dari anggota gereja sendiri. Jadi subyek dan obyek radikalisme keagamaan itu mengacu pada faktor-faktor internal gereja," jelas Romo Magnis.

Oposisi keagamaan itu kata Romo Magnis dimasukkan oleh lembaga gereja yang disebut heretik. "Heretik yang dimaksudkan adalah sikap penolakan secara formal atau meragukan ajaran dari Imam Katolik yang sudah dibakukan. Sudah sejak awal gereja menegaskan kewibawaan mengajar sebagai hak dan kewajibannya," ungkap Romo Magnis.

Menurut Romo Magnis munculnya gerakan radikalisme yang terbentuk sebagai oposisi keagamaan dalam Gereja Katolik Roma khususnya pada abad 13 (yang sering dipandang sebagai sintesis abad pertengahan), mengungkap beberapa pokok pikiran. Pertama, Radikalisme ada pada kelompok

Radika-
 lisme
 sendiri
 berbeda dengan
 sikap fanatisme dan
 fundamentalisme
 seseorang.
 Seseorang yang
 fanatik akan
 bertindak
 menyingkirkan
 semua pertimbangan
 kemanusiaan dan
 ideologi yang
 diyakininya

Fratricelli, kenyataannya kelompok ini tidak mendapat dukungan dalam lembaga Gereja Katolik. "Fratricelli berikhtiar mewujudkan imam kepercayaan mereka setuntas mungkin dengan mengacu pada Injil suci. Obyek atau sasaran imam kepercayaan dari kelompok ini maupun anggota Gereja Katolik adalah sama, tetapi yang membedakannya adalah metode interpretasi, pendekatan dan implikasi-implikasi praktis yang ditarik daripadanya. Seperti kelompok Fraticelli yang konsisten menggunakan kata-kata dari Injil Sine Glossa tanpa imbuhan catatan atau keterangan tanpa tafsiran," ungkap dia.

Kedua, radikalisme dalam sosok oposisi keagamaan itu secara nyata dapat menjadi cerminan hidup anggota gereja selama ini, yang tak mustahil sudah tidak sejalan atau tidak sesuai lagi dengan tujuan dan cita-cita asli, yakni tujuan pendirian gereja. "Artinya, radikalisme itu dapat muncul antara lain karena anggota gereja sendiri tidak bersungguhsungguh menghayati imannya. Dalam konteks ini bukan pribadi Yesus Kristus yang menjadi ilham spriritual utama hidup

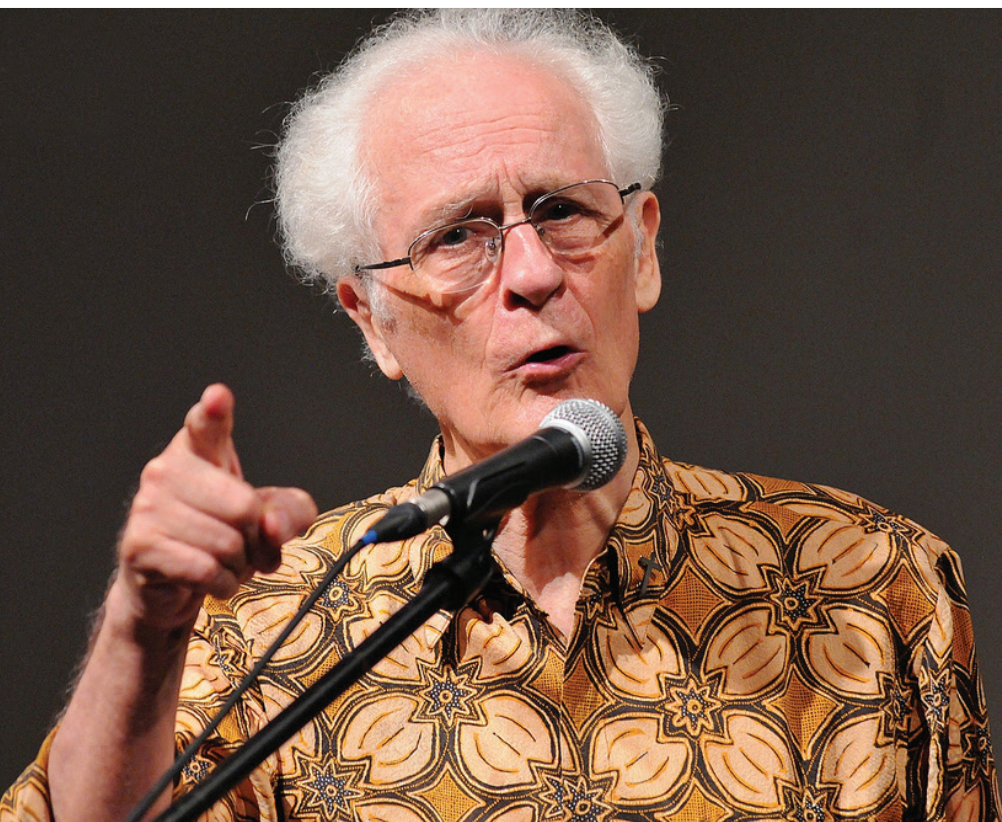
gereja, melainkan sesuatu yang lain, seperti munculnya heretik yang dapat dipandang sebagai unsur yang memacu ikhtiar yang mendekatkan jarak antara doktrin dan praktis," ungkap Romo Magnis.

Ketiga, Radikalisme dalam Gereja Katolik pada kenyataannya memakan korban anggota gereja yang sama. "Korban ini kerap dianggap sebagai hal yang wajar, mengingat beberapa pemimpin gereja dalam sejarahnya pernah memutlakan otoritas sedemikian rupa, sehingga hal ini mengakibatkan otoritas ini diklaim sebagai satu-satunya cara berada, cara memerintah sebagai lembaga gereja yang benar dan legal," kata Romo Magnis.

Keempat, Radikalisme dalam Katolik, terutama yang terbentuk dalam gerakan heterik menjadi salah satu wilayah garapan otoritas gereja, yang merasa bertanggung jawab menjaga dan mempertahankan kemurnian ajaran dan pelaksanaan ajaran yang telah diwariskan oleh Yesus Kristus dan dipertahankan dalam tradisi suci gereja sejak jaman Rasul. "Singkatnya kobaran radikalisme dalam penghayatan agama

memperjelas konflik terbuka antara kelompok radikal dalam gereja dengan otoritas gereja," jelas Romo Magnis.

Kelima, radikalisme dalam Katolik, berakar dari tafsiran bebas atas kitab suci dan terutama atas injil, yang diyakini sebagai manifestasi paling padat, kaya, dan inspiratif dari Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus. "Maka konflik dan gesekan yang terjadi disini boleh dikatakan sebagai karisma pribadi kelompok dengan hierarki yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk mengajar, memimpin dan menyucikan. Kelompok ini biasanya menafsirkan dan menghayati ajaran agama yang didirikan Yesus Kristus sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Bagi mereka patokan penafsiran itu tidak perlu ditetapkan oleh otoritas gereja karena mereka memilikinya sendiri-sendiri. Artinya, penafsiran dan penghayatan itu kemudian dinilai tidak sesuai bahkan bertentangan dengan institusi resmi yang dilengkapi dengan pelbagai hak dan tanggungjawab atas berjalan atau lumpuhnya gereja," pungkask Romo Magnis.



Menkominfo Gandeng Pihak Terkait Awasi Situs Radikal

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyampaikan, pihaknya segera memproses jika terdapat pengaduan yang diterima dari masyarakat dan lembaga terhadap situs yang bermuatan radikal dan terorisme. Dan meminta ISP (*Internet Service Provider*) untuk dilakukan pemblokiran.

Rudiantara mengaku jika pihaknya tengah membangun DNS (*Domain Name System*) Nasional. "Bertahap kita akan punya kemampuan untuk memblokir tanpa minta bantuan ISP," ucap Rudiantara.

Rudiantara menjelaskan, ISP sendiri memerlukan waktu yang bervariasi untuk akhirnya dapat diblokir. "Tergantung ISP-nya juga. Ada beberapa hal, seperti waktu itu kami anggap urgent, waktu di Youtube anak-anak ISIS, jam 1 pagi saya terima Whatsapp, besok paginya di proses, siangnya sudah tidak bisa diakses," jelas dia.

Terkait keberadaan situs radikal, Rudiantara mengaku jika situs yang bermuatan radikal dan terorisme, lebih sulit untuk dilacak ketimbang situs yang mengandung konten pornografi. Hal ini mengingat, situs pornografi umumnya memiliki kata kunci yang populer dan bersifat komersial. "Di luar itu, crawling searchingnya susah, apalagi radikalisme. Mereka tidak bikin situs radikalisme apa, abakadabra isinya



RUDIANTARA
Menteri Komunikasi
dan Informatika

mengajak radikalisme, umumnya kita mendapat laporan masyarakat, nanti kita proses," terang dia.

Disisi lain, sambung Rudiantara pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti Badan Intelijen Nasional (BIN) sebagai upaya proaktif guna membatasi ruang gerak agar gerakan radikal tidak dapat melakukan provokasi terhadap masyarakat.

Tidak sekedar itu kata Rudiantara, kementerian yang dipimpinnya juga telah membentuk tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN), yang beranggotakan dari berbagai

unsur, tidak hanya yang berasal dari Kemkominfo saja.

Namun demikian Rudiantara, mengatakan tim panel PSIBN yang dibentuknya, dikemudian hari tidak akan menjelma sebagai lembaga penyensoran terhadap website atau sebuah situs. "Tim panel itu hanya untuk memberikan penilaian, rekomendasi," jelas Rudiantara.

Tim panel sendiri kata Rudiantara bekerja memberi rekomendasi kepada Kemkominfo apakah sebuah website atau situs layak diblokir atau tidak. Tentu saja hal ini berawal dari adanya pengaduan dari masyarakat tentang konten-konten yang diduga negatif, setelah itu akan dibawa ke panel.

Kebijakan yang diambil tim PSIBN, tambah dia dilandasi dengan pendekatan secara hukum, termasuk definisi emergensi, dan ini akan dibahas dan dipertegas dalam panel. Dan Permen Nomor 19 tentang Penanganan Konten Internet masih *standing*, tetapi akan diperbaiki *governancenya*.

Masyarakat kata dia dapat mengadakan situs *radikali*, melalui email aduankonten@mail.kominfo.co.id "Makanya saya mengharapkan masyarakat mengadakan ini (situs radikalisme)," katanya.

Pihaknya kata Rudiantara selama ini telah menerima aduan



yang cukup banyak terkait situs yang meresahkan masyarakat. "Setidaknya ada 30 situs yang telah ditutup, seperti video gerakan ISIS yang beredar beberapa waktu lalu," kata Rudiantara.

Menurut Rudiantara, Kemkominfo juga menjalin kerjasama dengan Kepolisian untuk mempidanakan pemilik blog melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tujuan Pemandanaan tersebut kata Rudiantara untuk meminimalisir pemahaman kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) atau lebih dikenal dengan Negara Islam Irak dan Suriah.

Rudiantara mengatakan upaya untuk menyeimbangkan ataupun mencounter pemahaman radikalisme, digunakan strategi dengan menggandeng berbagai pihak, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta tokoh-tokoh agama untuk bekerjasama. "Kami tetap fokus pada dunia ICT nya saja," ujar Rudiantara.

Bentuk teknik untuk melakukan penyaringan yang dilakukan Kemkominfo yakni dengan menyaring secara otomatis *keywords* terkait konten radikalisme melalui search engine Nawala.

Kemkominfo sendiri aku Rudiantara selain telah menutup sejumlah situs radikal juga telah melakukan pemblokiran terhadap 78 situs. "Kita sudah hapus 78 situs yang bermuatan konten radikal, kebanyakan situs tersebut merupakan blog dan setelah kami review ternyata kontennya banyak mengajarkan pemahaman radikalisme, pungkask Rudiantara.

Prof. Dr. Thamrin Amal Tamagola
Pengamat Sosiologi

Hotspot Potensi Kekerasan



Net

JAKARTA-Pengamat Sosiologi UI Prof Dr Thamrin Amal Tamagola menilai jika tokoh-tokoh agama saat ini juga berperan dalam menciptakan krisis yang menghantam Indonesia saat ini.

Pasalnya kata Thamrin, tokoh-tokoh agama kerap menggunakan pendekatan elitis terhadap umat. Dan ini berakibat mereka lebih senang melayani umat yang ada di hotel-hotel dan mall, lalu lupa dengan umat yang berada di pinggiran dan di kampung-kampung. Padahal, daerah-daerah pinggiran dan kampung-kampung yang dipenuhi warga miskin menjadi lahan subur bertumbuhnya paham radikalisme agama.

Thamrin mengatakan "Kegagalan tokoh agama terjadi ketika mereka melupakan orang-orang kecil yang sebenarnya butuh arahan, butuh tuntunan. Karena kurangnya perhatian, maka mereka cepat dipengaruhi ketika ajaran-ajaran radikal masuk".

Oleh karenanya sambung dia penting agama tidak boleh mengabaikan

lingkungan warga miskin dan minim pendidikan yang rentan sekali terhadap lahirnya radikalisme. "Butuh reorientasi tokoh-tokoh agama untuk merangkul mereka", tegasnya.

Lebih lanjut Thamrin mengatakan tempat-tempat yang membara dengan potensi kekerasan radikalisme sendiri terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu: Pertama di kota-kota menengah secara nasional dan Kedua di wilayah Jakarta Raya dan Jawa Barat. "Terdapat perbedaan mendasar antara kedua kelompok wilayah ini, yaitu di kota-kota menengah sudah mulai ada ledakan kekerasan radikalisme secara sporadis dengan interval waktu yang tidak menentu, sedangkan di wilayah Jakarta dan Jawa Barat selain memegang rekor sebagai wilayah yang paling-sering diguncang kekerasan radikalisme juga skala potensi magma intoleransi, baik yang pasif maupun yang aktif," jelas dia.

Pada tingkat massif kata Thamrin tersimpan di bawah permukaan. Berbeda dengan pola arus urbanisasi di era Orde Baru yang secara substantif mengarah ke magnit kota-kota metropolitan seperti: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Makasar.

"Arus urbanisasi sesudah dicanangkannya proses desentralisasi dalam satu dekade terakhir ini, lebih mengarah ke kota-kota menengah di daerah (*provincial towns*) yang biasanya merupakan ibukota kabupaten atau kotamadya ataupun sebagai ibukota propinsi, ambil contoh seperti Mataram, Ambon, Poso, Kendari, Pekalongan, Anyer, Ternate dan sejenisnya," papar dia.

Kota-kota menengah ini sambung dia berpenduduk antara 250.000 s/d 1 juta jiwa. "Dan di kota-kota menengah

ini berdatangan berbagai suku yang seperti Jakarta di tahun 50an, mereka cenderung hidup berkelompok. Mengelompok menurut asal daerah atau suku ini selain karena memang urbanisasi di Dunia Ketiga selalu terjadi dalam bentuk *chain-migration*," jelas Thamrin.

Pola mengelompok ini kata Thamrin juga merupakan strategi *survival* yang murah, praktis, dan memungkinkan adaptasi secara bertahap sebelum mendapat hunian, pekerjaan maupun sekolah yang pasti dan tetap.

Dan pola pengkaplingan permukiman dan pekerjaan berdasar daerah atau suku, dan kadang agama ini, tentu saja dalam jangka waktu menengah akan mulai menimbulkan ketegangan antar-kelompok, dan bila matang, percikan konflik fisik mulai terjadi secara sporadis.

"Bila dibiarkan tak terbenahi, letupan konflik dengan kekerasan yang dahsyat menjadi hanya menunggu waktu, dan tidak terelakkan," kata dia.

Menurut Thamrin upaya dasar yang komperhensif dan berkelanjutan di 150an kota menengah di seluruh Indonesia ini diperlukan untuk meredam dan mencegah eskalasi kekerasan radikalisme di masa depan.

"Hotspots bom waktu berantai antar kota menengah ini meletup, seperti di Tasikmalaya, Temanggung, Bogor dan Garut. Akhirnya, *hotspots*, yang sudah pada taraf mendidih dan sewaktu waktu bisa meluap, adalah tentu saja Jawa Barat dan Jakarta," ujar Thamrin.

Dan kedua wilayah tersebut tambah dia akan menjadi barometer dan teladan kekerasan radikalisme yang dapat menjalar sambung-menyambung ke 150an kota-kota menengah tersebut diatas.

Al Chaidar
Pengamat Terorisme

Pemisahan Paham Fundamentalis dan Radikal Cara Ampuh Basmi Terorisme

JAKARTA - Pengamat Terorisme Al Chaidar mengatakan dalam konteks ke-Indonesiaan, problem gerakan radikalisme memicu polemik di masyarakat, antara menjaga perasaan umat Islam dan *law enforcement* yang harus ditegakkan.

Terlebih sambung Al Chaidar terdapat fakta yang mengatakan serangan brutal telah terjadi dan begitu juga sesuatu yang disebut musuh sudah didefinisikan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan langkah-langkah selanjutnya sebelum mengeksekusi 'penjahat' walaupun gerakan tersebut terus bersembunyi di balik simbol-simbol dan agama.

Sebelumnya sambung Al Chaidar perlu diketahui apa yang disebut dengan konteks teoritis pemicu gerakan radikalisme ini, hal ini perlu ditelisik terlebih dahulu dengan cermat perkembangan pemikiran fundamentalisme dalam Islam. Secara ideologis, di kalangan muslim Indonesia, khususnya pasca Reformasi (1999 – sekarang) diskursus tentang khilafah, negara Islam, jihad bai'at hingga kajian tentang Piagam Madinah dan Negara Madinah, bukan sesuatu yang baru.

Menurut Al Chaidar pada pasca reformasi terjadi transformasi yang bera-

sal dari gerakan radikal dan fundamentalis berubah menjadi gerakan teroris.

"Para pelaku memonopoli tafsir atas wacana tentang negara Islam, khilafah, jihad dan terma-terma politik Islam lainnya," kata Al Chaidar.

Kaum fundamentalis Islam, tambah dia telah memproklamkan dirinya sebagai musuh negara-negara sekuler. "*An*

aggressive revolutionary movement as militant and violent as the Bolshevik, Fascist, and Nazi movements of the past, seperti diutarakan Ilmuan Politik Amos Perlmutter," jelas dia.

Selanjutnya, kata Al Chaidar Perlmutter pernah menyebut jika kaum fundamentalis ini sangat "*Authoritarian, anti-democratic, anti-secular*, dan tidak dapat bersahabat dengan "*Christiansecular universe*" dengan tujuan utamanya adalah mendirikan sebuah "negara Islam transnasional yang bersifat otoriter".

Disini, kata dia dapat dikatakan jika kaum fundamentalis terlibat dalam konflik dengan musuh-musuh sekuler yang dicurigai membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan secara frontal dengan agama.

"Kaum fundamentalis tidak mengangap pertentangan frontal ini sebagai sebuah "arena bermain" (*play ground*),

melainkan sebuah "medan perang" (*battle field*) yang serius, bukan hanya sekedar perlawanan politik konvensional, tetapi menyebut sebagai bentuk "perang kosmik" (*cosmic war*) antara kekuatan-kekuatan yang haq dan kekuatan yang bathil," terang Al Chaidar.

Sebagai upaya untuk menghindari diri mereka dari "dunia buruk" dan menutup diri dari kontaminasi "perang-kosmik" itu, kaum fundamentalis seringkali mundur dan menyempal dari mainstream masyarakat untuk menciptakan budaya tandingan (*counter culture*). "Kaum fundamentalis bukanlah kaum yang bermimpi di siang bolong," ucap Al Chaidar.

"Mereka menyerap rasionalisme pragmatis dari modernitas, dan berada di bawah bimbingan para pemimpin kharismatik dari kelompok mereka, menyaring apa yang perlu dari dunia teknikal untuk membuat rencana aksi yang seringkali bersifat destruktif," sambung Al Chaidar.

Menurut dia hal ini Berbeda dengan kaum fundamentalis, kaum radikal Islam justru memandang bahwa memahami agama secara mengakar jauh lebih penting sebelum membuat rencana aksi yang cenderung bersifat kekerasan.

"Penyeragaman pandangan terhadap komunitas yang memberikan respon terhadap modernisasi, pemerintahan sekular dan budaya Barat ke dalam sebutan "fundamentalis" sesungguhnya merupakan sebuah penyederhanaan



yang berlebihan. Spektrum dunia pergerakan Islam sesungguhnya menyimpan warna-warna yang kaya dalam khazanah yang cukup plural," sambung dia.

Kaum radikal Islam kata dia bangkit dengan garis yang berbeda, bahkan secara diametral berlawanan dengan fundamentalis adalah taksonomi pergerakan Islam yang mesti dilihat secara berhati-hati.

"Adanya kenyataan bahwa fundamentalisme telah muncul dalam ledakan- ledakan kecil dan besar di semua budaya (budaya agama *monotheis*, maupun *politheis*) mengindikasikan sebuah kekecewaan yang meluas terhadap masyarakat modern di mana banyak di antara kita malah merasakannya sebagai sesuatu yang membebaskan, menyenangkan dan memberdayakan," jelas dia.

Lebih lanjut kata Al Chaidar, proyek-proyek yang secara kasat mata dipandang baik oleh kaum liberal, di mana kaum radikal Islam juga termasuk di dalamnya, seperti demokrasi, penciptaan perdamaian, kepedulian terhadap lingkungan, pembebasan wanita, atau kebebasan berbicara dapat dipandang buruk, bahkan haram, oleh kaum fundamentalis.

Menurut Al Chaidar, kaum fundamentalis seringkali mengekspresikan dirinya secara kekerasan, tapi kekerasan itu adalah cara atau jalan yang paling sederhana yang memancar dari ketakutan mereka yang mendalam akan hancurnya komunitas, tradisi, nilai dan budaya yang mereka anggap luhur. "Setiap gerakan kaum fundamentalis

yang pernah saya teliti, terdapat sebuah ketakutan irrasional akan proses penghancuran terhadap mereka secara sistematis," kata Al Chaidar.

Kaum fundamentalis kata Al Chaidar menilai jika respon mereka secara kekerasan adalah sebetuk perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang telah menakut-nakuti mereka selama ini. "Kaum fundamentalis percaya bahwa mereka selama ini melawan demi mempertahankan agama dan mempertahankan masyarakat yang beradab," tutur dia.

Dewasa ini kata dia, banyak masyarakat dalam komunitas dunia Islam yang menolak persepsi bahwa Barat sebagai Tak Bertuhan, tidak adil, dan dekaden. Kaum Islam radikal baru tidaklah sesederhana kaum fundamentalis yang membenci Barat. Bagaimanapun, kaum radikal baru Islam bukan merupakan gerakan yang homogen.

Muslim radikal intinya berupaya meletakkan rumah mereka sendiri dalam suatu tata-aturan yang berbeda sesuai dengan yang mereka persepsikan. Tidak sebagaimana kaum fundamentalis yang mengidap dislokasi kultural yang parah, kaum radikal juga merasa nyaman dengan zaman modern.

Hal yang mustahil kata dia untuk menggeneralisasi bentuk-bentuk ekstrim kelompok agama karena mereka bukan hanya berbeda antara tiap-tiap negara, tapi juga berbeda antara tiap-tiap kota bahkan di tiap-tiap kampung dan desa. Hanya sebagian kecil saja dari kelompok fundamentalis yang setia dengan aksi-aksi teror, sementara banyak kaum radikal Islam bahkan sangat bersahabat,

menginginkan perdamaian, berpengharapan pada hukum dan tata-aturan, dan menerima nilai-nilai positif dari masyarakat modern.

"Sebenarnya, kaum teroris bukanlah kelompok baru dalam dunia pergerakan radikal dan fundamentalis Indonesia. Kaum teroris adalah gabungan dari inti ajaran fundamentalis dan radikal yang bertemu dalam satu titik perencanaan perang melawan apa yang mereka persepsikan sebagai 'kezaliman,'" ujar dia.

Di Indonesia sendiri tambah dia kelompok teroris ini berjumlah kecil: (1) Jamaah islamiyah, dan (2) Darul Islam (terbatas pada faksi tertentu). terorisme Islam terbentuk dari adanya *overlapping of interest* dari paham fundamentalisme dan paham radikalisme Islam.

Cara mengatasi terorisme pun, kata dia secara ideologis adalah memisahkan antara paham fundamentalisme Islam dan paham radikalisme Islam untuk tidak bertemu dalam satu wadah yang utuh. "Jika pemisahan ini berhasil dilakukan, maka terorisme akan mengalami kematiannya secara pelan-pelan. Namun, jika radikalisme dan fundamentalisme terus menerus mendapatkan momentum untuk bersatu, maka akan sulit sekali mengatasi terorisme. Terorisme akan tumbuh subur di kalangan di mana antara simbol dan hakikat bertemu. Jama'ah Islamiyyah pada awalnya bukanlah organisasi teroris, ia merupakan organisasi radikal yang mengalami fundamentalisasi di Malaysia setelah bertemu dengan banyak kalangan fundamentalis di luar Indonesia," pungkas dia.



Andi Rahman Alamsyah
Pengamat Sosiologi Politik FISIP UI

Modernisasi Organisasi Radikal Melalui Dialog Penting Dilakukan

PAHAM Radikalisme yang berkembang saat ini menjadi ancaman bagi Ketahanan Nasional utamanya Ketahanan Ideologi. Berikut ini wawancara Majalah Swantara (MS) dengan Dosen Sosiologi Politik FISIP UI, Andi Rahman Alamsyah (AA) terkait dengan radikalisme dari sudut pandang Sosiologi Politik.

(MS) : Menurut pandangan Bapak sebagai Pengamat Sosiologi Politik, apa definisi dari Radikalisme ?

(AA) : Secara umum yang dimaksud dengan radikalisme adalah suatu paham yang memuat pandangan untuk mengubah suatu tatanan sosial yang ada secara total. Landasannya bisa agama, ideologi tertentu, dan sebagainya. Para penganut suatu paham radikal berpandangan bahwa segala persoalan berakar pada tatanan sosial yang ada. Karena itu, solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu adalah mengubah (transformasi) tatanan sosial tersebut dengan tatanan sosial lain yang mereka yakini akan membawa kebaikan: kapitalisme dengan sosialisme atau kapitalisme dengan Islam. Mereka tidak mempercayai perbaikan-perbaikan (reformasi) yang sifatnya parsial dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

(MS) : Faktor apa saja yang menyebabkan individu atau kelompok orang tertarik bergabung kedalam kelompok radikal?

(AA) : Banyak cara pandang yang menjelaskan mengapa individu atau kelompok tertarik untuk bergabung dengan kelompok radikal. Pendekatan psikologis berpendapat penyebabnya adalah kondisi-kondisi kejiwaan, seperti kemarahan, kekecewaan, disorientasi, dan sebagainya. Pendekatan kultural berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh nilai-nilai atau



paham radikal yang dipelajari. Pendekatan jaringan menyatakan bahwa hal itu karena orang atau kelompok berhubungan dengan orang atau kelompok radikal. Pendekatan sekuriti menilai hal itu karena negara lemah. Saya sendiri berpendapat bahwa penyebabnya adalah persoalan ekonomi politik (kemiskinan, marginalisasi, kekerasan negara, dan sebagainya). Saya tidak menampik bahwa ada persoalan psikologis, kultur, jaringan, negara yang lemah, tapi semuanya adalah gejala sekunder yang dihasilkan oleh gejala primer, yaitu persoalan ekonomi-politik.

(MS) : Menurut Bapak, mengapa pelaku Radikalisme merekrut kelompok muda dalam menjalankan aksi terornya?

(AA) : Anak muda adalah elemen masyarakat yang paling mudah terkena dampak negatif dari persoalan ekonomi dan politik. Sementara pada sisi lain, mereka memiliki harapan-harapan tertentu tentang masa depan (kerja, berkeluarga, berkarir, dan sebagainya), mungkin juga persyaratan formal terpenuhi (pendidikan, keterampilan, dan seterusnya), tapi harapan-harapan itu sulit untuk dicapai karena tersumbat oleh persoalan ekonomi

dan politik. Kelompok radikal adalah saluran alternatif yang bisa dipakai untuk memenuhi harapan-harapan itu, walaupun seringkali sifatnya ilusi. Hal itu memudahkan anak muda untuk direkrut atau masuk kedalam kelompok-kelompok radikal.

(MS) : Faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaku Radikalisme menempuh jalan kekerasan untuk mencapai tujuannya?

(AA) : Kekerasan dibentuk oleh persoalan-persoalan ekonomi dan politik yang mereka hadapi. Saluran lain untuk meng-atasi persoalan-persoalan itu biasanya tidak tersedia atau tersumbat. Pada titik ini, kekerasan adalah satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, walaupun dalam banyak kasus tidak selalu berhasil. Kekerasan itu kemudian menjadi doktrin atau bagian dari nilai atau ideologi mereka, yang diturunkan secara turun-temurun, disesuaikan dan diberi makna baru sesuai dengan konteks yang dihadapi.

(MS) : Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah aksi terorisme dari kelompok radikal?

(AA) : Penegakan hukum; memoderasi organisasi-organisasi radikal melalui dialog penting untuk dilakukan. Dan itu sudah dilakukan di Indonesia, tapi itu saja tidak cukup. Perlu dilakukan penataan kondisi-kondisi ekonomi dan politik, yang membuat orang-orang yang tergabung atau berpotensi untuk bergabung dengan kelompok-kelompok radikal merasa mendapatkan manfaat dari kehidupan ekonomi dan politik yang ada. Jika orang sudah merasakan manfaat seperti itu, orang tentu berpikir beberapa kali untuk bergabung dengan kelompok-kelompok radikal.

Mayjen TNI Agus Surya Bakti
Deputi I BNPT

Cegah Radikalisme, BNPT Ciptakan Program Damai Di Dunia Maya

JAKARTA - Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia, berikut adalah wawancara Majalah Swantara (MS) dengan Deputi I Bidang Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal TNI Agus Surya Bakti (AS), untuk mengupas tuntas sejauh mana peran BNPT menjalankan fungsi dan peran yang diembannya, termasuk program-program apa saja yang diciptakan oleh BNPT

(MS) : Mengapa paham radikalisme dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara?

(AS) : Dalam sejarah bangsa ini paham atau ideologi radikal telah menjadi ancaman nyata yang termanifestasikan dalam gerakan radikal yang destruktif dan mengancam keutuhan dan kedaulatan negara dan bangsa. Dalam konteks terorisme, paham radikal merupakan akar yang bisa mendorong dan menimbulkan tindakan dan aksi terorisme. Kekerasan akan menjadi ancamannya-ta bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, karena dapat mengganggu keamanan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kekerasan yang terus dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi lahirnya budaya kekerasan di tengah masyarakat dan mengancam keutuhan berbangsa dan



Istimedia

bernegara.

(MS) : Kebijakan apa saja yang sudah diterapkan dan tengah dirancang oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme di Indonesia ?

(AS) : Keberadaan BNPT merupakan kebijakan negara dalam melakukan upaya yang komprehensif dan integratif dalam penanggulangan terorisme. Upaya penanggulangan yang komprehensif dan integratif tersebut dimaksudkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan terorisme tidak hanya pada aspek penindakan (*hard approach*) saja, tetapi dipadukan, bahkan, mengedepankan pendekatan pencegahan (*persuasive approach*) dengan berbagai program yang menyentuh akar persoalan, yakni ideologi, kebencian, social-ekonomi dan ketidakadilan. Dalam konteks pencegahan tersebut, BNPT telah menjalankan kebijakan pencegahan dengan dua strategi.

Pertama, strategi Kontra Radikali-

sasi yakni melakukan upaya pencegahan dan penangkalan penyebaran paham radikal terorisme di tengah masyarakat melalui kegiatan lawan propaganda, pengawasan, peningkatan kewaspadaan dan perlindungan. Sasaran dari strategi ini adalah kelompok pendukung, simpatisan dan masyarakat dengan tujuan meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh penyebaran paham radikal terorisme.

Kedua, deradikalisasi yakni melakukan upaya pembinaan dan penyadaran kepada perorangan maupun kelompok radikal terorisme. Sasaran dari strategi ini adalah mereka yang sudah terpapar dengan ideologi radikal yang meliputi kelompok inti dan militan yang ada di dalam Lapas sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) narapidana terorisme maupun di luar Lapas yakni keluarga, mantan teroris dan jaringannya dengan tujuan mereka bisa mengubah pandangan, paham, dan sikap menjadi moderat dan cinta NKRI.

(MS) : Pihak mana sajakah yang digandeng oleh BNPT dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme di Indonesia, bentuk kerjasama apa saja yang telah terjalin?

(AS) : Dalam upaya pencegahan, BNPT merupakan *leading sector* yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kemampuan dan potensi instansi, stakeholder dan masyarakat secara umum dalam pencegahan paham radikal terorisme. Koordinasi seluruh kemampuan dan potensi tersebut kami sebut sebagai upaya "pencegahan semesta" yakni upaya pelibatan seluruh komponen masyarakat.



Istimewa

Dalam mewujudkan hal itu, BNPT telah bekerja-sama baik dengan instansi pemerintah pusat dan daerah maupun dengan masyarakat. Kerjasama dengan instansi pemerintah diwujudkan dalam bentuk sinergitas program pencegahan terorisme yang ada di masing-masing instansi misalnya dengan TNI, POLRI, BIN, Kemenkumham, Kemenbudikdasmen, Kemenag, Kemenpora, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenhub, Dewan Pers dan yang lain dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan. Kerjasama dengan pemerintah daerah diwujudkan dengan pembentukan mitra strategis BNPT di daerah tingkat provinsi yang dinamakan dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang saat ini sudah terbentuk di 26 Provinsi. Sementara dengan elemen masyarakat kerjasama juga dilakukan baik dengan tokoh agama (ulama), tokoh masyarakat, akademisi, ormas, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, media massa dan kekuatan masyarakat sipil lainnya dalam bentuk program bersama dalam pencegahan terorisme. Kerjasama dan pelibatan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat tersebut diperkuat dengan adanya MoU (kesepakatan bersama) dalam pelaksanaan pro-

gram nasional pencegahan terorisme.

(MS) : Bentuk pembinaan apa saja yang dilakukan BNPT terhadap para napi terorisme?

(AS) : Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh BNPT terhadap napi terorisme dilakukan dalam empat tahapan yang berkelanjutan yang kami sebut sebagai program deradikalisasi di dalam Lapas. Tahap pertama, program identifikasi, yakni upaya mengidentifikasi napi teroris terkait jaringan, tingkat dan tipologi pemahaman serta sikap keagamanya sebagai bahan untuk program pembinaan. Tahapan kedua, rehabilitasi, yakni upaya pembinaan keagamaan dan kebangsaan untuk menyadarkan napi tentang kekeliruan paham radikal dan tindakan teror. Selain itu rehabilitasi dilaksanakan untuk memoderasi tingkat radikalitas mereka sehingga memiliki sikap yang kooperatif, terbuka, damai dan toleran. Ketiga, reedukasi, yakni tahap berikutnya dari rehabilitasi dengan cara memperkuat wawasan dan landasan moral pemahaman dan sikap narapidana teroris melalui pemberian pencerahan pemahaman ajaran agama yang damai, toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan dan

keragaman serta memberikan wawasan dan pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air. Tahap terakhir, resosialisasi, yakni upaya mengembalikan narapidana teroris agar bisa berintegrasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara baik dan bisa diterima oleh lingkungannya. Pembekalan dalam tahap ini adalah dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian (kewirausahaan).

(MS) : Apakah BNPT sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah di Indonesia yang rawan terhadap tindakan terorisme? Daerah mana saja di Indonesia yang dianggap rawan?

(AS) : Dari tahun 2012 BNPT telah melakukan pemetaan terhadap seluruh wilayah di Indonesia terkait potensi ancaman dan tindakan terorisme. Tentu saja pemetaan melalui riset dan penelitian itu akan terus diperbaharui sesuai dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. Setidaknya dalam pemetaan tersebut ada 12 titik rawan di wilayah Indonesia di mana tingkat potensi ancaman dan penyebaran ideologi radikalnya masih tinggi. Beberapa yang bisa disebutkan adalah Aceh, Lampung, Banten, Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Poso, Palu, dan NTB.

(MS) : Apakah BNPT sudah mencetak *blueprint* terkait pencegahan dan penanggulangan dari gerakan radikalisme tanah air?

(AS) : Ada dua *blueprint* yang telah dibuat dalam rangka penanggulangan terorisme. Pertama, *Blueprint* Deradikalisasi sebagai suatu pijakan dasar (*guidance*) dalam pelaksanaan deradikalisasi di dalam dan di luar Lapas. Kedua, *Blueprint* Pencegahan sebagai pijakan dalam pelaksanaan pencegahan terorisme di Indonesia. *Blueprint* Pencegahan ini merupakan suatu pijakan sinergitas antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program pencegahan yang komprehensif.

(MS) : Program apa saja yang telah dirancang oleh BNPT berkenaan dengan



deradikalisasi?

(AS) : Program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT selama ini merupakan program berkelanjutan yang dibagi dalam dua area; di dalam Lapas dan di luar Lapas.

Pertama, program di dalam Lapas merupakan program deradikalisasi yang diarahkan pada napi terorisme yang tersebar di 27 Lapas di 10 Provinsi. Dalam pelaksanaannya program di dalam lapas harus melalui tahapan-tahapan yang telah disebutkan sebelumnya yakni, tahapan pertama yang dilakukan adalah identifikasi untuk melihat indeks pemahaman radikal yang dimiliki oleh napi teroris. Hasil identifikasi ini sangat penting dan berpengaruh pada treatment dalam tahapan berikutnya yang disebut rehabilitasi dan reedukasi. Proses akhir dari program dalam Lapas adalah resosialisasi yang ditujukan untuk mengintegrasikan napi terorisme agar mampu bersosialisasi dan diterima di lingkungan sosial. Meskipun sudah dinyatakan bebas dan keluar masih pendampingan yang disebut dengan deradikalisasi luar Lapas di tengah masyarakat.

Kedua, program deradikalisasi di Luar lapas merupakan program berkelanjutan dari dalam Lapas. Namun, tidak hanya untuk mantan napi teroris, program di luar lapas juga diarahkan pada kelu-

arga, mantan teroris, jaringan dan per-seorangan maupun kelompok yang berpotensi menjadi radikal teroris. Dalam program ini dijalankan empat kegiatan yang meliputi identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Sebagai alat kontrol terhadap keberhasilan program deradikalisasi tersebut diwajibkan adanya tahapan akhir yang disebut monitoring dan evaluasi baik di dalam maupun di luar lapas.

Terkait program deradikalisasi sejauh ini sudah banyak yang membuahkan hasil walaupun masih ada yang masih dalam proses pembinaan. Hasil nyata dari program di dalam Lapas misalnya bisa dilihat dari tersadarnya dan kembalinya mantan narapidana teroris seperti Ali Imron, Ali Fauzi, Nasir Abbas, Abdurrahman Ayub, Abu Ridho dan terakhir Umar Patek yang telah mengikrarkan kecintaan terhadap NKRI baru-baru ini.

(MS) : Apa tujuan dari BNPT meng-gandeng para pegiat dunia maya, khususnya kalangan anak muda, untuk menghadang penyebaran paham radikalisme melalui Internet ?

(AS) : Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan dasar dari program yang kami sebut sebagai Program "Damai di Dunia Maya". Dalam hal ini BNPT telah mencanangkan tahun 2015

sebagai "Tahun Damai di Dunia Maya" yakni upaya membanjiri dunia maya dengan pesan-pesan perdamaian dan cinta NKRI untuk mengimbangi dan menghadapi penyebaran paham radikalisme. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, media internet selama ini telah dijadikan media efektif bagi kelompok radikal teroris dalam melakukan propaganda, komunikasi dan rekrutmen keanggotaannya. Dunia maya akhirnya menjadi ruang yang penuh dan ramai dengan penyebaran kebencian, penghasutan, provokasi dan ajakan kekerasan. Kedua, media internet merupakan media yang banyak digandrungi anak muda. Dari Survey terakhir tahun 2014 oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) dari 88,1 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet, 49 persen adalah mereka yang kalangan generasi muda berumur 18-25 atau generasi *millennial/digital native* yakni mereka yang lahir setelah tahun 1980-an. Popularitas media internet di kalangan anak muda ini tentu saja menjadi tantangan tetapi juga potensi besar. Karena itulah, melibatkan mereka pegiat dunia maya khususnya di kalangan generasi muda tidak hanya memberikan pencerahan pada mereka dari pengaruh radikalisme tetapi juga merangkul potensi besar itu dalam rangka ikut terlibat dalam penyebaran paham dan ajaran damai dan cinta NKRI di dunia maya.

Kami selama ini telah menyediakan media *online* dalam pencegahan terorisme di dunia maya dengan adanya www.damailahindonesiaku.com yang bersifat informatif dan www.jalandamai.org yang bersifat edukatif. Di tahun 2015 ini kami mengenalkan portal www.damai.id sebagai jejaring portal komunitas damai yang merangkul seluruh pihak terutama anak muda dalam meramaikan dunia maya dengan paham dan ajaran damai dan cinta NKRI di dunia maya.

Pada Dasarnya Agama Tidak Mengajarkan Kekerasan

JAKARTA - Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra mengemukakan ancaman dan tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dunia dewasa ini adalah tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme, utamanya radikalisme agama.

“Peristiwa 11 September 2001 menjadi cikal bakal serangan Amerika dan para sekutunya

ke Afganistan dan Irak serta konflik Israel dan Palestina menjadi salah satu faktor terpenting pemicu meningkatnya gerakan radikalisme dan terorisme di belahan dunia dewasa ini,” ungkap Azyumardi kepada Majalah Swantara di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Azyumardi mengatakan munculnya paham radikalisme agama khususnya pada Islam, antara lain bersumber pada pertama, pemahaman keagamaan yang literal dan sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al

Quran.

“Pemahaman seperti ini kemudian hampir tidak memberikan ruang bagi akomodasi dan kompromi dengan kelompok muslim lain yang umumnya lebih moderat, oleh karena itu menjadi mainstream bagi umat. Kelompok ini muncul sejak masa al Khulafa al Rasyidun keempat Ali bin Abi Thalib, dimana terdapat Kaum Khawarij yang sangat radikal dan banyak melakukan pembunuhan terhadap pemimpin muslim yang mereka anggap kafir,” ungkap dia.

Kedua, adalah bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi yang berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. “Hal ini terlihat pada gerakan dan pandangan Salafi, khususnya yang terjadi pada spektrum yang sangat radikal, seperti Wahabiyah yang muncul di Semenanjung Arab pada akhir abad 18 dan awal abad 19 yang hingga kini terus tumbuh dan berkembang,” ujar Azyumardi.

Sedangkan tema utama yang diusung oleh Kelompok Salafi kata Azyumardi Azra adalah pemurnian Islam, yakni dengan melakukan pembersihan terhadap Islam dari pemahaman dan praktik keagamaan yang dipandang sebagai *bid'ah*. Tindakan pemurnian seperti ini yang dilakukan oleh mereka tidak jarang ditempuh melalui jalan kekerasan.



Ketiga, adalah Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Disaat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial budaya, dan akses globalisasi dan semacamnya merupakan faktor tambahan munculnya kelompok radikal. "Kelompok sempalan seperti ini tidak jarang mengambil ke-kultusan yang sangat eksklusif, tertutup dan terpusat kepada seorang pimpinan yang dianggap kharismatik," jelas Azyumardi.

Begitu pula dengan pola penyebaran paham yang digunakan oleh kelompok radikalisme kata Azyumardi yakni dengan menggunakan berbagai sarana dan media, baik dalam rangka pengkaderan internal bagi anggota maupun untuk kepentingan sosialisasi kepada masyarakat luas. "Kegiatan sosialisasi yang dilakukan seperti pengkaderan organisasi yakni melalui pelatihan. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui masjid-masjid yang berhasil "dikuasai" kelompok radikal. Pemanfaatan masjid terungkap berdasarkan penelitian yang dilakukan pihak *Centre for the Study Religion and Culture (CSRC)* Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta dan hal tersebut pernah dimuat di *Republika*,

Januari 2010. Sosialisasi penyebaran paham radikalisme juga dilakukan melalui penerbitan majalah, buku, buletin dan *booklet*. "tambah Azyumardi.

Azyumardi berpendapat jika gerakan radikalisme dewasa ini tidak berbasis pada nilai-nilai agama. "Radikalisme bukan berbasis pada nilai agama melainkan kemudian dijustifikasi dengan doktrin-doktrin agama. Jadi bukan agamanya menjadi basis namun kegiatan tersebut dijustifikasi dengan ajaran agama atau konsep tertentu di dalam agama. Atas dasar ajaran agama, mereka melakukan tindakan kekerasan. Padahal gerakan radikalisme sendiri lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik namun kemudian diberikan justifikasi keagamaan," tegasnya.

Selain itu, Azyumardi menegaskan jika gerakan radikalisme sendiri bukan dipicu karena pemahaman agama yang radikal. "Memang ada pemahaman keagamaan yang radikal namun bukan agama yang mendasari seseorang untuk mengambil tindakan kekerasan, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan politik. Misalnya adanya keinginan untuk membentuk negara Islam maka untuk mewujudkan hal tersebut, me-

reka melakukan tindak kekerasan di antaranya menggunakan jalan teror. Islam secara keseluruhan tidak menganjurkan kekerasan melainkan semua harus diambil dengan cara damai. Saya melihat gerakan-gerakan radikal dan teror lebih terkait dengan agenda-agenda politik dibanding dengan agenda keagamaan," terang dia.

Di dalam kitab suci sendiri kata Azyumardi tidak ada satu ayatpun yang mengajarkan kekerasan. "Mereka kemudian memiliki motif politik terselubung yang kemudian dicari justifikasi berupa ayat-ayat tertentu dan ditafsirkan sendiri yang dilepas dari konteksnya lalu seolah-olah agama mengajarkan kekerasan. Mana ada Islam mengajarkan terorisme? Al-quran dan hadis tidak ada yang mengajarkan tindak kekerasan. Intinya adalah pada dasarnya agama tidak mengajarkan tindak kekerasan," kata Azyumardi.

Azyumardi berpendapat pencegahan dan penanggulangan gerakan radikalisme harus melibatkan sejumlah pihak misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Selain itu pemerintah juga bisa memfasilitasi organisasi keagamaan yang memiliki jaringan ke bawah seperti NU dan Muhammadiyah. Mereka harus difasilitasi pemerintah karena mereka potensial namun tidak memiliki dana. Padahal dana pencegahan dan penanggulangan gerakan radikalisme pemerintah cukup besar tetapi tidak dipergunakan secara efektif dan efisien, seperti pelibatan *civil society*. Sepengetahuan saya, ada MoU antara NU dengan BNPT tetapi hal tersebut tidak ada tindak lanjutnya. Mungkin kerjasamanya masih seputar diskusi program. Padahal saya melihat ada potensi yang dimiliki NU dan Muhammadiyah, mereka memiliki program deradikalisasi atau pencegahan terorisme," tandas dia.

Taprof Bidang Ketahanan Nasional
Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar

Pancasila Senjata Ampuh Hadapi Gempuran Paham Radikalisme



Istimedia

JAKARTA - Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Ketahanan Nasional Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar menilai melunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa yang kini dialami pada Masyarakat Indonesia, sebagai pemicu timbulnya berbagai paham radikalisme di Indonesia.

"Nilai-nilai Pancasila dewasa ini tidak diimplementasikan secara murni dan konsekuen, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara sehingga hal ini memicu timbulnya paham radikalisme di Indonesia sebagai ancaman yang menggerogoti ketahanan nasional khususnya ketahanan ideologi bangsa dan negara," ungkap Lumban kepada Majalah Swantara beberapa waktu lalu.

Lumban juga menganggap radikalisme adalah ancaman bagi suatu ideologi karena merupakan ekspresi Ketuhanan yang tidak berkebudayaan. "Radikalisme sendiri tumbuh dan berkembang akibat merosotnya nilai-nilai ketuhanan

pada masyarakat," ungkap Lumban.

Lumban menambahkan sikap ber-Ketuhanan sendiri merupakan cerminan dari Sila Pertama dari Pancasila, dan secara langsung berhubungan dengan Sila Kedua, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Tidak hanya terbatas itu saja, pada spektrum yang lebih luas, radikalisme disebut sebagai ancaman karena bisa dianggap sebagai cerminan dari lumpuhnya Sila Ketiga dari Pancasila yakni Persatuan Indonesia, mengingat kelompok radikal umumnya berada di lingkungan pergaulan yang sempit dan tertutup. "Mereka memiliki keterbatasan ilmu dan pandangan yang terbatas, akibat lingkungan yang sempit," jelas Lumban.

Lebih lanjut Lumban mengatakan daya permusyawaratan dan kepemimpinan yang buruk, juga dapat menjadi pemicu beragamanya aksi radikalisme di Indonesia.

Walaupun Indonesia memiliki sistem adat istiadat yang sangat kuat sebagai modal dasar terciptanya sistem keamanan nasional, kata Lumban paham radikalisme terus saja membayangi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat pengaruh perkembangan lingkungan sosial antar daerah maupun pengaruh luar yang berasal dari negara lain.

Dalam menghadapi situasi ancaman terhadap ideologi tersebut sambung Lumban bukan semata merupakan tu-

gas TNI dan Polri, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari seluruh potensi komponen bangsa baik dari kalangan sipil, swasta, ormas, orsospol, LSM, mahasiswa dan pemuda.

Sebagai upaya dan senjata yang ampuh untuk mencegah berkembangnya secara

Pancasila adalah solusi tepat untuk mengatasi permasalahan radikalisme di Indonesia saat ini. Pancasila sendiri, sebagai sebuah titik keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi acuan masyarakat untuk berkehidupan, tetapi juga sebagai alat ukur pemerintah dalam menjalankannya pemerintahannya

luas paham radikalisme yang menjadi ancaman terhadap ketahanan ideologi bangsa, kata Lumban yaitu dengan mengembalikan nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam sanubari Masyarakat Indonesia.

“Pancasila adalah solusi tepat untuk mengatasi permasalahan radikalisme di Indonesia saat ini. Pancasila sendiri, sebagai sebuah titik keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi acuan masyarakat untuk berkehidupan, tetapi juga sebagai alat ukur pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya,” ujar dia.

Selain itu kata Lumban, Pancasila sebagai soko guru kehidupan berbangsa dan bernegara cukup sakti terhadap gemuruh, pengaruh dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya yang ada, seperti

liberalisme, sosialisme, kapitalisme.

Karena lanjut Lumban Pancasila sendiri merupakan ideologi terbuka dan pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya yang ada di dunia ini, seperti ketuhanan, keberadaan, persatuan nasional, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, kesejahteraan rakyat, perdamaian dan keadilan sosial.

“Implementasi nilai-nilai Pancasila, tetap aktual dalam menghadapi ancaman global seperti gerakan radikalisme, terorisme dan separatisme,” tegas Lumban.

Lemhannas RI sendiri sesuai dengan peran dan fungsi yang diembannya kata Lumban telah melakukan beragam kegiatan dalam upaya mencegah timbulnya gerakan radikalisme di bumi pertiwi ini yakni melalui pendidikan untuk menyiap-

kan kader-kader pemimpin nasional, membuat kajian strategis dan melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh komponen bangsa baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai sosialisasi secara struktur dan berkelanjutan mengenai pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD 1945.

“Tidak hanya itu saja, Lemhannas RI juga kerap menggelar acara *Round Table Discussion* yang mengangkat isu-isu strategis terkini seperti radikalisme dengan mengundang berbagai pihak terkait. Dengan demikian diharapkan dapat dirumuskan suatu rekomendasi strategis untuk diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, guna mengambil kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia,” ucap Lumban.



KH. Said Aqil Siradj

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



NU Tegaskan Menolak Semua Bentuk Tindak Kekerasan Guna Mencapai Tujuan

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menilai ajaran Wahabi yang berasal dari Arab Saudi yang dikenal keras dalam mendidik pengikutnya, selangkah lagi dapat memicu gerakan radikal. Karena dikhawatirkan akan memberikan pemahaman serta efek tentang pemahaman radikal kepada para pengikutnya.

"Namun saya tidak menuduh bahwa ajaran Wahabi penganut paham radikal apalagi terorisme," jelas KH Said Aqil Siradj.

Menurut KH Said, menambahkan belakangan ini PBNU juga telah mencatat beberapa perguruan serta pesantren yang disinyalir memberikan pengajaran melalui cara-cara kekerasan.

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU tegas KH Said Aqil Siradj menolak tindakan apapun yang menggunakan jalan kekerasan, karena didalam agama apapun, tidak ada satupun yang mengajarkan manusia melakukan

tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan maraknya pemberitaan tentang kelompok *Islamic State of Iraq and Syam* (ISIS) tambah KH Said Aqil Siradj, sejumlah negara di dunia mengkhawatirkan gerakan radikal yang dilakukan oleh ISIS dengan mengatasnamakan agama tertentu.

PBNU sendiri sambung KH Said Aqil Siradj sudah menyampaikan sikap kepada Pemerintah Indonesia mengenai sikap NU terhadap perkembangan Islam radikal global dan khusus yang terjadi di Indonesia. NU meminta pemerintah agar bersikap tegas dalam menghadapi pergerakan Islam radikal di tanah air.

"Mengokohkan kembali peradaban Islam sebagai pondasi keberlangsungannya NKRI, Islam yang berbudaya, Islam yang beradab. Sejak dulu kita menegaskan bahwa NU anti radikalisme, anti terorisme, apalagi anti ekstrimis, siapapun yang menggunakan kekerasan atas

nama agama Islam, salah. Kita harapkan pemerintah lebih tegas,” cetus KH Said Aqil Siradj.

Disisi lain, sambung KH Said Aqil Siradj, NU berpandangan sudah saatnya negara secara lebih serius melibatkan Ormas-ormas Islam meluruskan faham-faham radikal tersebut.

Oleh karenanya, tambah KH Said Aqil Siradj, terorisme dan radikalisme, tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah dan aparat keamanan saja, pelibatan ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah adalah langkah yang bijaksana untuk memoderasi pandangan-pandangan yang terlanjur ekstrim dan membentengi lingkungan internal masing-masing dari perembesan radikalisme.

Namun, KH Said berpendapat bentuk dan substansi moderasi tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing ormas. Disisi lain, sambung KH Said Aqil Siradj pemerintah mengajak

ormas-ormas tersebut untuk memikirkan konsep toleransi yang dapat memelihara iklim toleransi.

Pada lima tahun belakangan ini, kata Said NU sendiri telah mengambil langkah-langkah nyata dalam upaya pencegahan munculnya gerakan radikalisme di Indonesia, misalnya pada pelaksanaan Muktamar NU ke 32 di Makassar pada 2010 yang mengusung tema “Khidmah Nahdliyah Untuk Indonesia Bermartabat”.

Pengambilan tema kata KH Said Aqil Siradj berdasarkan keprihatinan NU dengan merebaknya faham-faham radikal, baik radikal agama maupun ultra liberal, sehingga dikhawatirkan akan dapat meredupkan sikap moderat yang menjadi karakteristik khusus Masyarakat Indonesia.

Semua itu tambah KH Said, didukung dengan terciptanya program aksi meliputi tiga hal, yakni dakwah, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

“Tersirat di dalamnya kehendak untuk membangun kemandirian umat, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memperkuat ajaran ahlussunah wal jamaah (Islam Nusantara) yang moderat toleran dan menjauhi kekerasan, berkeadilan, dan berkeadaban,” jelas KH Said Aqil Siradj.

KH Said Aqil Siradj memaparkan secara garis besar program aksi NU, baik yang sedang maupun akan dilaksanakan sebagai berikut, Pertama, bidang dakwah berupa langkah-langkah afirmasi nilai-nilai *ahlussunah waljamaah an nahdliyah* sekaligus untuk menegaskan paham-paham radikal di masyarakat terutama melalui program kaderisasi yang intensif, termasuk didalamnya adalah berperan serta dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama dalam level global.

Tujuan utamanya papar KH Said adalah memperkenalkan nilai-nilai *Tasamuh* (toleransi), *Tawasuth* (moderat), *Tawazun* (berimbang), *Adalah* (keadilan), dan *Ukhuwah* (persaudaraan) yang meliputi *ukhuwah Islamiyah* (sesama Islam), *ukhuwah wathoniyah* (sesama warga negara), *ukhuwah basyariah* (sesama umat manusia).

Kedua, bidang sosial: meliputi pelayanan sosial melalui pemanfaatan zakat, *Infaq*, dan *Shodaqoh*.

Ketiga, bidang pemberdayaan ekonomi umat. “Kegiatan ini diarahkan untuk menggelorakan jiwa kewirausahaan dikalangan nahdliyin dan pengembangan ekonomi syariah dengan tujuan jangka menengah dan panjang,” kata KH Said.

Dengan tujuan tambah KH Said adalah untuk membentengi umat dari dominasi kapitalisme global.

Kesemua kegiatan tersebut kata KH Said sekaligus untuk mempraktekkan semangat pluralitas dibidang ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, suatu sinergi antara mereka yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah demi *kemaslahatan* bersama.



Strategi Alternatif Mengatasi Berkembangnya Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia

(Oleh: Mayjen TNI (Purn) Chasib, Taprof bidang Strategi Lemhannas RI)

Pendahuluan

Masalah Radikalisme dan Terorisme tidak berhenti menjadi bahasan baik secara global, regional maupun nasional karena dampak yang ditimbulkan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir setiap Negara memiliki cara dan strategi dalam mengatasi kehadiran radikalisme dan terorisme, bentuk, aksi dan motivasi yang berbeda menyulitkan pemetaan permasalahan pokok, sehingga penanganan yang dilakukan hanya sebatas pada penindakan setelah kejadian karena mengalami kesulitan melakukan antisipasi perkembangan berikutnya. Situasi tersebut menimbulkan pemikiran baru dan pertanyaan, apa sebenarnya kendala dalam mengatasinya? formulasi yang ada terasa tertinggal dihadapkan dengan perkembangan bentuk dan kegiatan terorisme, penindakan yang dilaksanakan pun seolah menangkap bayangan.

Terorisme sejak beberapa abad lalu sudah ada dan mengalami perkembangan seiring dengan pengaruh nasional, regional dan global serta perkembangan pemikiran manusia. Salah satu penyebab munculnya radikalisme di Indonesia adalah menipisnya nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai-nilai budaya bangsa, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan perilaku dan moral serta cara berfikir, yang memudahkan penyebaran faham lain di tengah-tengah masyarakat apalagi dibarengi dengan gap kehidupan antara kenyataan dengan harapan yang begitu lebar.



Masyarakat tidak lagi memahami jati dirinya sehingga nilai-nilai tidak mendasari perilaku yang pluralisme, tidak ada lagi toleransi dan gotong royong. Situasi itu memungkinkan berkembangnya terorisme dalam berbagai bentuk dan motif serta gerakan yang berbeda. Penanganan dengan pendekatan keamanan dan penegakan hukum belum berhasil mengatasi terorisme dan penyebaran faham radikal di tengah masyarakat. Implementasi strategi dan kebijakan dalam tataran program nasional yang dicanangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga belum membawa pada situasi berkurangnya secara signifikan radikalisme maupun terorisme. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan bagaimana dan apa penyebab terus terjadinya pengembangan radikalisme dan terorisme di Indonesia?. Melalui

kesempatan ini penulis ingin berpartisipasi dan memberi kontribusi pemikiran sehingga kita tidak terjebak dan terbawa pada kegiatan yang menguras banyak energi serta dapat menghambat jalannya pembangunan nasional.

Strategi alternatif merupakan salah satu metoda yang perlu mendapat kesempatan untuk diterapkan dalam menanggulangi perkembangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Melalui pemberdayaan masyarakat yang berpartisipasi langsung dan mendapat dukungan dari aparat pemerintah maupun lingkungan maka akan mampu menjadikan perubahan sosial yang berkembang kearah aksi sosial guna mengikis perkembangan radikalisme dan terorisme.

Perkembangan Radikalisme dan Terorisme

Sejak pertengahan tahun 1990 terorisme telah mengalami perkembangan dimana telah membuat bentuk terorisme baru yang melibatkan berbagai actor, motivasi, tujuan, taktik dan aksi dibanding dengan konsep terorisme yang lama. Adanya terorisme dalam bentuk baru maka diperlukan bentuk penanganan baru pula yang tentunya harus lebih efektif dan dapat diimplementasikan. Seseorang dikatakan teroris apabila diketahui sebagai pelaku serangan, akan tetapi apabila orang tersebut didapati sebagai penghianat maka ia tidak disebut teroris. Definisi terorisme yang berbeda-beda mem-

bingungkan penanganan khususnya dalam penetapan hukum pidananya. Sedikitnya ada 212 definisi tentang terorisme yang digunakan di seluruh dunia dimana 90 diantaranya digunakan pemerintah atau institusi lain. Sementara itu Alex P. Schmid dan Albert dalam penelitiannya mendapatkan 109 perbedaan definisi yang mendasar tentang terorisme dan sebanyak 22 elemen dikelompokkan karena kejadiannya.

Terorisme bentuk baru memiliki perbedaan *setting* karakteristik dibanding dengan karakteristik bentuk lama, artinya bahwa kemungkinan pengembangan bentuk terorisme baru sangat besar. Pada tahun 1980 terdapat 2 dari 64 organisasi terorisme dunia yang dapat dikatakan beraliran keagamaan, dan jumlah tersebut berkembang pesat menjadi 25 dari 58 yang beraliran keagamaan pada tahun 1995. Kelompok ini melahirkan pandangan yang tidak kenal kompromi terhadap pandangan dunia karena "tidak sesuai" dengan pemahaman agamanya. Terorisme bentuk baru menghasilkan sistem nilai radikal yang berbeda baik mekanisme legitimasi dan justifikasi termasuk konsep moral dan pandangan tentang dunia.

Perbedaan karakter pada terorisme baru tidak semata pada tujuan politik tetapi pada perusakan nilai sosial serta perbedaan pandangan dan perkembangan keinginan melakukan kejahatan yang berlebihan. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keamanan? serta bagaimana kita menghitung nilai lain yang seimbang dengan nilai keamanan?

Keduanya saling bertentangan dan tidak ada nilai sepeenting nilai keamanan kalau menggunakan ukuran barang. Tidak dipungkiri bahwa kehadiran radikalisme maupun terorisme bukan semata dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, ekspansi ideologi yang menggempur ideologi Pancasila melalui berbagai bentuk dan metoda terkadang tidak disadari bahwa serangan ideologi tersebut sesungguhnya melakukan pergeseran nilai. Timbulnya rasa tidak mau peduli dengan lingkungan indikasi nyata bahwa masyarakat Indonesia sudah terserang nilai asing dan meninggalkan nilai budaya sendiri. Sangat sulit mendapati akan adanya kehidupan gotong royong pada kehidupan sehari-hari di daerah kota, tolong menolong tinggal menjadi slogan pemanis.

Kebebasan dan keamanan menjadi fenomena baru yang mengaburkan pemahaman akan pentingnya nilai keamanan dalam kehidupan. Tuntutan kebebasan yang begitu besar terus menggerus nilai keamanan sehingga semakin kecil nilai keamanan, padahal disaat itulah masuk benih radikal dan teroris dalam satu lingkungan. Memang difahami bahwa keamanan bukanlah satu satunya pendekatan untuk mencapai tujuan akan tetapi sebagai konsekwensinya adalah tidak disadarinya kalau ancaman berada di depan hidung. Dapat dikatakan bahwa ancaman secara drastis akan berkembang sesuai *spectrum* waktu dan degradasi kebiasaan atau saat terjadi penurunan nilai sosial budaya masyarakat. Model dasar terbentuknya radikalisme diawali dengan rasa adanya diskriminasi yang lama kelamaan menjadikan suatu protes, protes yang tidak sampai baik kepada penerima maupun tidak memenuhi harapannya menimbulkan rasa perlawanan. Kalau perlawanan tidak dapat dilakukannya sendiri maka akan mencari kawan bila perlu melakukan mobilisasi yang kemudian melakukan tindakan terror.

Bentuk model dasar yang seder-



hana ini tidak boleh dianggap remeh, oleh karena itu peran pemuka masyarakat, pemuka agama dan tokoh lain sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Motivasi dalam masyarakat akan perkembangan radikalisme dan teroris sangat beragam utamanya bagi mereka yang memandang tidak cukup perspektif melihat masa depan dan dipengaruhi kelompoknya dalam lingkungan sosial dimana ia berada. Pengalaman sejarah juga dapat menarik oknum untuk bermotivasi bergabung pada kelompok radikalisme atau terorisme.

Pengaruh Terhadap Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Pengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sudah sangat nyata bukan hanya penghambat pembangunan belaka akan tetapi sudah merajut pada pengaruh psikologis yang membelah dan memisahkan kerukunan hidup. Kebijakan tentang terorisme yang diambil suatu Negara dapat menjadi boomerang manakala kebijakan tersebut tidak seiring dengan kebijakan internasional, meskipun pandangan dan definisi terorisme itu diartikan berbeda. Pengucilan suatu Negara yang tidak mendukung kebijakan mengatasi terorisme secara internasional menjadi momok yang terpaksa dipertimbangkan sebelum mengeluarkan kebijakan.

Donasi internasional akan mengalir kepada negara yang memiliki kebijakan tentang teroris searah dengan kebijakan internasional atau Negara donatur, sementara dibalik itu tidak terbaca maksud dan tujuan panjangnya. Yang pasti dengan alasan teroris menjadi salah satu *tool* atau *entry point* bagi suatu negara untuk masuk ke negara lain, donasi yang diterima terkadang tidak sebanding dengan tindakan intervensi kesuatu negara kalau negara tersebut tidak sejalan. Sikap mengakomodir kepentingan nasional tentunya menjadi utama, oleh karena itu pemecahan da-

lam negeri harus kuat dan solid sehingga tidak membuka peluang intervensi negara lain. Kesulitan mengatasi radikalisme dan terorisme lama kelamaan menjadi tekanan kedalam yang pada akhirnya harus menerima bahkan mengundang pihak lain untuk ikut bermain. Masuknya pihak lain secara tidak langsung menguak kedaulatan sendiri dan menggeser nilai serta budaya yang ada kearah kepentingan nilai asing. Terbaik adalah mengatasi sendiri atas munculnya radikalisme yang lahir dari sistim nilai budaya Indonesia, artinya hanya akan lebih cocok solusinya apabila pendekatan yang dilakukan dengan budaya dan nilai sosial bangsa Indonesia.

Krisis nilai di tengah masyarakat saat ini harus menjadi tanggung jawab kita semua dalam restorasinya, pembiaran akan membuka dan menyuburkan benih radikalisme dan terorisme di Indonesia. Mengatasi terjadinya krisis nilai yang sudah berlangsung cukup lama memerlukan konsepsi, strategi dan upaya nyata secara terukur melibatkan berbagai komponen bangsa. Daya tangkal tidak akan tercipta apabila krisis nilai sebagai fondasi ideologi tidak diperbaiki terlebih dulu, justru serangan ideologi asing bermaksud agar tidak terbentuknya daya tangkal dan memberi keleluasaan ideologinya berkembang. Pengaruh perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat ikut membentuk corak berfikir dan pola tindak terutama dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk-bentuk perubahan nilai yang ditampilkan masyarakat mengindikasikan rendahnya daya tangkal, dapat dikatakan tidak solid meskipun tidak semua nilai bertentangan dengan nilai dasar budaya bangsa. Keberhasilan pengembangan radikalisme dan terorisme dapat meluluhkan pembentukan daya tangkal seiring dengan tawaran kepentingan antara kebebasan dan keamanan sebagaimana diulas diatas. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya

mensejahterakan rakyat sekaligus memberikan rasa aman disamping membuka interaksi yang lebih luas. Namun dengan terganggunya keamanan maka usaha mensejahterakan masyarakat dapat terganggu yang pada akhirnya menjadi penghambat pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa radikalisme dan terorisme tidak boleh diberi ruang dalam pelaksanaan pembangunan nasional, artinya harus diatasi secara bersama sebagai rasa tanggung jawab selaku warga negara.

Pandangan tentang jihad yang kurang tepat maupun motivasi lain sebagai penyebabnya perlu dipublikasikan sehingga cara cara itu diketahui masyarakat guna memudahkan menghindarinya. Banyak contoh seperti munculnya motivasi akibat tekanan kawan atau keluarga, balas dendam karena perlakuan polisi, penghilangan status sosial, karena hubungan, kemiskinan, dongkol terhadap koruptor yang tidak diatasi dan masalah uang yang perlu dibebaskan termasuk pendekatan hukum dan sosialnya.

Strategi Alternatif Melalui Pendekatan Sosial

Penanganan dengan pendekatan keamanan dan hukum tetap dilaksanakan bahkan ditingkatkan, sementara strategi *alternatif* yang ditawarkan adalah penanganan dengan pendekatan sosial. Pada tataran kehidupan masyarakat dikembangkan kembali penguatan lingkungan sosial masyarakat, dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai dengan Kecamatan yang diperkuat oleh aparat territorial dan kamtibmas. Strategi tersebut menutup gerakan perluasan radikalisme sekaligus terorisme namun titik berat pendekatan adalah sosial, artinya masyarakat secara persuasif dihimbau akan pentingnya mengelola nilai-nilai budaya bangsa yaitu gotong royong serta saling mengenal sesama di lingkungannya. Faham hidup sendiri-sendiri sebagaimana faham yang berkembang

dan melanda masyarakat Indonesia saat ini telah merusak sendi kehidupan, mendorong kearah kehidupan yang memeningkan diri atau keluarga sendiri secara ego.

Menggalakkan kembali pelaksanaan pos kamling di lingkungan kecil dengan demikian akan mengetahui keluar masuknya warga dan dengan cepat dapat mengidentifikasi atau kehadiran warga baru yang tidak dikenal. Keaktifan Ketua RT dalam memantau warga melalui kegiatan maupun anjungsana akan membuka tabir adanya upaya tersembunyi di lingkungannya. Pada setiap kesempatan terus dilakukan sosialisasi akan bahaya dan dampak terhadap kehadiran radikalisme dan terorisme sehingga secara perorangan dalam lingkungan kecil sudah dapat membentuk bumper penolakan dan perlawanan kehadiran imbro radikalisme maupun terorisme. Semua kegiatan tentunya perlu mendapat dukungan pemerintah terutama political will yang kuat secara langsung atau tidak langsung menekan pejabat untuk ikut mendukung kebijakan.

Selama ini publikasi ancaman radikalisme dan terorisme dilakukan tidak secara nasional terutama yang menyangkut bagaimana kebijakan dan tindakan hukum yang harus dilakukan masyarakat dalam keterlibatannya menangani radikalisme dan terorisme. Pemberitaan kegiatan lebih banyak dibanding dengan bagaimana menangani dan bertindak apabila menghadapi atau menemui kader atau anggota teroris misalnya termasuk keberhasilan yang dapat dicontoh masyarakat lain. Penanaman nilai nilai non kekerasan menjadi salah satu pertimbangan, sehingga tidak melahirkan rasa balas dendam karena dipermalukan atau bahkan menjadi korban kekerasan. Budaya kental Indonesia yang terlupakan adalah rasa malu, suatu keluarga yang sudah merasa malu karena diperlakukan tidak fair dapat bertindak secara menerus dengan tidak menghitung risiko yang harus dihadapi. Kepuasan melakukan

pembalasan meskipun terkadang salah sasaran menjadi fokus penguangan mengatasi rasa malu, kalau salah satu nilai budaya semacam itu dilupakan maka akan sulit mengeliminasi secara tuntas berkembangnya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Strategi deradikalisasi kepada kelompok simpatisan maupun pendukung serta militant militan intinya sebagaimana yang telah dilakukan selama ini perlu didampingi dengan penerapan pendekatan budaya.

Publikasi adanya penangkapan radikalisme maupun teroris dibarengi dengan tindakan hukum yang ditawarkan, bukan dipertontonkan akan pencidukan dan pembeberan trah keluarga yang bisa jadi sifatnya oknum perorangan. Pembinaan dari kalangan rohawiawan dilibatkan pada saat penahanan, melakukan rehabilitasi dan sosialisasi pemaahan nilai kehidupan berlangsung secara menerus.

Penutup

Penanganan melalui pendekatan keamanan dan hukum serta pendekatan sosial juga perlu dievaluasi, dengan menetapkan terlebih dahulu parameternya, sehingga dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dapat dilakukan perhitungan mendekati kebenaran. Strategi alternatif yang diterapkan dibatasi waktu disesuaikan dengan ke-

giatan sehingga masih mendapatkan *exit strategi* apabila dalam penerapan strategi alternatif dianggap kurang berhasil, dengan demikian tidak terjebak pada jalan yang sama terutama dalam menghadapi stankasi.

Keterlibatan semua komponen menjadi keharusan sehingga dapat berperan dan berpartisipasi dalam mengurangi dan mencegah timbulnya embrio radikalisme dan terorisme di lingkungan sekitarnya. Pendekatan persuasif sebagaimana nilai budaya dalam merangkul keluarga akan sangat berarti dan menyentuh psikologis pelaku dan keluarganya. Pemutusan rasa dendam pribadi dan keluarga serta sejarahnya akan dapat mengurangi kelompok radikal dan terorisme bahkan menekan anasir baru yang mungkin akan timbul.

Strategi alternatif sesuai dengan nilai budaya bangsa akan lebih berhasil pencapaiannya dibanding penerapan gaya asing yang umum dilakukan secara internasional. Pendekatan humanis dan kekeluargaan akan membawa keberhasilan karena tidak menyakitkan dan menarik pelaku atau calon pelaku mendekat kembali kearah kehidupan yang benar. Menarik kemauan dan menciptakan kapasitas menerima serta dapat mengolah informasi yang menjadi hambatan pokok dalam melakukan pendekatan.



ISIS Sebagai Ancaman, Solusi Mengatasinya

Sidney Jones, Direktur, Institute For Policy Analysis of Conflict (IPAC)

DENGAN begitu banyak berita tentang ISIS di Asia Tenggara, patut ditanya sampai berapa jauh Indonesia harus khawatir tentang ancaman dari kelompok ekstremis ini. Ada dua jenis ancaman dari aksi terorisme atau yang biasanya disebut amaliyah, dan dari ideologi yang melihat Islam sebagai “agama pedang, bukan agama perdamaian” dan menghimbau penganutnya untuk membunuh orang-orang yang dicap kafir karena tidak setuju dengan ajaran mereka. Yang kedua mungkin saja lebih bahaya dari yang pertama dan jauh lebih sulit untuk melawan. Apa seharusnya dilakukan Pemerintah Presiden Jokowi?

Terorisme Dihadapi Dengan Penegakan Hukum, Bukan dengan Perang

Belakangan ini, sering didengar bahwa polisi gagal melawan terorisme karena Santoso di Poso masih buron dan banyak WNI keluar negeri untuk bergabung dengan ISIS. Tapi kalau ada yang gagal, bukan Densus 88 tapi usaha preventif yg sebetulnya seharusnya tugas pemerintah seluruhnya. Lihat faktanya.

Sejak pemboman Hotel Marriott dan Ritz-Carlton tahun 2009 dan kematian otaknya, Noordin Top, kapasitas kelompok teroris menurun secara drastis. Jemaah Islamiyah (JI), organisasi dibelakang Bom Bali I, sejak tahun 2007 tidak melakukan operasi jihad lagi di Indonesia, walaupun organisasi tetap eksis. Setelah pembongkaran kamp latihan teroris di Jantho, Aceh pada awal 2010, lebih dari seratus orang ditangkap dan puluhan tewas tertembak dalam operasi Densus 88. Akibatnya tiga: gerakan

ekstremis memecah menjadi banyak sel-sel kecil; banyak teroris buron lari ke tempat lain dan mulai merekrut orang baru; dan sasaran utama berubah dari orang asing dan Kristen menjadi polisi sendiri – untuk balas dendam dan sekaligus mendapat senjata.

Dari 2010 sampai sekarang ini, tidak ada satu bom teroris yg berhasil menewaskan korban kecuali pembom sendiri, dan metode yang paling disukai adalah “drive-by shootings” (penembakan sambil jalan dengan motor). Jumlah korban tewas dalam aksi terorisme tetap rendah, dibandingkan dengan negara tetangga Thailand dan Filipina: pada 2012, totalnya 9 orang, 8 diantaranya polisi; pada tahun 2013, 3 orang, semuanya polisi; pada 2014, 4 orang, 3 diantaranya polisi. Jadi terorisme di Indonesia sekarang ini bisa dicap *low-tech, low capacity* dan *low casualty*. Ada banyak alasan kenapa jumlah korban begitu rendah, antara lain bahwa dukungan dari masyarakat untuk kekerasan sama sekali tidak ada tapi juga bahwa intel Densus 88 lumayan baik sehingga banyak tokoh ekstremis berhasil ditangkap.

Di Poso, Hendaknya Polisi Berkoordinasi Dengan TNI, Tetapi Untuk Tugas Tertentu dan Waktu Terbatas, dan Dibawah Komando Densus 88.

Kalau Santoso di Poso, soal lain lagi. Dia sudah berhasil membesarkan citranya melalui media sosial sehingga dianggapi teroris kelas kakap, padahal dia adalah orang tanpa banyak ketrampilan, pengetahuan agama atau strategi. Berharap bahwa sejak 2011, dia berhasil me-



latihankan mungkin lebih dari 100 orang dari Jawa, Sumatera, Sulawesi dan NTB secara bertahap yang kemudian pulang ke kampung masing-masing dengan niat melakukan amaliyah, dan lebih dari 20 polisi sudah tewas atas tangan alumni Poso ini, di Poso, Palu, Bima, Jawa Tengah dan Jabotabek.

Banyak alumni ini juga berbai'at kepada ISIS dan ada puluhan yg sudah bergabung dengan tentara ISIS di Suriah dan Iraq. Setelah operasi polisi dan TNI bulan Januari-Juni lalu, yang tinggal dari kelompok bersenjata – yang menamakan diri Mujahidin Indonesia Timur (MIT) -- mungkin kurang dari 20 orang. Kenapa polisi tidak berhasil menangkap Santoso bukan karena mereka ingin supaya dana untuk melawan terorisme terus mengalir – bagaimana bisa kalau perwira mereka yang menjadi target? melainkan karena Densus 88 tidak punya kapasitas beroperasi di hutan. Hampir semua latihan mereka dapat sampai sekarang diarahkan ke terorisme di daerah perkotaan. Jadi, seharusnya polisi minta bantuan dari TNI untuk suatu operasi terbatas, dibawah komando polisi. Tapi persaingan antara polisi dan TNI justru memburuk setelah Jokowi menjadi presiden, dengan per-



sepsi TNI bahwa polisi menjadi arogan dan tidak bisa dikendali lagi, dan persepsi polisi bahwa mereka disingkirkan dari *policy-making* dan TNI sedang memanfaatkan peluang politik untuk membesarkan pengaruhnya.

Ancaman Dari WNI yang bergabung dengan ISIS memang ada, tetapi harus dimengerti sifatnya dari ancaman itu.

Sampai sekarang ini, mungkin sekitar 300 warga Indonesia sudah bergabung dengan ISIS sebagai tentara atau pendukung aktif, jika angka yang lebih besar yang sering didengar (500 keatas), tidak jelas siapa yang dihitung. Benar bahwa banyak orang bolak-balik ke Suriah dengan misi kemanusiaan yang mungkin juga mendukung para milisi disana, tapi tidak berarti bahwa mereka semua termasuk mujahidin, apalagi memiliki potensi jadi teroris.

Faktanya, perang di Suriah dan peranan WNI beda jauh dari Afghanistan pada tahun 80-an dan 90-an. Waktu pertama kali WNI berangkat ke Perbatasan Pakistan-Afghanistan untuk ikut program latihan militer yang nota bene mulai setelah peristiwa Tanjung Priok dan pada saat isu azas

tunggal mulai hangat, mereka berniat mendapat keterampilan untuk melawan Pemerintah Soeharto, bukan untuk bergabung dengan Tentara Afghan. Malah sebagian besar dilarang oleh komandan Mujahidin Afghan untuk ikut berperang. Mereka didorong ke sana karena *political repression* di Indonesia.

Di Suriah, sebagian besar dari WNI disana tidak berniat pulang ke tanah air. Mereka ingin berperang sebagai pasukan *Daulah Islamiyah* dan ikutserta dalam *al-Malahamah al-Kubra*, pertempuran besar pada akhir zaman yang menurut beberapa hadist akan terjadi di Syam. Banyak diantara mereka sudah meninggal, lebih dari 40 sejak 1 JUNI 2015 saja. Ada yg jatuh sambil berperang melawan pasukan Kurdi; ada yang kena pemboman udara dari koalisi anti-ISIS; ada segelintir yang menjadi pembom bunuh diri.

Bisa saja perkembangan politik berubah sehingga ada yang terpaksa kembali ke tanah air, tapi tipis sekali kemungkinan bahwa mereka akan kembali pada waktu yang sama, jadi tidak mungkin bahwa tiba-tiba, ada ratusan alumni Suriah yang akan pulang dan melaku-

kukan aksi teror. Pasti ada banyak yang tidak tertarik oleh proyek amaliah di Indonesia sama sekali, dan sebaiknya mereka tidak diperlakukan secara otomatis sebagai penjahat. Tapi Pemerintah Jokowi harus siap bahwa diantara yang akan pulang, ada beberapa orang yang bisa menjadi pemimpin karismatik dari kelompok ekstremis, dengan legitimasi dari pengalaman bertempur di Suriah, keterampilan hebat, komitmen ideologi yang mendalam dan jaringan internasional yang luas. Yang diperlukan adalah sistem pemantauan atau pengawasan supaya bisa mengerti dengan baik siapa yang pulang, kemana mereka menetap dan kegiatan mereka apa. Dengan kata lain, yang diperlukan antara lain adalah sistem intelijen yang kuat tapi juga program reintegrasi yang sudah disiapkan dengan bantuan bukan dari kelompok "moderat" tapi dari orang yang punya kredibilitas dalam kelompok ini dan keluarganya.

Program Melawan Ajaran ISIS Sangat Diperlukan Tetapi Harus Mengerti "Pasar" dan "Konsumen". Sehingga Ajaran Menjadi Efektif Untuk Dapat Melawan ISIS

Ajaran ISIS yang meng-*glorify* keke-

Net

rasan dan bersifat *takfiri* jelas sudah beredar di masyarakat. Tidak ada gunanya memblokir situs ekstrim, karena anak SMP dengan gampang bisa tahu bagaimana membuka melalui *situs proxy*. Apalagi, banyak blog dan situs pribadi yang mengarsipkan semua propaganda ISIS dalam bahasa Indonesia.

Seharusnya Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) mengangkat tim ahli untuk mengerti konsumen ajaran ISIS, misalnya majalahnya bulanan ISIS yang berjudul *Dabiq*, siapa, dari kalangan apa, cara mereka mengakses bagaimana dan seterusnya. Hal yang sama seharusnya dilakukan untuk ajaran tokoh pro-ISIS yang paling dihormati oleh kelompok ekstrim di Indonesia, yaitu Aman Abdurrahman, yang sekarang ditahan di Nusakambangan. Justru Aman, bukan Abu Bakar Ba'asyir, yang menjadi ulama yang paling populer diantara kelompok ISIS di Indonesia, dan pengikut dia yang sering bertanggung jawab atas mengatur perjalanan ke Suriah. Sebelum ajaran bisa di-*counter*, harus betul-betul mengerti isinya apa. Misalnya mahasiswa dan pelajar dihimbau begini di *Dabiq*:

Adapun kepada pelajar Muslim yang juga menggunakan alasan-alasan untuk terus meninggalkan kewajiban hijrah dan jihad, mereka harus tahu bahwa hijrah lebih *farḍhu* dan mendesak daripada menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar yang sementara itu mereka dapat terkena keraguan-keraguan dan hawa nafsu yang pada akhirnya akan menghancurkan agama mereka.

Tentang membakar hidup pilot Jordania, Dabiq menulis:

Daulah Islam tidak hanya mengikuti jejak Rasulullah (SAW) dalam sikap keras kepada orang-orang kafir, tetapi juga mencontoh teladan para shahabatnya yang adil (*radhiyyallahu 'anhum*) dengan menghukum dengan api sebagai pembalasan, menteror para murtaddin dan

memberi contoh kepada mereka.

Tentang membudakan kelompok minoritas:

Keluarga Yazidi yang telah dijadikan budak kemudian dijualbelikan oleh tentara Daulah Islamiyah sebagaimana dahulu orang-orang musyrik dijual belikan oleh para sahabat (*radhiyyallahu anhum*). (*Dabiq* 3)

Dan tentang nasionalisme:

Nasionalisme, patriotisme, kesukuan, dan revolusionisme tidak pernah menjadi penggerak di hati *muwahhid* mujahid. Baginya kehilangan lidahnya lebih dia cintai daripada dengan rela meneriakkan slogan nasionalisme jahiliah. Bahkan sebaliknya, bendera-bendera nasionalisme berada di bawah kakinya, karena bendera-bendera tersebut bertentangan dengan tauhid dan syari'at serta menampakkan ideologi kekufuran dan kesyirikan. (*Dabiq* 8)

Kutipan ini hanya sebagian dari ajaran yang ekstrim yang sudah disebarkan jauh diluar kelompok teroris sendiri. Kalau baru-baru ini ada ajaran radikal yang masuk buku agama yang dipakai di Jombang, Basis NU di Jatim, bisa dimengerti betapa gampang ajaran ini bisa ditanam.

Baru-baru ini ada fatwa menarik dari Kongres MUI ke-5 tentang kriteria pengkafiran yang mungkin dibuat untuk meng-*counter* ajaran *takfiri* ala ISIS. Dari suatu segi, ada manfaatnya, tapi dengan gampang, ulama pro-ISIS seperti Aman Abdurrahman pasti akan menolak dengan argumentasi yang terinci, dan diantara kelompok tertentu, penolakan dia akan lebih didengar dari fatwa MUI. Tanpa pendekatan yang lebih terfokus, dampak yang diinginkan mungkin tidak akan tercapai. (Ada bahaya juga bahwa fatwa ini bisa disalahgunakan terhadap kelompok minoritas.)

Jangan Melihat Masalah ISIS Sebagai Sesuatu Yang Terisolir Dari

Masalah Ekstremism Yang Lebih Luas

At first glance, ISIS kelihatannya tidak ada hubungan apapun dengan organisasi seperti FPI. FPI, walaupun sering pakai kekerasan, sampai sekarang tidak bersifat teroris, malah Habib Rizieq pernah dipakai oleh polisi untuk berceramah di daerah yang dianggap rawan terorisme, dalam teori bahwa kampanye anti-maksiat gaya FPI lebih baik daripada terorisme gaya JI.

Tapi kenyataan hari ini adalah bahwa di banyak daerah di Indonesia, para anggota FPI sudah tertarik oleh ISIS dan ada yang menyeberang, misalnya di Lamongan dan Makassar. Di daerah Bekasi, ada juga anggota *Hizbut Tahrir Indonesia*, yang pada umumnya punya visa *khilafah* yang jauh berbeda dari ISIS, yang juga menyeberang. Justru karena ISIS menguasai wilayah dan berhasil melawan baik negara Barat maupun negara yang dipimpin orang Syi'ah, banyak orang yang dulu tidak tertarik oleh kelompok teroris macam JI atau JAT sudah tertarik oleh Daulah Islamiyah yang baru. Berarti kemungkinan besar bahwa ajaran ISIS bisa meluas – dan pemerintah Jokowi rupanya belum punya strategi apapun untuk, misalnya memperbaiki pengawasan guru agama dalam SMP dan SMA negeri.

Kesimpulan

Risiko terorisme masih ada di Indonesia dan mungkin akan meningkat dengan WNI bergabung dengan ISIS. Tapi tidak berarti bahwa sudah waktunya untuk serahkan tugas anti-teror kepada TNI, Densus 88 sudah berhasil memecah-belahkan jaringan teror disini sampai aksi jihad menurun dan jumlah korban tetap rendah.

Yang penting sekarang ini adalah untuk mengerti dan melawan ancaman dari ajaran dari ideologi ISIS, tantangan ini jauh lebih berat dan harus melibatkan pemerintah seluruhnya.

Mengurangi Dan Deteksi Radikalisme Dengan Teknologi Pengolahan BIG DATA

Oleh Dr. Poempida Hidayatulloh,
Dosen Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana



Net

BIG Data adalah teknologi data *processing dan analytics* yang cukup komplit untuk data yang terstruktur, semi terstruktur bahkan juga non-terstruktur dalam jumlah yang besar dan kecepatan yang tinggi.

Arsitektur *Big Data* mendukung skalabilitas horizontal yang secara praktis hampir tidak terlimitasi dalam jumlah *processor, memory dan storage*. Bayangkan jika anda memiliki sistem komputasi dengan 8000 *nodes cluster komoditi hardware* dimana tiap node memiliki *2x cpu 8 core, 32 Gigabytes memory dan 16 Terrabytes disk*. Relatif murah tetapi luar biasa *powerful!* Teknologi inilah yang dipakai oleh *yahoo, facebook, flickr, twitter*, dan lain-lain. Permasalahan yang umum ditemui adalah programming aplikasi agar bisa *running* dengan baik diatas teknologi ini, yang oleh *Apache* dinamakan *Hadoop Map Reduce. Framework* ini cukup membingungkan dan menyulitkan bagi banyak *programmer* belum lagi bila harus digunakan untuk menyelesaikan problem

bisnis yang kompleks.

Radikalisme dan Penangkalannya

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbaei pada tahun 2012 menyebutkan "Ideologi radikalisme ini akar dari terorisme, pemahaman yang sempit mengenai sebuah keyakinan, agama, menciptakan konflik sehingga melakukan teror," Berdasarkan pernyataan ini radikalisme itu terkait dengan keyakinan agama sehingga ada penganut agama yang sanggup melakukan teror atas keyakinannya. Pelaku dapat melakukan teror ketika dia sudah yakin akan adanya perintah agama dan kepercayaannya untuk tindakan yang pelaku anggap suci demi agama. Pemahaman rasa yakin akan adanya perintah agama adalah sebuah proses berpikir atas interpretasi ajaran agama bukan pengertian secara langsung dari ajaran yang tertulis dalam ajaran agama.

Proses pemikiran dapat terjadi pada individu atau sekelompok orang yang belajar atau berinteraksi dengan pelaku lain yang sudah lebih awal melakukan telaah ajaran agama. Proses pemikiran ini biasanya adalah proses mencari identitas diri untuk mendefinisikan apa arti kehidupannya di dunia ini. Proses mencari jati diri adalah dengan menjadikan dirinya anggota kelompok pengkaji ajaran agama atau dengan secara aktif mengakses tulisan-tulisan dari pemikir yang dikenal pendukung paham radikalisme, baik melalui dunia maya atau melalui buku-buku yang resmi terbit. Ada kemungkinan dari beberapa individu yang telah berinteraksi secara ak-

tif dengan kelompok ataupun dengan bacaan terkait radikalisme dapat mempunyai pemahaman taktik kegiatan yang bersifat kekerasan untuk memperjuangkan tujuan kehidupannya.

Konsep radikalisme disini dapat diartikan ada bacaan-bacaan tertentu di dunia maya yang dapat mendorong seorang bersifat radikal dan ada sekelompok kumpulan orang yang mengajak individu untuk berkumpul untuk mengkaji pemahaman agama yang bersifat radikal. Yang menjadi pertanyaan ketika ada permasalahan mendasar seperti adanya bacaan dan adanya sekelompok orang yang aktif menyebarkan paham radikalism: "Apakah ada teknologi yang mampu mengurangi dan mendeteksi Radikalisme"? Banyak negara-negara seperti tertulis dalam laporan International Peace Institute <http://www.ipinst.org> pada tahun 2013 yang berjudul "*New Technology and the Prevention of Violence and Conflict*" menerapkan pengolahan data trafik telepon dan internet untuk mencegah terjadinya teror dan kekerasan. Rasio jumlah *handphone* yang beredar di beberapa negara sudah melebihi jumlah penduduk, dan hal ini pun akan terjadi, dimana jumlah nomor telepon seluler di Indonesia sudah mencapai 250 juta atau bahkan lebih. Analisa data yang begitu besar tentunya sangat memakan banyak sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya komputer salah satu yang bisa dijadikan acuan menganalisa detail dari semua percakapan dan akses internet untuk kelompok yang potensi bersikap radikal. Proses

analisa ini saat ini dikenal dengan Teknologi Big Data, atau bagaimana mendapat informasi yang relevan dari data yang data di dunia maya. *Big Data* dapat membantu proses “*Early Warning*” ketika terdeteksi anomali dari percakapan dan penggunaan internet dan juga dapat membantu “*Real-Time Awareness*” ketika ada prediksi aktifitas – aktifitas dari individu secara intensif. Di Indonesia pemantauan ini akan menjadi efektif jika pengolahan data telepon dan internet dilakukan secara terpusat sehingga analisa tulisan-tulisan dapat dilakukan dengan sumber daya perangkat yang optimal. Pengolahan *big data* memerlukan teknologi *database* yang cepat dan akurat dengan komputer yang tersebar banyak. *Big Data* dilengkapi dengan semantik dan analitik dapat memberikan *output*: peta keluarga dan teman dari pengguna secara rinci dan juga untuk analisa internet kita bisa mendapatkan secara detail web tertentu, semua pengakses web dengan peta keluarga dan peta organisasinya.

Kebutuhan *Big Data* di Indonesia

Kebutuhan *big data* sudah diperlukan saat ini untuk keamanan negara

dan juga untuk potensi penanganan layanan kesehatan nasional atau jaminan sosial masyarakat. Dari sisi keamanan negara, dengan meningkatnya penggunaan sosial media secara terbuka, baik oleh pribadi bahkan oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah harus bisamenjamin tidak ada kebocoran rahasia negara, akibat penggunaan media sosial ini.

Untuk peningkatan layanan kesehatan dan jaminan sosial, diperlukan pertukaran data dari semua WNI yang secara undang-undang akan terjamin layanan kesehatannya. Jaminan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang baik, hanya bisa terlaksana kalau pengelolaan data dari semua *stake holder* (Masyarakat, Rumah Sakti, BPJS dan semua pihak) dapat dikelola dengan cepat dan tepat. “Hanya dengan teknologi BIG DATA layanan di atas bisa terjamin ...” Namun tahukah kita bahwa satu perusahaan anak bangsa telah melakukan riset selama lebih dari 4 tahun untuk membuat perangkat yang menjembatani antara kompleksitas *Map Reduce* dan bisnis proses yang harus diimplementasikan. Tanpa melakukan atau hanya dengan minimal pro-

gramming serta *click and drag* serta pembuatan *workflow* yang sangat mudah semua ini bisa diselesaikan dengan cepat, untuk proses *non real time*, *real time* bahkan *in memory*.

Alhasil perusahaan-perusahaan telekomunikasi lokal seperti Telkomsel, Indosat telah memanfaatkan teknologi ini selama bertahun-tahun untuk aplikasi data *processing* jumlah besar dalam waktu yg diharapkan, skalabilitas, *cost efficiency*, ketersediaan yang sangat baik. *Cluster* terbesar yang digunakan hampir mencapai *100 nodes* saat ini dan masih berkembang terus. Piranti lunak tersebut adalah HGrid untuk *non real time processing*, SGrid untuk *real time processing* dan *event correlation* serta HSpark untuk *in memory processing*. Saat ini perusahaan lokal Indonesia tersebut sudah bisa menangani masalah ini dengan benar dan tidak tergantung kepada brand internasional yang ada. Perusahaan lokal ini sudah menangani *BIG DATA* khusus untuk pengolahan data-data pelanggan di bidang perbankan dan telekomunikasi. Data-data pelanggan diolah untuk kebutuhan pengembangan produk atau layanan bukan untuk pelanggaran privasi pribadi pelanggan.



Merespon Radikalisme Global

Yon Machmudi, Ph.D

GLOBALISASI telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Perkembangan global saat ini tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga negatif. Di samping memberikan kesejahteraan dan kemudahan hidup manusia ternyata fenomena globalisasi ini juga pada satu sisi telah membawa ancaman budaya, identitas dan otoritas. Pihak-pihak yang terpinggirkan oleh kekuatan global yang mengancamnya biasanya berusaha untuk meresponnya dengan berbagai cara. Ada yang menghadapinya dengan cara-cara damai dan akomodatif tetapi ada juga yang melakukan perlawanan dengan cara-cara kekerasan. Kecenderungan radikal inilah sebenarnya yang mengancam dan mengganggu stabilitas sebuah negara bangsa (*nation state*).

Setiap kelompok dapat saja terpapar dalam aksi radikalisme dalam merespon sebuah perubahan apabila tidak mampu menghadapi secara konstruktif. Artinya, radikalisme tidak menjadi monopoli kelompok agama tertentu tetapi merupakan perkembangan umum. Tergantung aspek-aspek apa saja dari kehidupan manusia itu yang terkena dampak dari perubahan akibat dari arus globalisasi ini. Apabila tidak ada mekanisme budaya yang *solid* dalam menghadapi perubahan itu maka respon secara radikal dengan menggunakan cara-cara kekerasan bisa saja terjadi. Aktifitas yang rentan terhadap penggunaan kekerasan inilah yang perlu mendapat perhatian. Respon terhadap radikalisme global harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek perkembangan globalisasi itu sendiri.

Fundamentalisme VS Radikalisme

Emmanuel Sivan (1985) dalam bukunya



berjudul *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics* menjelaskan bahwa radikalisme adalah suatu meyakini atau mengikuti prinsip-prinsip yang mendorong pada perubahan politik, ekonomi dan sosial secara drastis (radikal). Sikap radikal ini biasanya berdampak pada perubahan yang menimbulkan konflik dan berpotensi pada cara kekerasan. Kunci dari radikalisme adalah sikap yang tidak mengenal kompromi dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Karenanya, disamping tidak ada kompromi sebagaimana yang digambarkan oleh Mark Juergenmeyer (2001) kelompok radikal juga dicirikan adanya penolakan aturan yang ditetapkan oleh negara maupun budaya lokal. Kelompok ini menganggap dirinya yang paling benar sehingga pihak lain harus mengikutinya pemikiran atau keyakinan yang dianutnya.

Radikalisme bukan merupakan monopoli agama, aliran maupun sekte tertentu. Dalam kelompok agama radikalisme bisa menjangkiti siapa saja. Radikalisme pernah terjadi pada kelompok Sunni maupun Syiah demikian juga agama-agama yang lain. Beberapa aksi radikalisme dan terorisme yang melibatkan penganut agama-agama yang berbeda dilakukan seperti Hindu garis keras di India (*RSS-Rashtriya Swayamsevak Sangh*), kelompok ekstrim

Budha yang dikenal sebagai Gerakan 969 dipimpin biksu kontroversial Ashin Wirathu dan kelompok Yahudi ekstrim di Israel. Demikian pula beberapa kelompok non agama juga melakukan tindakan radikalisme dan terorisme yang tidak kalah menakutkan dampaknya. Ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa antara lain pengeboman Oklahoma April 1995 yang dilakukan oleh Timothy McVeigh, Kelompok Rasis Ekstrim di Amerika Serikat (Ku Klu Klan), berbagai aksi terorisme oleh pendudukan Israel di Palestina, Macan Tamil di Srilangka dan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sekuler radikal maupun ultra nasionalis.

Namun demikian gejolak dan konflik politik di Timur Tengah dan dunia Islam lainnya tidak dapat dipungkiri telah melahirkan berbagai varian radikalisme Islam. Radikalisme ini kemudian menyebar secara global mengikuti tren globalisasi itu sendiri sehingga mengancam tatanan dunia secara umum. Fenomena radikalisme tidak dapat dilepaskan dari maraknya gerakan fundamentalisme agama di berbagai negara. Fundamentalisme ini terutama yang ada di dunia Islam lahir dari ketidakpuasan kelompok agama terhadap hegemoni Barat. Kaum fundamentalis kemudian menjadikan Islam sebagai ideologi dan sumber perlawanan baik terhadap Barat maupun rezim yang otoriter. Karenanya kondisi Timur Tengah yang mengalami defisit demokrasi berkontribusi besar dalam menyuburkan kelompok keagamaan beraliran keras. Tentu saja fundamentalisme itu tidak identik dengan radikalisme karena kaum fundamentalis ada yang bersifat moderat dan radikal. Sama-sama berusaha merespon perubahan global dengan mendasarkan pada ajaran-ajaran agama secara fundamental tetapi berbeda dalam cara-cara yang digunakan. Ada yang damai dan ada yang

penuh dengan kekerasan.

Johannes J.G. Jansen (1997) dalam bukunya *The Dual Nature of Islamic Fundamentalism* mendefinisikan fundamentalisme sebagai “meyakini atau mengikuti pandangan yang menjadikan agama sebagai ideologi politik.” Dalam literatur pemikiran politik Islam, fundamentalisme sering disebut dengan istilah “Islamisme maupun Islam Politik.” Tentu kecenderungan Islam radikal akan berbeda dengan fundamentalisme Islam walaupun sering gerakan Islam radikal berawal dari pemikiran Islam fundamentalis. Perbedaannya terletak pada cara-cara kekerasan yang biasa digunakan oleh kelompok Islam radikal dalam menjalankan aksi-aksinya. Greg Fealy (2004) mencoba memberikan karakteristik kelompok Islam radikal dengan menyebutkan ciri-cirinya antara lain; (1) Islam harus diterapkan secara “sempurna” dan literal seperti apa yang ada di dalam *Qur’an* dan *Hadits* tanpa ada kompromi, (2) sangat reaktif baik dalam bentuk bahasa, gagasan dan kekerasan fisik terhadap apa saja yang mereka anggap sekuler, materialistik dan kelompok-kelompok menyimpang, (3) menentang penguasa sekuler dan “status quo” dan menginginkan untuk merubahnya dengan Islam (Negara Islam). Suatu kelompok itu bisa disebut radikal atau tidak disamping ciri-ciri di atas juga dapat dilihat dari sejauh mana

kelompok itu bersifat akomodatif terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam sebuah kerangka berpikir yang mengedepankan adanya kesamaan, penghargaan dan toleransi (Bassam Tibi, 1998).

Strategi Pencegahan Radikalisme Global

Radikalisme bukanlah lahir di ruang hampa. Fenomena ini sangat berkaitan dengan situasi dan kondisi sosial politik munculnya gerakan radikalisme itu sendiri. Karenanya, perlu dirumuskan model penganganan radikalisme maupun terorisme di Indonesia berdasarkan konteks Indonesia. Konteks sosial politik yang berbeda antara Timur Tengah dan Indonesia ini bisa dilihat dari kultur budaya konflik yang sangat akut di Timur Tengah sementara di Indonesia cenderung bersifat akomodatif dan menjauhi konflik. Jika tensi konflik di Timur Tengah yang melibatkan gerakan-gerakan Islam dan penguasa sangatlah tinggi sebaliknya di Indonesia justru menunjukkan hubungan yang harmoni dalam koridor demokrasi. Wajar jika di Timur Tengah, rezim sering disebut *republicarchy* (republik berbalut monarki) dan memiliki legitimasi politik sangat rendah menjadikan setiap gerakan yang mengancam legitimasinya sebagai lawan yang harus disingkirkan. Karenanya, perang melawan radikalisme maupun terorisme bukanlah

perang melawan ideologi maupun kepentingan politik tertentu tetapi harus dipahami sebagai perang melawan kejahatan luar biasa yang mengancam kehidupan manusia secara umum.

Kondisi Indonesia sangat kondusif saat ini sebenarnya menjadikan upaya-upaya pencegahan terhadap gerakan-gerakan radikalisme global ini lebih mudah. Ini karena ada demarkasi yang jelas antara kelompok radikal dan moderat di mana masyarakat Indonesia mulai terbiasa dengan wacana yang benar-benar untuk kebaikan umat ataupun hanya sekedar membonceng mengatasnamakan agama. Indonesia jauh lebih maju dibanding dengan negara-negara Timur Tengah dalam menghadapi ancaman radikalisme. Secara historis Indonesia telah mampu menyelesaikan gejala perlawanan gerakan radikal Darul Islam tahun 1949 misalnya, yang hendak mendirikan negara Islam.

Dalam merespon maraknya gerakan radikalisme global yang berkembang di Timur Tengah (Al-Qaidah, ISIS, maupun Syiah garis keras) langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah sudah pada track yang benar. Sebagai contoh sikap Presiden Jokowi dalam menunjukkan simpati dan dukungannya di depan publik terhadap perjuangan Palestina menjadi salah satu poin penting untuk menjauhkan agenda Palestina menjadi monopoli kelompok radikal global. Demikian pula isu-isu ketidakadilan yang dialami oleh dunia Islam lainnya, seperti Muslim di Rohingya maupun di China, hendaknya juga dapat mengundang sikap negara yang lebih responsif dan dapat berkontribusi menyelesaikannya. Yang paling utama adalah sikap responsive dan proporsional ini dilakukan guna mempersempit ruang gerak dari gerakan-gerakan radikalisme dalam melakukan sabotase terhadap isu-isu keumatan. Persoalan-persoalan dunia Islam hendaknya dapat diakomodasi oleh pemerintah agar kemudian tidak dijadikan sebagai amunisi oleh kelompok radikal.



©EGAH: Warga Kelurahan Karang Berombak memasang Spanduk Anti ISIS



Istimewa

Dr. Widiyanto Pusoko, SIK, SH, M.Si
Peserta PPSA XX 2015

Pancasila Sebagai Kristalisasi Nilai Luhur Mampu Tangkal Radikalisme

sila sebagai ideologi bangsa tidak bersifat kaku karena diambil dari nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa, juga bersifat reformatif, dinamis dan terbuka.

Hal semacam ini dimaksudkan jika Pancasila sendiri senantiasa peka terhadap setiap perkembangan zaman. "Maka, penanaman nilai Pancasila melalui berbagai bentuk edukasi memang harus dilakukan secara berjenjang," ujar Widiyanto. Disisi lain, Pancasila juga merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan sumber nilai di Indonesia maka semua nilai yang berkembang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan pedoman pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia.

Dimana Pancasila berisi lima sila hakikatnya terdiri dari lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

RADIKALISME sebagai perubahan secara mendasar secara cepat yang tidak sesuai dengan budaya dari Bangsa Indonesia.

Salah satu upaya yang tepat dapat dilakukan untuk menangkal paham radikalisme berkembang di Indonesia adalah menggaungkan kembali ajaran dari nilai-nilai Pancasila, melalui sekolah-sekolah dan kehidupan sosial di masyarakat.

Pilihan yang diambil karena Panca-



Steven Japutra, M.M.
Peserta PPSA XX 2015

Semua Pihak Bekerjasama Tangkal Radikalisme

mendukung tumbuh kembangnya paham radikalisme dengan berbagai kecanggihan teknologinya yang berasal dari luar.

Eric Schmidt dan Jared Cohen dalam bukunya, *The New Digital Age* (2013), menyebutkan masa depan gerakan terorisme memanfaatkan teknologi informasi sebagai sebuah serangan teror.

Dimana Internet membekali para ekstremis melalui informasi secara leluasa menyebarkan informasi terkait dengan gerakan ideologis mereka.

Mereka kemudian dapat merambah ke mana saja dengan menggunakan *media social* seperti *YouTube*, *Facebook*, *Twitter*, dan lain-lain untuk mempengaruhi anak-anak muda melakukan tindak kekerasan dengan dalih agama seperti yang mereka lakukan. Ambil contoh, saat ISIS yang melansir video-

video mereka ke *YouTube*.

Disisi lain, seperti yang dilansir oleh *Tech in Asia*, jumlah pengguna Internet di Indonesia di tahun 2015 mencapai angka sekitar 72,7 juta orang dan 30 juta pengguna aktif adalah anak muda.

Jika pengguna aktif Internet ini mengkonsumsi konten-konten radikal bernuansa agama, tentu saja dapat dibayangkan betapa akan mereduksi nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme yang ada di Indonesia.

Kecemasan ini perlu diantisipasi dengan serius oleh pemerintah. Bagaimana pemahaman radikalisme semakin mengganggu sikap toleransi dan rasa multikulturalisme yang telah dibangun oleh bangsa kita sejak dulu. Pemerintah harus memiliki definisi yang jelas soal radikalisme itu sendiri.

Sebagai seorang pengusaha saya sangat mengkhawatirkan perkembangan paham radikalisme di Indonesia dewasa ini, mengingat gerakan tersebut tentu saja akan mempengaruhi stabilitas nasional. Dengan terganggunya stabilitas nasional, secara otomatis berdampak pada terganggunya pertumbuhan ekonomi, begitu pula bereskses pada pertumbuhan investasi nasional.

Paham radikalisme sangat berbahaya, ironisnya perkembangan globalisasi turut

WHO: Wabah Mers Di Korsel Tidak Akan Jangkiti Masyarakat

JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan wabah MERS di Korea Selatan sesuatu kasus besar dan rumit, namun demikian tidak ada pertanda penyakit ini menyebar di masyarakat, hal tersebut seperti disampaikan oleh Asisten Dirjen WHO Keiji Fukuda di Seoul, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Fukuda mengatakan hal tersebut menandakan jika tidak ada indikasi bahwa virus penyakit pernapasan yang berasal dari Timur Tengah ini telah bermutasi sehingga lebih mudah menular. "Karena wabah ini besar dan rumit, harus diantisipasi kemungkinan lebih banyak warga yang terjangkit," kata Fukuda.

Diberitakan, virus ini telah menjang-

BAHAYA VIRUS MERS YANG MEMATIKAN

Penularannya Dapat Melalui

Langsung : melalui pernapasan (cangkup) pada saat penderita batuk atau bersin

Tidak Langsung : melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus.

Penyakit gejala MERS-CoV

Batuk Berdahak
Demam
Sakit dada
Neumonia
Pneumonia
Gagal ginjal
Diare (tidak ditemukan di semua kasus)
Lemah

Penularan virus

- Lendir menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan
- Bersin atau batuk ke arah orang yang sedang berada di lingkungan yang berdekatan
- Jagalah kebersihan dan tandanya berhati-hati terhadap barang-barang yang sering dientuh.

Orang-orang yang mudah terinfeksi virus mematikan ini adalah mereka yang melakukan hubungan seksual, seperti orang yang sedang sakit, lesi, anak kecil, orang yang sedang kebalikan dalam perjalanan, dan makan tidak teratur.

Dibansir dari Medical News Today. WHO Badan Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa walaupun mematikan, namun virus ini masih berisiko antar manusia.

Dugaan sementara, virus MERS menyebar melalui unta, (domba)

kiti 138 orang di Korea Selatan dan 14 orang meninggal sejak pertama kali dideteksi diderita oleh seorang pengusaha yang baru kembali dari Timur Tengah pada 20 Mei.

Fukuda merasa optimistis jika langkah-langkah pengendalian yang dilakukan Korea Selatan sudah mulai membuahkan hasil. Sementara itu, seorang pengusaha yang diduga membawa virus MERS ke Korea Selatan setelah tiba mendatangi sejumlah pusat kesehatan karena keluhannya menderita batuk dan demam, tetapi akhirnya dirinya terdiagnosa telah terjangkit MERS. Dan kedatangannyalah disinyalir telah me-

nye-babkan virus itu menjangkiti warga di pusat-pusat kesehatan. "Kebiasaan mendapatkan pengobatan dari fasilitas kesehatan berbeda, yang disebut dengan 'belanja dokter', bisa jadi merupakan faktor penyebarannya," kata Fukuda.

Fukuda menegaskan jika penyebaran penyakit itu hanya terjadi di rumah sakit.

"Saat ini, misi WHO belum menemukan bukti bahwa penyakit ini akan menulari warga masyarakat," kata Fukuda.

Pihak berwenang sendiri telah menutup setidaknya dua rumah sakit dan sekitar 4.000 orang dikarantina, baik di rumah masing-masing ataupun di pusat kesehatan. Dan karantina sendiri diperluas untuk mengisolasi warga yang pernah berhubungan dengan pasien MERS.

Pada Sabtu (13/6) dilaporkan 12 penderita baru termasuk pengemudi yang membawa pasien penderita MERS. Sehari sebelumnya, hanya empat kasus baru yang dilaporkan dan ini adalah jumlah terendah dalam 11 hari sehingga muncul harapan situasinya telah membaik. Tetapi para pakar memperkirakan akan ada pasien baru hingga masa inkubasi berakhir, yang diyakini berjalan selama dua minggu.

Remaja Inggris Klaim Temukan Planet Baru



JAKARTA - Remaja 15 tahun bernama Tom Wagg asal Inggris mengklaim telah berhasil menemukan planet baru yang letaknya dekat dengan bintang di luar angkasa.

Kala itu, Wagg tengah melakukan program magang di Keele University di Inggris, dirinya mengamati data yang

dikumpulkan oleh proyek Wide Angle Search for Planets (WASP) yang meminidai jutaan bintang di malam hari untuk mencari "transit", yaitu momen sebuah planet melintasi di depan bintang yang terlihat dari Bumi.

Wagg pun menyadari adanya titik kecil di sinar bintang, yang berarti ada sebuah planet sedang melintasi di depannya. Padahal sebelum pengamatan Wagg, belum pernah ada yang melihatnya.

"Saya sangat bersemangat karena berhasil menemukan planet baru," kata Wagg, seperti dikutip dari kantor berita CNN.

Setelah observasi, planet WASP-142b tidak bisa terlihat oleh mata telanjang dari Bumi. Lokasinya sekitar 1.000 tahun

cahaya dan ukurannya sama dengan Jupiter, sehingga bisa dikatakan planet baru ini tergolong raksasa. Planet WASP-142b ini mengorbit bintangnya hanya dua hari.

Para astronom di *University of Geneva* dan *University of Liege* mengkonfirmasi bahwa dilihat dari ukuran dan massanya, WASP-142b bisa diidentifikasi sebagai planet. Kabarnya pihak universitas akan mengusung kompetisi untuk pemberian nama yang layak.

Wagg sendiri mengaku jika dirinya tertarik menjalani program magang di Keele University karena kampus itu memiliki tim penelitian yang mempelajari khusus tentang planet-planet yang hidup di sekitar bintang selain Matahari, atau eksoplanet.(net)

TNI Bentuk Satuan Khusus Gabungan Atasi Terorisme Dan Makar

JAKARTA - TNI membentuk Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan guna membantu pihak kepolisian menanggulangi terorisme. Namun, satuan ini juga dipersiapkan untuk menghadapi gerombolan yang berencana melancarkan aksi makar. Hal tersebut seperti disampaikan Komandan Korps Pasukan Khas Marsekal Muda Adrian Wattimena. Lebih lanjut Adrian mengatakan, selain terorisme, institusinya memperkirakan ancaman terdekat Indonesia juga dapat berupa aksi pemberontakan di dalam negeri.

"Ancaman Indonesia itu terorisme dan

insurgency. Itu masih terjadi di daerah konflik seperti Papua dan Aceh," jelas Adrian, di Garut, Jawa Barat, Sabtu (13/6).

Menurut Adrian, satuan komando ini tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan Detasemen Khusus 88, melainkan tujuan utama pembentukan satuan operasi gabungan ini adalah untuk meniadakan para pasukan khusus.

Adrian mencontohkan, selama ini prajurit korpsnya membutuhkan waktu setidaknya 24 jam sebelum akhirnya sampai ke medan operasi. Kedepan, keberadaan satuan operasi gabungan ini dapat memangkas standar waktu itu hingga belasan

jam.

"Standar perencanaan kami, 1x24 jam itu sudah siap mengerahkan pasukan. Sekarang dalam hitungan jam kami sudah bisa tiba di daerah operasi," kata Adrian.

Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus ini kedepannya akan diisi 90 prajurit khusus, yang berasal dari Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satuan Bravo 90 Korphaskas TNI AU, masing-masing akan menerjunkan 30 prajurit terbaik mereka.

Adrian berkata, anggota pasukan tersebut akan berlatih dan berjaga untuk *stand by arrangement* di kompleks Indonesian



Net



Net

Peace and Security Center, Sentul, Jawa Barat. Jika pemerintah memutuskan untuk melibatkan TNI dalam penanganan teror

dan makar, 90 prajurit tersebut akan menjadi pasukan pertama yang tiba di daerah operasi. "Setelah mereka tiba, nanti pasu-

kan yang lebih besar akan memback-up," pungkasnya.

Kasus Angeline, KPAI Paparkan Cara Adopsi Anak Yang Benar

JAKARTA- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai dalam kasus Angeline, proses adopsi yang dilakukan tidak sah karena proses yang harus dijalani baru sampai pada tahap awal. Surat Pengakuan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan notaris kepada orang tua kandung dan orang tua angkat Angeline tidak kuat digunakan sebagai dasar pengadopsian.

Peraturan tentang adopsi anak sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat

dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Jika semua hal di atas terpenuhi, syarat berikutnya adalah mereka harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat, memiliki catatan kelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan, berstatus menikah paling singkat lima tahun, dan tidak merupakan pasangan sejenis.

Ditambah lagi, calon orang tua angkat juga diharuskan belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, mampu secara ekonomi dan sosial, memperoleh izin tertulis dari orang

tu atau wali serta memperoleh persetujuan anak, dan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak.

Sementara pada kasus Angeline, persyaratan untuk pengangkatan anak bahkan lebih rumit lagi. Pasalnya, ayah angkat Angeline adalah pria berkewarganegaraan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, selain melengkapi dokumen yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia, calon orang tua angkat juga harus mendapatkan restu dari negara asal.

Proses pengangkatan anak pun juga harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak, paling tidak berupa rekomendasi.

Izin tersebut merupakan persetujuan pengangkatan anak secara tertulis



Net

dari pemerintah negara asal suami atau istri melalui kedutaan atau perwakilan negaranya yang ada di Indonesia.

Tak hanya itu saja, calon orang tua angkat yang WNA itu juga harus mendapatkan persetujuan dari keluarga suami atau istri yang dilegalisasi di negara asal.

Calon orang tua angkat juga harus membuat pernyataan resmi yang berisi kesediaannya untuk melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI setempat setiap tahun hingga si anak berusia 18 tahun. Dia pun harus bersedia dikunjungi perwakilan RI setempat untuk melihat perkembangan anak sampai berusia 18 tahun.

Setelah segala dokumen lengkap, calon orang tua angkat baru bisa mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi dengan melampirkan seluruh persyaratan. Kemudian, Kepala Instansi Sosial akan menugaskan pekerja sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan ke rumahnya.

Jika dinilai layak, Kepala Instansi Sosial Provinsi akan mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara dan pekerja sosial akan melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara. Setelah proses tersebut selesai, calon

orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi. Pekerja sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak pun kembali melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh oleh calon orang tua angkat.

Berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap calon orang tua angkat, Kepala Instansi akan membahas hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga. Lembaga itu antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau yang saat ini menjadi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Selain itu ada pula wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

Proses selanjutnya yang harus diijilani, Kepala Instansi Sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih

lanjut ke Kementerian Sosial. Ketika berkas sudah diterima oleh Menteri Sosial atau diwakili oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos.

Forum Tim PIPA kemudian menerbitkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak. Kemudian Menteri Sosial mengeluarkan keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan. Tapi jika permohonan ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh calon orang tua angkat atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Jika pengadilan sudah menetapkan dan proses pengangkatan anak telah selesai, maka orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan tersebut ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota.

Langkah terakhir, Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut. Barulah proses pengangkatan anak resmi secara hukum.

Berdasarkan tata cara pengangkatan anak yang tercantum dalam Permensos Nomor 110 Tahun 2009, proses pengangkatan Angeline sebagai anak oleh Margriet dan suaminya menyalahi aturan yang berlaku.

Pertama, proses pengangkatan anak tidak melalui Lembaga Pengasuh Anak. Padahal pada Pasal 11 Permensos Nomor 110 Tahun 2009, pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang salah satunya WNA harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

Kedua, proses pengangkatan Angeline sebagai anak terhenti di notaris saja, tak melibatkan instansi sosial seperti Kementerian Sosial atau pengadilan.

Ketiga, sebelum mengadopsi Angeline, Margriet dan suaminya telah memiliki dua anak kandung. Padahal dalam persyaratan disebut pasangan calon pengadopsi tidak atau belum memiliki anak atau hanya boleh memiliki satu anak. (net)



Istimewa

Serah Terima Jabatan 15 Pejabat Eselon I, II, dan III Di Lingkungan Kerja Lemhannas RI

JAKARTA - Sebagai upaya dalam rangka mendorong percepatan kinerja Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A melantik 15 Pejabat Eselon I, II, dan III di Ruang Nusantara Gd. Trigatra Lemhannas RI, Jakarta Kamis (4/6).

Acara serah terima jabatan dan pengucapan sumpah janji ini merupakan salah satu langkah regenerasi yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Lemhannas RI di masa yang akan datang.

"Saya menaruh harapan besar kepada para pejabat baru untuk bersinergi mempertahankan pencapaian yang telah diperoleh Lemhannas selama ini. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat semakin meningkatnya ekspektasi berbagai komponen bangsa terhadap kiprah dan peran Lemhannas terkait

ketiga tugas pokok yang diembannya," ujar Budi Susilo Soepandji dalam sambutannya.

Adapun Pejabat Eselon I yang dilantik yakni Marsda TNI Bambang Samoedro, S.Sos, M.M sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Demografi, Brigjen TNI Karsiyanto, S.E sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Politik, dan Marsma TNI Dedy Nita Komara, S.E sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ideologi.

Pejabat Eselon II terdiri dari Brigjen TNI Juwondo sebagai Diropsdik Debidik-pimtknas, Brigjen TNI Sukoso Maksum sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Tannas, Ir. Muh. Yunus, M.Eng sebagai tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. SKA, Kombes Pol. Drs. Rafli, S.H sebagai Dirprog dan Bangtap Debidtaplaikbs, Kombes Pol. Drs. Ngudi Prayitno sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Hukum dan HAM, serta Drs. Hanif Dalim, M.A sebagai Direktur Pol. Debidjianstrat.

Sementara itu, Pejabat Eselon II yakni Kombes Pol. Drs. Mulyatno, S.H, M.M sebagai Kasubdit Pulita Kondisi Nilai-Nilai Konstitusi dan Sisnas, Kolonel Mar Budi Purnama, S.Pi sebagai Kasubdit Ristansilai Kons dan Sisnas Dittaplai Kons dan Sisnas, Kolonel Caj D.T.M. Sinaga, S.Th, M.M, M.Si sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bid. Tannas, Drs. Janpers L. Silitonga, M.M sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bid. Padnas, Letkol Ckm Alinapia Pasaribu, S.Sos. M.Sc. sebagai Kasubdit Opstap Sembelneg Lemhannas RI.

Hadir dalam acara ini yakni Sekretaris Dewan pengarah Dr. Ardi Partadinata, M.H, M.Si, Wakil Gubernur Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A, Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H, para Deputy, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, serta para pejabat struktural Lemhannas RI.

Lemhannas RI Gelar Acara International Conference Terrorism and Deradicalization



Istimewa

JAKARTA - Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA membuka acara *International Conference between Lemhannas RI and The French Embassy* yang mengusung tema "Terrorism and Deradicalization" di Ruang Syailendra Gd. Astagatra Lt. 3 Lemhannas RI, Jakarta, Senin (13/4).

Menurut Budi Susilo Soepandji, dewasa ini aksi terorisme telah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Oleh karenanya, sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi aksi terorisme, Indonesia berkerja sama dengan berbagai pihak, baik secara bilateral maupun multilateral. "Indonesia punya komitmen kuat untuk menanggulangi terorisme," tegas Budi Susilo Soepandji.

Konferensi yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Profesional Bid. Sumber Daya Alam Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA ini menghadirkan lima narasumber yakni *Former High Ranking Official of French Police Commissaire Divisionnaire from The Ministry of Interior* Patrick Ballardur, *Former Head of French Division Nationale Anti Terrorist* Roger Marion, *Subject Matter Specialist on De-*

Radicalization Over The World Roseline Davido, *Senior Expert in Psychology of University of Indonesia* Prof. Dr. Sarlito Wirawan, dan *Former Head of Police Den-sus 88* Irjen Pol. Drs. HM. Tito Karnavian, MA, Ph.D.

Pada kesempatan itu, Patrick Ballardur mengatakan fenomena terorisme baik terorisme kaum separatist, terorisme negara, maupun terorisme yang menggunakan rujukan agama sangat rumit dan terus berkembang. "Saya rasa sangat penting ada pasukan khusus untuk menghadapi ancaman dengan senjata lengkap," ujar Patrick.

Sementara itu, menurut Roger Marion, meskipun aksi terorisme dilakukan oleh kelompok yang berbeda, tetapi terorisme umumnya memiliki tiga ciri tertentu yakni kekerasan dengan target khusus, penyerangan yang bertujuan untuk menekan pemerintah, dan publisitas media atas penyerangan tersebut.

Sedangkan Roseline Davido yang mengembangkan *CHaD (Childhood HAnd that Disturbs)* mengatakan bahwa Tes *CHaD* dapat dipergunakan untuk me-

neliti modus atau hal-hal yang melatar-belakangi tindakan terorisme melalui gambar. "Each element of the *CHaD* assesses it self by a subject who hears what he want to hear," jelas Roseline.

Tes tersebut lanjut Roseline menunjukkan jika sejumlah mantan teroris pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan saat masa kecil dari keluarga atau intimidasi (*bullying*) yang berasal dari lingkungan sekitarnya.

Prof. Dr. Sarlito Wirawan bersama timnya berencana membuat program yang bisa menderadikalisasi terorisme atau mengurangi tingkat radikalisasi, namun belum sampai pada tahap mengubah ideologi. "Kita tidak bisa menjangkau sampai ideologi," jelas dia.

Sementara itu, Irjen Pol. Drs. HM. Tito Karnavian, MA, Ph.D memaparkan ada empat persyaratan yang harus dipenuhi dalam upaya penanggulangan terorisme yakni kemampuan deteksi/intelijen, penyidikan secara ilmiah, kekuatan mengukur, dan aturan hukum yang kuat.

Acara yang diawali *Courtesy Call First Counselor at The French Embassy in Jakarta* *Stephane Baumgarth* ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama Lemhannas RI dengan Kedutaan Besar Perancis di Indonesia.

Hadir dalam acara ini yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Didi Herdiawan, MPA, MBA, pejabat Kementerian Luar Negeri, pejabat Kemenpolhukam, pejabat Detasemen 88 Anti Teror, pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.



Istimewa

Gubernur Lemhannas RI Resmikan Pembukaan PPSA XX

JAKARTA - Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX Lemhannas RI secara resmi dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Senin (11/5) di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Budi Susilo Soepandji mengatakan sejalan dengan program revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah, para peserta harus mampu memanfaatkan pendidikan di Lemhannas RI sebagai sarana untuk melatih diri dalam rangka meningkatkan kualitas mental dan karakter sebagai pemimpin yang negarawan.

“Melalui kegiatan dialog dan diskusi terkait berbagai permasalahan aktual, peserta dituntut untuk mampu berinteraksi secara konstruktif guna membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindak pemimpin yang visioner dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat,” ucap Budi Susilo Soepandji.

Kegiatan PPSA sendiri merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI sebagai penyelenggara program pendidikan tersebut. Program PPSA XX yang berlangsung selama 5,5 bulan ini dilakukan dalam dua periode, yakni periode *off campus* dan periode *on campus* yang meliputi kegiatan orien-

tasi, ceramah, diskusi, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Penulisan dan Penyajian Kertas Karya Perorangan (Taskap), dan Seminar Nasional.

Turut hadir dalam acara ini yakni Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Ketua Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL) Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A., Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.



Gubernur Lemhannas RI Lantik Pejabat Eselon I, II, III, dan IV

JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. secara resmi melantik para Pejabat Eselon I, II, III dan IV di Ruang Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta, Kamis(16/4).

Dalam sambutannya, Budi Susilo Soepandji berharap agar pejabat yang baru dilantik ini dapat menunjukkan dedikasi, loyalitas yang maksimal bagi peningkatan kinerja organisasi di Lemhannas RI, melalui pengabdian yang terbaik, sesuai dengan tugas, peran dan fungsi masing-masing pejabat yang dimaksud.

"Saya menaruh harapan besar kepada anggota yang dilantik dapat mendorong kinerja Lemhannas dengan adanya mutasi dan rotasi jabatan sebagai bagian dari proses organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personal," ujar Budi Susilo Soepandji.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Laksamana TNI Karma Suta, S.E sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wasantara,

Marsma TNI Tanto Suryanto sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Demografi, Ivan Ronald Pelealu, SE, sebagai Karo Kerja Sama, Kolonel Inf. Azhar Tanjung sebagai Kasubdit Pertahanan Ditjian Hankam, Drs. Iswidiyatmo, MM, MA sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bid. SKA, Kolonel Lek Antonius Sri Munanda, SE, MM sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bid. Iptengtek, Kolonel Laut (P) Maghoni, S. Mn sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bid. Geografi, Kolonel Inf. Simson Moeratno sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bid. Demografi, Kolonel Inf. Sudjari, SIP, M.Si sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bid. Sismennas, Kombes Pol. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bid. Kepemimpinan, Kombes Pol. Susana Saras Rugiati, SH, M.Si sebagai Kasubdit Keamanan Ditjian Hankam, Kombes Pol. Oktavianus Marthin, SIK sebagai Kabag Komlek Rotelematika, Dr. Danang Sri Wibowo Riyanto, ST, MT sebagai Kasub-



Saya menaruh harapan besar kepada anggota yang dilantik

dapat mendorong kinerja Lemhannas dengan adanya mutasi dan rotasi jabatan sebagai bagian dari proses organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personal

dit Pemberdayaan Ekonomi Ditjian Ekonomi, Duma Silaen, SE, M.Sc sebagai Kasi Ren Subdit Regional Ditjian Internasional, dan Sulistiawati, SAP sebagai Kasi Ren Subdit Pemberdayaan Ekonomi Ditjian Ekonomi.

Tampak hadir pada acara sertijab tersebut adalah Wakil Gubernur Laksdya TNI Didit Herdiawan, MPA, MBA, Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, MH, M.Si, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, dan beberapa pengurus dari Persista (Persatuan Istri Anggota).



*Laksamana Madya TNI DR Didit Herdiawan, MPA, MBA
(Wakil Gubernur Lemhannas RI)*

SELALU BERBAHAGIA MENERIMA AMANAH

MENJADI anggota Angkatan Laut (AL) adalah mimpi (cita-cita, red) yang telah tumbuh sedari masa kanak-kanak, Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan MPA, MBA. Sebuah mimpi yang kiranya dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya mengingat Didit adalah putra dari seorang Laksamana Pertama.

Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 13 September 1961 sebagai putra kedua dari pasangan Laksamana Pertama TNI (Purn) Drs AM Ashaf Abdullah MBA dan Ibu RA Noekmijati.

Pada Swantara, Perwira Tinggi Bintang Tiga ini mengakui bagaimana ia begitu terbawa, baik hati dan pikiran, melihat Sang Ayah. Maka tidak heran jika kemudian dalam benaknya tumbuh keinginan kuat untuk bisa mengikuti jejak Sang Ayah. "Pokoknya jadi anggota AL, setelah jadi anggota barulah saya memahami apa itu pengabdian kepada negara dan berusaha untuk all out," kenang suami dari Widyastuti SE ini.

Didit Herdiawan adalah salah satu perwira yang perjalanan karirnya terbilang cukup panjang dan cemerlang. Ia tercatat pernah menjadi Perwira Divisi AKS KRI Ngurahrai-344 (1985), Perwira Seksi Watpers Satkor Armatim (1988), Perwira Seksi Glapur Kolat Armatim (1994), Kasubdiv Evagiat Puslatlekdalsen Kodikal (1995), Kasubdis PBA Puslatlekdalsen Kodikal (1995), Palaksa KRI Lambung Mangkurat-374 (1996), Palaksa KRI Fatahillah-361 (1997).

Kemudian ia menjadi Komandan KRI Nuku-373 (1997), Dirsesenbar Pusdikopsla Kodikal (1999), Dirselapa Pusdikopsla Kodikal (2001), Danpuslatlekdalsen Kodikal (2002), Sahli Pang "D" Jemen Koarmatim (2003), Asisten Operasi Danlantamal VIII Koarmatim (2003), Dansatkor Koarmabar (2004). Didit Herdiawan juga pernah dipercaya menjadi Ajudan

Presiden RI (2004-2009), Danguspurla Koarmabar (2009-2010), Kepala Staf Koarmabar (2010), Panglima Kolinlamil (2010-2011), Pangarmabar (2011-2012), Asops Kasal (2012 - 2014), Wakasal (2014 - 2015) hingga kemudian menjabat sebagai Wagub Lemhanas RI hingga sekarang.

Bagi lelaki yang dikenal murah senyum ini, setiap penugasan memiliki nilai yang sama, baik dalam dunia ketentaraan maupun tidak. "Mengabdikan untuk Negara itu bisa di mana saja. Yang penting hati bahagia menerima amanah agar bisa dijalankan dengan baik," katanya.

Ia mengakui, kini tugasnya tidaklah sama dengan tugas yang ia lakukan selama berada di dunia ketentaraan. Tapi, apa yang ia lakukan hari ini tidak kalah penting bagi Negara.

Karenanya ia berharap, Lemhannas RI bisa fokus dalam menjalankan tugas yang salah satunya adalah mendidik calon pemimpin bangsa terkait dengan Ketahanan Nasional, Wawasan Kebangsaan yang memiliki empat konsensus dasar mulai dari NKRI, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika hingga Pancasila. Dalam kondisi itu, Lemhannas RI harus mampu memberikan update situasi dan kondisi mengingat Lemhannas RI merupakan lembaga pendukung kebijakan Presiden RI. Dan dalam pelaksanaan tugas itu sendiri, Lemhannas RI dituntut untuk memahami banyak hal mulai geografi, demografi, sumber kekayaan alam, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional dan lainnya.

Pentingnya posisi Lemhannas RI dalam menjalankan fungsi pendukung kebijakan Presiden RI, kiranya bersesuaian dengan pribadi Didit. Sebagai seorang pribadi, Didit adalah sosok yang selalu ingin lebih terbuka dan tidak mau berhenti dalam menimba pengetahuan dan pengalaman. Salah satunya adalah

menimba pengalaman dari para tokoh pendahulu dan pahlawan yang telah lebih dahulu mengabdikan hidup kepada Bangsa dan Negara. Baginya, pengalaman para pendahulu itu bisa menjadi inspirasi dan bekal dalam melakukan pengabdian.

Untuk urusan pendidikan dan keilmuan, Alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 29 tahun 1984 ini memiliki catatan yang cukup panjang mulai dari Pendidikan Spesialis Perwira, Pendidikan Lanjutan Perwira, *Joint Service Command and Staff College UK and King College London University*, dan Sekolah Staf dan Komando TNI. Ia juga menyandang gelar *Magister Master of Public Administration (M.P.A.)* dan *Master of Business Administration (M.B.A.)*. Selain itu ia merupakan lulusan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII Lemhannas RI tahun 2011.

Tidak hanya itu, ia juga memulai Program Doktor di Sekolah Pascasarjana IPB pada 10 April 2010 dan mengajukan disertasi dengan judul "Industri Maritim dan Peranannya Terhadap Distribusi Pangan di Wilayah Terpencil dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Pangan Nasional."

Mengenai tema disertasinya, Didit mengungkapkan, tema tersebut adalah salah satu bagian dari kepentingan negara. "Ketahanan pangan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari kemampuan beli bahan pangan, tapi juga sampai sejauh mana gizinya, variasi makanan, dan ketersediaan dari pangan itu sendiri," ucapnya.

Ia mengingatkan, perhatian terhadap persoalan ketahanan pangan tidak saja menjadi kebutuhan kawasan perkotaan tetapi lebih dari itu menjadi kebutuhan juga di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan. "Dalam

kondisi itu, perlu *access ability* dapat diakses, didapat, diambil, dinikmati oleh masyarakat. Harga terjangkau, varietas makanan jelas, jumlahnya sesuai dengan sembilan kebutuhan pokok dan tersedia dengan baik,” jelasnya.

Menurutnya, agar kebutuhan itu tersedia dengan baik maka tidak hanya perlu peran pemerintah daerah tapi juga peran pemerintah pusat yang berkaitan dengan sistem distribusi nasional. Sampai sejauh mana sistem distribusi nasional telah menjangkau pulau terpencil dan wilayah terluar. “Perlu dibicarakan. Bukan hanya soal alat angkutnya saja, tapi juga soal sarana dan prasarana (kepelabuhanan dan jalan) yang sangat multi kompleks dan ini berkaitan dengan industri maritim,” katanya.

Ia mengingatkan, bahwa ketahanan pangan akan bermuara pada kemandirian pangan yang menyeluruh, tidak hanya aspek beras, jagung, ikan dan lain-lain. “Tapi juga industri yang menunjang keberadaan itu semua harus kuat,” tegasnya.

Mengenai perjalanan karirnya yang terbilang cukup bersinar, Didit mengatakan ada banyak hal yang menentukan keberhasilan seseorang. “Kalau normatif ya harus kerja keras, cerdas dan ikhlas,” ungkapinya.

Meski demikian ia mengingatkan ada hal lain yang harus dipahami, ia mencontohkan bahwa seorang tentara tidak hanya harus pintar, ikhlas, loyal, cerdas, tapi bagaimana memahami waktu (momentum) dengan tepat juga sangat menentukan. Baginya setiap orang tidak hanya harus pintar, tapi pintar dan punya hati serta mau kerja, kemudian cerdas dalam melakukan sesuatu pada saat yang tepat.

Didit juga mengungkapkan sebuah rahasia kecil yang sangat berharga dan menentukan keberhasilan perjalanan

karirnya, yakni pesan dari orang tuanya. Sebuah pesan sederhana yang terus ia coba pegang dengan teguh. “Tidak boleh sombong. Selalu ada yang lebih atas. Makin dalam kita pelajari makin dalam kita tahu, makin dalam juga orang yang lebih tahu dari kita. Karenanya kita harus tetap menimba ilmu dan tidak goyah untuk terus melakukan perbaikan dalam lingkungan kerja, bangsa dan negara,” jelasnya.

Kini Didit telah dikaruniai tiga orang putri ini yakni Herdianti Merilla Putri SE, Hastuti Viana Putri, dan Herdini Aprilia Putri. Dalam perjalanan karir Didit sudah mencapai sesuatu yang mungkin banyak diimpikan orang lain, pun begitu dalam urusan domestiknya (keluarga).

Lalu masihkah ada sesuatu yang ia impikan yang ingin diwujudkan? Secara singkat Didit mengaku memiliki beberapa hal yang ia diwujudkan. Beberapa

di antaranya adalah harapan agar pengabdian di Lemhannas RI bisa bermanfaat dan disambut baik, selain itu ia berharap bisa menjembatani kebijakan Pimpinan Lemhannas RI kepada seluruh anggota.

“Perlu ada peningkatan kinerja, anggota harus terus mampu menyesuaikan dengan iklim yang baru, terlebih presiden adalah pekerja keras. Mudah-mudahan pengabdian kami tidak tercoreng,” ujarnya.

Berbagai pengakuan sudah didapatkan Didit baik dari dalam maupun luar negeri. Terkait hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga (Asia), ia mengatakan harus ada upaya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga agar situasi tetap tenang. “Dengan demikian masyarakat yang berusaha bisa mudah berpikir dan tenang dalam melakukan inovasi,” katanya.

Berikut berbagai jasa dan prestasi di kedinasan Didit Herdiawan, di antaranya Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, Satya Lencana GOM VII, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV Tahun, Satya Lencana Dwidja Sistha, Satya Lencana Dwidja Sistha I dan II, Satya Lencana Bhakti Sosial, Satya Lencana Wira Karya, Satya Lencana Wira Siaga, Satya Lencana Wira Dharma (Perbatasan), Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Wira Karya (Somalia), Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Dharma Nusa II, dan Satya Lencana Kesetiaan Melati. Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan, MPA MBA juga telah memperoleh penghargaan dari Luar Negeri, yakni: RTA *Honorary Parachutist Badge Thailand*, *US Navy Seal*, dan *Honorary PWO Course Australia*.

Seorang tentara tidak hanya harus pintar, ikhlas, loyal, cerdas, tapi bagaimana memahami waktu (momentum) dengan tepat juga sangat menentukan. Baginya setiap orang tidak hanya harus pintar, tapi pintar dan punya hati serta mau kerja, kemudian cerdas dalam melakukan sesuatu pada saat yang tepat.



Net

Dodi Riyadmadji
Alumni PPRA XLVII 2012

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Deradikalisasi Garda Terdepan Pencegahan Merebaknya Paham Radikalisme

SEBAGAI bangsa yang hidup dalam suasana pluralitas suku, asal usul, ras, budaya dan agama, Bangsa Indonesia dengan sendirinya telah terbiasa dengan berbagai perbedaan, dan menerima perbedaan tersebut dengan prinsip hidup berdampingan secara damai. Prinsip ini sudah sejak lama berjalan dengan baik dalam balutan semangat kesatuan yang terekspresikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ironisnya kini ditengah mengarungi arus modernisasi dan derap perubahan sosial yang cepat, kedamaian yang sedang berjalan terganggu dengan munculnya paham radikalisme di tengah masyarakat.

Radikalisme sendiri sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis berimbas

langsung kepada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengancam integrasi nasional utamanya ideologi bangsa. Masuknya paham radikalisme ke Indonesia yang berasal dari luar maupun yang berkembang dari dalam harus diwaspadai karena hal ini memiliki keterkaitan langsung dengan dengan konflik terbuka yang diiringi tindakan kekerasan dan teror. Seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini ancaman radikalisme tersebut marak terjadi di berbagai daerah, diikuti dengan aksi teror bom/bahan peledak maupun aksi-aksi penembakan yang dilakukan kelompok tertentu kepada masyarakat sipil maupun aparat keamanan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, tercatat bahwa konflik berlatarbelakang radikalisme dan terorisme yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 65 peristiwa. Pada tahun 2013 sebanyak 30 peristiwa, dan pada tahun 2014 menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden 2014, sudah terjadi 10 peristiwa.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan munculnya pemahaman bahwa ancaman paham radikal yang bersifat kompleks dan multidimensional tersebut, dalam penanganannya memerlukan kerja sama multisektor, karena itulah diperlukan pengelolaan secara komprehensif dan terintegrasi.

Program deradikalisasi nasional diharapkan menjadi garda terdepan untuk pencegahan berkembangnya paham radikalisme. Disamping itu, program deradikalisasi sebagai program lintas kementerian terkait diharapkan mampu secara komprehensif menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek pendidikan.

Selain itu, program deradikalisasi juga diharapkan dapat mendorong timbulnya kesadaran bahwa radikalisme yang berkaitan dengan tindakan kekerasan dan teror memerlukan kebersamaan seluruh elemen dalam penanggulangannya.



Net

Tony Spontana
Alumni PPRA XLIX 2013

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI

Kejagung Bentuk Satgas Penanganan Tindak Pidana Terorisme

risme berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang yang ada.

Program pencegahan dan penanggulangan terorisme sendiri melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan seluruh komponen kekuatan bangsa dengan diadakannya pengembangan kapasitas berbagai instansi tersebut yang terlibat dalam penanganan terorisme.

Permasalahan terorisme sendiri hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama dan koordinasi antara berbagai pemang-

ku kepentingan atau *stake holder*, baik instansi pemerintah maupun masyarakat.

Terkait dengan hal ini, untuk membantu penanganan kasus yang berhubungan dengan gerakan radikalisme utamanya terorisme, Kejaksaan Agung sendiri telah membentuk satuan tugas penanganan tindak pidana terorisme dan tindak pidana lintas negara sehingga diharapkan penyelesaian kasus terorisme dapat terlaksana dengan lebih baik sesuai dengan tujuan.



APA yang sesungguhnya terjadi pada dunia jurnalisme kita, saat ini? Tengoklah pertarungan media pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2014. Mereka terbelah secara tajam dan sarkastis, bahkan mengarah ke konflik. Tidak ada lagi penghargaan terhadap 'profesi agung dan mulia,' bernama wartawan; etika jurnalistik hanya bahasa di 'langit,' kode etik dibuang ke tong sampah; nilai berita diinjak. Singkat kata, fase pileg dan pilpres 2014 menjadikan martabat jurnalisme jatuh pada titik nadhir; jurnalisme tidak memiliki nilai setitik pun!

Dalam konteks, dunia jurnalisme saat ini kita jangan pernah bertanya tentang kode etik jurnalistik; tak perlu memperdebatkan etika di komunikasi (massa) ruang publik; memperbincangkan kaidah moral. Bahkan, agama yang dianut oleh mayoritas wartawan, sebagai pemproduksi, berita dan beragam menu jurnalisme lainnya dianggap sebagai penghalang kebebasan berpikir, berkreasi, dan menyampaikan informasi.

Singkat kata jurnalisme kita memberikan absurditas; tanpa makna apapun! Oleh sebab itu, jangan pernah bertanya di manakah nilai berita (*news value*), kebenaran, kepentingan publik, dan

Judul Buku : Keruntuhan Jurnalisme
Penulis : Dudi Sabil Iskandar
Penerbit : Lentera Ilmu Cendikia, jakarta
Tebal : 168 halaman

Menggugat Jurnalisme Modern

etika jurnalistik, serta nurani wartawan dalam dunia jurnalistik di negeri ini. Sebab semuanya sudah terbeli, tergadai, oleh beragam kepentingan di luar jurnalisme; jurnalisme diambang kehancuran; atau memang sudah ambruk; tidak menyisakan apapun selain seonggok fakta dan segepok data yang dipermainkan. Ia fakta tanpa makna. Doktrin *fact is sacred and opinion is cheap* dalam dunia jurnalisme kita sudah usang. Fakta 'diperkosakan' dan opini diarahkan untuk memuaskan syahwat di luar jurnalisme. Kekuasaan, ideologi, politik, uang, kepentingan!

Sembilan Elemen Jurnalisme

Adalah dua pakar jurnalisme kondang *Bill Kovach dan Tom Rosentiel* yang membuat standar mutu jurnalisme. Keduanya menyebutnya dengan sembilan elemen dasar sebuah jurnalisme. Kesembilan elemen tersebut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ia merupakan entitas dari sebuah karya jurnalistik maha mulia.

Pertama, kewajiban utama jurnalisme adalah pencarian kebenaran. Kedua, loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara. Ketiga, disiplin dalam melakukan verifikasi fakta. Keempat, jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya. Kelima, memantau kekuasaan dan menyambung lidah yang tertindas. Keenam, jurnalisme harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi. Ketujuh, jurnalisme harus memikat dan relevan. Kedelapan, kewajiban jurnalis adalah menjadikan beritanya proporsional dan komprehensif. Kesembilan, jurnalis diperbolehkan untuk men-

dengarkan hati nuraninya.

Pers Alternatif

Dalam disiplin ilmu komunikasi dikenal dengan empat teori pers. Hal ini berangkat dari pemetaan *Fred S. Siebert*, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam bukunya *Four Theories of The Press*. Keempat teori pers itu adalah teori pers otoriter, teori pers liberal, teori pers tanggung jawab sosial dan teori pers komunis Uni Soviet. Pakar komunikasi massa, Denis McQuail, menambahkan dua teori pers lain, yaitu teori pers pembangunan dan teori pers partisipan demokratis meski dua teori terakhir ini belum banyak diakui.

Enam teori pers itu pun dianut secara luas di negeri ini. Namun, di Indonesia ada satu teori pers lagi yang harus ditambahkan, yakni, teori pers Pancasila. Menurut pencetus teori pers Pancasila, Anwar Arifin, teori pers ini memiliki beberapa ciri khas. Bersandar dan memiliki falsafah dasar sebagaimana negara kita, Pancasila. Lima sila dalam Pancasila merupakan prinsip dasar dari para pekerja jurnalistik di Indonesia. Pancasila menjadi landasan etis dan kerangka filosofis dalam setiap gerak insan pers negeri ini dalam menghasilkan karyanya, berita. Dalam konteks itulah teori pers Pancasila khas Indonesia tidak dimiliki negara lain.

Kedua, pers Pancasila adalah jembatan di antara semua teori pers. Ia bukan merupakan bagian dari enam teori pers. Pers Pancasila berada di tengah-tengah. Ia tidak liberal. Pun, tidak otoriter. Ia bukan bagian dari pers Uni Soviet. Juga berbeda dengan teori pers pembangunan dan partisipan demokratis. Pers Pancasila merupakan perangkum kelebihan enam teori pers.

Toeti Heraty Noerhadi Roosseno



Istimedia

Jiwa Bebas yang Tak Ingin Dikalahkan Kekalahan

JALAN panjang berliku yang akan dilalui setiap manusia adalah sesuatu yang menurut kaum religius telah ada semenjak ruh-ruh dan alam diciptakan oleh Sang Penguasa Semesta. Apakah begitu juga dengan leluhur dan cara tiap manusia melalui jalan panjang itu, apakah tiap leluhur dan pilihan hidup seorang manusia juga telah ada semenjak kita tidak ada? Jika demikian, menjadi begitu tiada “jiwa bebas” pada tiap-tiap tubuh kita? Tidakkah demikian?

Tetapi tatkala kita membaca kisah hidup dari salah seorang Penyair Perempuan Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi Roosseno akan membuka babak baru sebuah pemahaman dalam diri tiap kita bahwa “jiwa yang bebas” benar-benar ada dalam diri kita. Jiwa yang bebas itu bias jadi adalah sebuah bentukan dari pemikiran (kesadaran akan sebab-akibat dalam setiap pilihan) dan keberanian untuk bertindak atau mengambil pilihan meski menyadari semua resiko yang diambil tak menguntungkan.

Jiwa yang bebas itulah yang pastinya telah ada dalam wadag (tubuh) perempuan Toeti Heraty, perempuan kelahiran Bandung, 27 November 1933. Kenyataan itu akan mudah muncul dan terpapar dalam benak kita, jika kita mem-

baca kisah kehidupannya hingga dirinya menjelma sebagai sosok inovatif yang terus berkarya seperti hari ini seperti dilakoni seorang perempuan yang memiliki empat anak dan delapan cucu.

Toeti Heraty mencapai wujudnya hari ini yang dikenal orang banyak tidaklah melalui proses yang singkat dan mudah. Namun sebaliknya, banyak hal-hal beresiko dan cenderung “menyeramkan” bagi sebagian orang berani ia pilih. Sudah tentu pilihan itu bisa ia pegang karena ia memiliki jiwa yang bebas, bukan jiwa yang bebas tanpa memahami resiko atas pilihannya, tapi jiwa bebas yang sangat sadar akan semua kemungkinan dari pilihan yang ia ambil.

Toeti adalah sosok yang berani mengambil keputusan penting meski keputusan itu bersifat sangat eksperimental (uji coba). “Keputusan-keputusan eksperimental yang pernah saya ambil sebagai “Lompatan dalam Kegelapan”,” sebut Toeti Herty. Sebuah keputusan yang membuat dirinya harus meninggalkan keamanan demi sesuatu yang belum pasti.

Tetapi lanjut Toeti dengan begitulah ia kemudian harus membulatkan tekad agar tidak ada celah dan peluang bagi memangnya kekalahan aras dirinya.

Bertarung Vis a Vis dengan Resiko

Kecintaan Toeti Herty terhadap aktivitas membaca buku telah muncul semenjak dirinya masih di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), sesuatu yang ia sebut sebagai minatnya pada keinginan

untuk mendalami jiwa manusia. “Meski akhirnya untuk urusan studi lanjutan, saya harus mengalah pada keinginan orang tuanya (Roosseno Soerjohadiko-esoemo dan R.A. Oentari Roosseno), yang mana Ibunda menginginkan saya melanjutkan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI),” jelas Toeti Heraty.

Dengan demikian, pengambilan pilihan (yang bisa jadi tidak sesuai dengan minatnya) melanjutkan studi di FKUI demi memenuhi keinginan orang tuanya. Toeti mengaku selama menempuh pendidikan tersebut, dirinya sempat menjadi karyawan penjualan bebas di Apotik Tunggal-Salemba, Jakarta.

Pekerjaan tersebut aku Toeti telah memberinya pendapatan sebesar Rp500 per bulan dan kesempatan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tuanya.

Pada fase ini cerita Toeti sebuah jalan terbuka, ketika dirinya mendapat tawaran untuk menemani seorang kawannya bernama Andilin Koesnoen yang saat itu hendak melanjutkan studi Kedokteran di Belanda. Kesempatan tersebut tidak kata Toeti tidak ia sia-siakan, hingga pada 1955 ia berangkat ke Belanda dan diterima di *Psychologie Geementelijke Universiteit Amsterdam*.

Saat inilah, yang disebut Toeti fase penentuan sesuai kehendaknya, karena di sinilah dirinya telah mengambil pilihan keluar dari jalur awal yang diinginkan orang tua atas dirinya. Tentu saja keputusan ini



Istimewa

dapat dikatakan bisa jadi mengecewakan kedua orang tuanya, tapi pilihan sudah diambil dan Toeti memiliki cukup kemampuan untuk memperjuangkan pilihan yang ia percayai.

Ketika berada di Belanda inilah (1957-1958), Toeti muda bertemu dengan Eddi Noerhadi, mahasiswa Indonesia yang tengah menyelesaikan studi Biologi di Utrcet yang kemudian hari menjadi suami Toeti. Sayangnya perjalanan mereka di Belanda harus segera diakhiri karena ketegangan hubungan yang makin memuncak antara Republik Indonesia dan Negeri Belanda. Akhirnya Toeti dan suami beserta kedua bayinya (Cita Citrawinda dan Inda Citraninda) memutuskan kembali ke Indonesia dan tinggal di Bandung dan di sinilah anak ketiga mereka dilahirkan yakni Migni Myriasandra.

Ketangguhan dan keteguhan Toeti kembali diuji ketika dirinya memutuskan melanjutkan studi psikologi di Universitas Indonesia (sebab studi sebelumnya di Belanda tidak terselesaikan karena situasi). Untuk menyelesaikan studinya

inilah ia melakukan perjalanan Bandung-Jakarta dalam kondisi ia memiliki anak dan suami yang saat itu bekerja sebagai Dosen dan Ketua Jurusan Botani di ITB.

Perjalanan-perjalanan demi menyelesaikan studinya itu tidak Toeti hentikan meski Toeti tengah mengandung anak yang keempat (Darwin Cyril).

Setelah berhasil menyelesaikan studi psikologi, Toeti kemudian mendapat kesempatan mengajar di Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Inilah fase yang disebut Toeti yang membarunya lebih akrab dengan dunia seni setelah dirinya berkenalan dengan beberapa seniman dan perupa.

Empat tahun mengajar di UNPAD, Toeti kemudian mendapat kesempatan untuk menjadi PNS di kampus tersebut. Tetapi apa yang ia lakukan? Toeti Heraty mengaku mengambil pilihan meninggalkan kota kembang dan tinggal di Jakarta pada tahun 1966. Ditemani Cyril yang masih kecil dan membiarkan ketiga anak dan suaminya tetap berada di Bandung.

Setelah tinggal selama tiga bulan di

Ibukota, Toeti memutuskan tinggal di paviliun dekat Balai Pustaka, tempat di mana sejumlah seniman dan budayawan kerap berdiskusi.

Kepindahannya ke Jakarta kata Toeti, ia juga mulai mengelola Biro Oktroi Rooseno sebuah biro yang mengurus hak kepemilikan intelektual (intellectual property right)

Di tahun 1971, Toeti Heraty kemudian menerbitkan buku Sajak-sajak 33 dengan Penerbit Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Keith Foulcher seorang pembaca Toeti sempat menungkapkan bahwa jika Indonesia ingin mencari perintis feminisme dalam sastra Indonesia maka Toeti Heraty adalah nama yang paling menonjol. Sebab dalam banyak karyanya Toeti menunjukkan keberpihakan pada perempuan dan kegeramannya pada kemunafikan dan ego lelaki.

Disinilah kemudian kita melihat bagaimana Toeti Heraty kerap *vis a vis* (saling berhadapan langsung) dengan resiko-resiko atas keputusannya. Paling tidak kita bisa menilai setiap keputusan tersebut bukanlah keputusan yang memiliki bobot tidak ringan.

Sebutlah ketika ia meninggalkan dunia kedokteran dan memasuki dunia psikologis, kemudian ia harus pulang dalam keadaan belum menyelesaikan studi bersama seorang suami dan anak, sesuatu yang bisa jadi mendatangkan "kekecewaan" pada orang tuanya. Kemudian ia memutuskan menyelesaikan studi dengan melakukan perjalanan Bandung-Jakarta di tengah kesibukannya menjalankan fungsi sebagai seorang istri dan ibu. Tidak sampai di sana saja, ia kemudian memutuskan pindah ke Jakarta karena sesuatu yang lain, selain kedokteran dan psikologi, demi untuk mengembangkan sebuah dunia dalam dirinya yang selama ini belum ia tengok, dunia seni dan budaya.

Semua hal yang dilakukan Toeti, di sisi lain, bisa jadi mendatangkan sebuah pandangan yang negatif tentang

betapa ia mengedepankan ego dan keinginan pribadi dengan mengabaikan keluarga dan sekitarnya. Tapi sekali lagi, inilah sikap berhadap-hadapan dengan resiko yang Toeti ambil, dan sikap itu telah membawanya pada bentuk dan keberhasilan dirinya hari ini.

Perjalanan Toeti terus berlanjut, pada 1971 ia mendapat beasiswa bidang filsafat di Leiden dan ia memutuskan berangkat membawa dua putri kembarnya. Keputusan serius yang ia jalani dengan serius pula hingga ia berhasil menyelesaikan studi lebih cepat dari yang seharusnya.

Seperti dikemukakan di atas, Toeti adalah sosok yang berani mengambil keputusan penting meski sifatnya sangat eksperimental, ia seorang manusia yang gelisah dan berani merawat kegelisahannya. Hal itu terus berlanjut sepeninggal suaminya pada usia 67 tahun. Mereka sempat tinggal bersama Eddi menyusul istrinya ke Jakarta dan hidup bersama selama dua tahun bersama anak dan cucunya.

Kegelisahan Toeti mengalir terus meski ia berada kesibukannya yang luar biasa,

kesibukan yang membuatnya harus berdiri di tengah hiruk pikuk manusia lainnya. Toeti berusaha tetap menjaga ruang privasinya, ruang sendiri dimana ia tetap bisa melakukan hal-hal selain apa yang ia lakukan di tengah keramaian.

Toeti Heraty menganggap kegelisahan adalah kebutuhan manusia untuk diakui sebagai pribadi bukan sebagai perempuan atau seorang istri. Eksperimen dalam hidup yang ia lakukan pada akhirnya membangun sebuah “jiwa yang bebas”

Kini, kebebasan sudah ia capai oleh Toeti. Kebebasan yang kemudian ia pergunakan untuk memberikan manfaat kepada manusia dan kehidupan. Kebebasan yang kemudian mengambil peran langsung melalui beberapa posisi seperti Presiden Direktur Biro Oktroi Roosseno, sejak tahun 1975. Konsultan Paten – Biro Oktroi Roosseno, sesuai SK yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman R.I. (TMT 1 Agustus 1991). Dosen Tetap UI, sejak 1975. Dosen Luar Biasa UI, sejak 1989. Guru Besar Luar Biasa FIB-UI, sejak 1993. Staf Peneliti LIPI, sejak 1987.

Tidak hanya itu, ia juga memiliki catatan penting terkait pergerakan 1998 dan pengembangan dunia seni dan budaya. Saat *chaos* terjadi pada 1998, rumah Toeti menjadi tempat aktivis perempuan yang berhajat untuk menggalang solidaritas di berbagai kota. Ia juga turut sumbangsih dalam berdirinya PEN Indonesia yang digagas para sastrawan yang telah bosan oleh kungkungan rezim Orde Baru.

Pada akhirnya, kita melihat perjalanan hidup Toeti Heraty seperti sebuah lorong panjang di mana benang kepentingan publik dan privat berjalan beriringan. Ia punya begitu banyak aktivitas di ruang publik yang berkaitan aktivitas intelektualnya, seni budaya, lembaga-lembaga yang ia dirikan dan karya-karya yang ia publikasi. Namun di sisi lain, ia selalu menjaga keberadaan ruang privatnya, ruang di mana jiwa bebasnya sedang menunggu untuk menunjukkan diri dalam berbagai keputusan dan pilihan hidup yang bisa jadi terlihat ekstrem bagi orang kebanyakan.



Istimewa

Total Mengabdikan dan Berkarya Di Lemhannas RI

PROFESI yang digeluti saat ini membawa pengalaman berharga bagi seorang Waluyo Sugiarto, salah satu staf logistik di Sekretariat Pimpinan Lemhannas RI.

“Saya merasa bangga karena mendapat tugas di Sekretariat Pimpinan Lemhannas RI. Berbagai pengalaman berharga saya dapatkan, selain dapat bertemu secara langsung saya juga bertugas untuk melayani pimpinan, disinilah kemudian membuat pengetahuan saya bertambah,” cerita Waluyo kepada Majalah Swantara beberapa waktu lalu.

Selain itu kata Waluyo, tugas lain yang diberikan kepadanya adalah melayani para tamu yang berasal dari berbagai negara dan instansi pemerintah lainnya.

Waluyo sendiri mengaku bergabung di Lemhannas RI sejak tahun 1997. “Saya awalnya menjadi *cleaning service*,” jelas Waluyo.

Selama dua tahun pria kelahiran Purwokerto 21 Maret 1969, bertugas sebagai *cleaning service* hingga akhirnya pada suatu ketika dirinya mendapat kesempatan menjadi tenaga honor, karena dibukanya kesempatan untuk menjadi PNS di Lingkungan Kerja Lemhannas RI.

Kesempatan inipun tidak disia-siakan oleh Waluyo, dia pun memberanikan diri untuk mengikuti seleksi tersebut, tentu saja hal ini sudah dipertimbangkan masak-masak dan berkat dukungan keluarga, rekan-rekan sekerja dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Tata Usaha dimana dirinya ditempatkan. “Saat itu saya hanya berbekal ijazah SMP,” cerita Waluyo.

Dewa keberuntungan pun berpihak kepada Waluyo, dirinya dinyatakan lolos

seleksi dan diterima bekerja di Lemhannas RI, kemudian diawal kariernya sebagai CPNS dirinya ditempatkan di Bagian Sekretariat Pimpinan..

Setelah resmi bergabung di Lemhannas RI sambung Waluyo, dirinya menempuh pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) disebuah lembaga pendidikan milik Ajendam, dan berhasil meraih ijazah SMA melalui ujian persamaan sebagai penyesuaian ke-pangkatan di Lemhannas RI.

Setelah 12 tahun mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Waluyo kemudian menyabet predikat sebagai Pegawai Teladan Golongan I di Lingkungan Kerja Lemhannas RI. “Tentu saja gelar yang saya raih menjadi kebanggaan

tersendiri bagi saya,” tutur ayahanda dari Mita Aryani dan Dwi Anastomi.

Gelar sebagai pegawai teladan kata Waluyo diraih setelah dirinya berhasil mengalahkan lima orang konstestan lainnya.

“Pada seleksi tersebut, ada 11 juri, masing-masing menanyakan seputar tugas yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah saya berhasil menjawab seluruhnya,” jelas suami dari Sutarmi.

Dengan berbekal motto pengabdian tiada akhir, Waluyo pun bertekad senantiasa mengabdikan dirinya kepada Bangsa dan Negara melalui pengabdian total kepada Lemhannas RI.



Peluang dan Penciptaan Kerukunan

DALAM kehidupan ini, kita perlu menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh kemajemukan, termasuk dalam hal kepercayaan (agama). Dimana terdapat berbagai aliran-aliran kepercayaan yang mana sangat diperlukan adanya kerukunan antar umat beragama sehingga terjalin hubungan yang baik.

Semua kita umat beragama mempunyai dasar teologis untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan ini, yang melalui ini dapat menciptakan sebuah kerukunan. Di Negara kita ini, terkandung dalam Pancasila dan UUD'45, dengan sila "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya", jelas mendukung untuk hadirnya sebuah kerukunan antar-umat beragama.

Bila kita mencoba menganalisa, persoalan/permasalahan mengenai kerukunan biasanya muncul ditingkat bawah, emosi cepat bangkit apabila di provokatori oleh orang tertentu. Dan memang dalam upaya menciptakan perdamaian/ kerukunan, pada saat ini, sebagian besar masih sampai tahap konsepsi, belum semua ditahap aplikasi dan refleksi. Masih sampai pada tahap teori, seremonial, ritual,

belum menyentuh tahap praktikal dan kontekstual. Sehingga jelas, untuk terciptanya sebuah perdamaian dan kerukunan yang sesungguhnya, bukan hanya dalam teori dan kata-kata, tetapi juga dalam fakta sehari-hari.

Pertemuan dengan berbagai agama di Indonesia adalah sesuatu kenyataan objektif yang tidak bisa dipungkiri, oleh karena agama-agama telah hadir serta memiliki keabsahan untuk menghuni republik tercinta ini. Sebuah agama tidak akan bisa menutup diri dengan keadaan yang ada ini, bahwa sebuah agama hidup berdampingan dengan agama lain saling mengontrol. Hubungan intim yang saling memperkaya antara dua kelompok yang kelihatan berbeda, mungkin sesuatu yang sulit, dengan menciptakan sebuah hubungan yang dekat dengan tujuan saling memperjaya, maka bisa menjadi sebuah tindakan nyata dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Dengan dialog-lah kita bisa mengupayakan jalinan yang baik antar-umat beragama. Karena dalam dialog, kita bisa duduk bersama dengan dengan agama lain.

Pada zaman penjajahan, agama dianggap menjadi sebuah bentuk yang mengupayakan pembebasan. Namun

pada masa sekarang agama hanya menjadi sebuah bentuk yang menunjukkan sebuah identitas. Sehingga masing-masing umat beragama hanya melihat identitas dalam kehidupannya. Agama mulai kehilangan fungsi untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan. Melalui ini, kita harus kembali menghidupkan fungsi dari agama dalam rangka menciptakan kerukunan.

Upaya lain yang perlu kita lakukan adalah sebuah promosi perdamaian dari masing-masing lembaga keagamaan. Pemimpin-pemimpin dan puka-pemuka agama harus mempromosikan hal ini secara nasional (termasuk juga daerah pelosok/ tingkat desa). Promosi yang didalamnya berisikan ajakan, pembinaan yang berkesinambungan sehingga terlihat adanya upaya menghadirkan perdamaian dan kerukunan antar-umat beragama secara nasional.

Pemahaman akan agama sangatlah penting dalam menghadirkan kerukunan umat beragama, yakni pemahaman yang menyeluruh kepada seluruh umat beragama. Tidak hanya kepada umat yang berada di kota, namun juga pada umat yang berada di pelosok-pelosok. Sehingga dengan pemahaman akan agama yang benar, yang mana setiap agama mempunyai panggilan untuk menghadirkan perdamaian dan kerukunan diantara setiap agama.



Kunjungan Menteri Pertahanan *Republic Democratic Timor Leste* H.E Dr. Cirilo Cristovo berserta jajarannya di Ruang Tamu Pimpinan Lemhannas RI pada Senin (4/5).



Kenaikan Pangkat Pejabat Eselon III, IV dan Golongan Kebawah TNI, Polri dan PNS Lemhannas RI di R. Nusantara Lemhannas RI, Jakarta, Senin(6/4).



Audensi *Telkom Corporate University* ke Lemhannas RI di R. Nusantara II Lemhannas RI, Jakarta, Kamis(16/4).



Coffee Morning dengan Para Pimpinan Redaksi Media Massa dan Wartawan di R. Nusantara Lemhannas RI, Kamis(9/4).



Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Pendiri Lemhannas RI, Ir. Soekarno, dalam rangka HUT Ke-50 Tahun Lemhannas RI di Blitar Selasa (12/05).



Penandatanganan nota kesepahaman peninjauan kerjasama antara Lemhannas RI dan Kementerian Luar Negeri di Ruang Tamu Pimpinan pada Kamis (4/6).



Courtesy Call Pimpinan The Advanced Command and Staff Course (ACSC) Inggris Col. Murchison di Ruang Tamu Pimpinan pada Selasa (9/6).



Acara WIDESHOT METRO TV bertajuk "HUT 50 Tahun Lemhannas: Lemhannas Membangun Karakter Bangsa" di Ruang Nusantara I Rabu (20/05).



Courtesy Call Direktur Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) Daniel P. Leaf yang diterima oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. di Ruang Tamu Pimpinan pada Senin (8/6)



Acara Economic Challenges Metro TV, Selasa(28/4).



Simposium Nasional Cyber Security di Hotel Borobudur pada Kamis (4/6).



Lemhannas RI menggelar pertandingan futsal untuk turut memeriahkan HUT ke-50 Tahun Lemhannas RI, Selasa(21/4).

Tips Berpuasa Bagi Penderita Maag

Tips Berpuasa Bagi Penderita Maag

Sering kali penyakit maag digunakan sebagai alasan untuk tidak menjalankan puasa, hal tersebut dipicu dengan kekhawatiran jika penyakitnya akan kambuh, tentu saja hal ini akan berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Kini tak usah khawatir, berikut tips agar lambung tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa :

Wajib makan sahur

Makan sahur adalah hal yang wajib bagi penderita maag yang ingin berpuasa, dikarenakan makan sahur dapat menyiapkan energi selama berpuasa dan mencegah lambung dalam keadaan kosong. Jangan lupa juga untuk mengonsumsi obat maag golongan antasida, proton pump inhibitor (PPI), atau H2 antagonis.

Jangan tidur setelah sahur dan perbanyak makan serat

Hindarilah tidur setelah sahur, karena dapat meningkatkan sekresi asam lambung. Keadaan tersebut akan membuat proses pencernaan berjalan menjadi lebih lambat dan menyebabkan perasaan lapar saat bangun tidur. Selain itu, perbanyaklah makan serat saat sahur, karena dapat membuat Anda tidak cepat lapar.

Segera berbuka

Saat berbuka puasa segeralah minum minuman yang hangat dan

manis, lalu bisa dilanjutkan dengan makan makanan ringan yang manis seperti kurma. Makan dan minum minuman yang manis dapat menormalkan kadar gula dalam tubuh setelah berpuasa sehari dan makanan yang manis tersebut akan mudah diserap oleh tubuh.

Makan secukupnya

Sebaiknya Anda makan dengan secukupnya, agar tidak terjadi peregangannya dinding lambung yang berlebihan sehingga lambung dapat berkontraksi dengan rileks. Selain itu, saat berbuka jangan langsung makan dengan porsi besar, yaitu nasi beserta lauk pauk. Berbukalah dengan makanan kecil terlebih dahulu, makan besar bisa dilakukan satu jam setelah berbuka. Hal tersebut dilakukan agar kadar gula dalam darah dan cairan tubuh kembali ke posisi normal.

Hindari stres

Jika Anda stress, maka akan memacu metabolisme sehingga asam lambung akan meningkat dan hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada dinding lambung. Stres saat bulan puasa dapat dihindari dengan banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat.

Minum obat teratur

Saat puasa jadwal untuk minum obat menjadi berubah. Obat maag dapat diminum saat sahur, berbuka puasa, dan tengah malam sebelum tidur.(net)



Net

RENCANA JADWAL KEGIATAN PENTING LEMHANNAS RI TAHUN 2015

DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

1. Program Pendidikan Reguler Angkatan LIII (PPRA 53)

29 Juni – 3 Juli: Tim Aju SSDN
7 Juli: Lap Siap Budaya Lokal
16 – 21 Juli: Cuti Bersama
29 Juli: Kesiapan SSDN
30 Juli: Rakor SSDN
27 – 31 Juli: Laks Budaya Lokal
10 – 14 Agustus: Lap SSDN
19 – 20 Agustus: Laks SSDN
2 September: Rakor SSLN
3 September: Kesiapan SSLN
7/8 September: Kuliah Umum RI-2
8 September: Direktif Progpil
14 – 18 September: Laks SSLN
21 September: Penjelasan Dedik Progpil
2 – 23 September: Lap SSLN
29 September: Penjelasan Deddik OS
29 September: Tar Pelaku OS
29 September: Tar Wasdal OS

2. Program Pendidikan Singkat Angkatan XX (PPSA 20)

2 Juli: Penjelasan Dedik SSLN
16 – 21 Juli: Cuti Bersama
30 Juli: Malam Perkenalan
3 – 7 Agustus: Tim Aju SSDN
18 Agustus: Kesiapan SSDN
20 Agustus: Rakor SSDN
31 Agustus – 4 September: Laks SSDN
7/8 September: Kuliah Umum RI-2
8 – 9 September: Lap SSDN
21 September: Rakor SSLN
25 September: Kesiapan SSLN
29 September – 2 Oktober: Laks SSLN.

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN STRATEGIK

1. Ditjian Politik

9 Juni – 5 Agustus: Kajian Aktual – 2 “Optimalisasi Sistem Pemberantasan Korupsi Guna Menciptakan Stabilitas Politik Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.
25 Juni – 1 September: Kajian Aktual – 3 “Optimalisasi Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi Guna Memperkokoh Persatuan Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.
30 Juni – 27 Oktober: Kajian Berlanjut “Membangun Kebijakan Sistem Manajemen Maritim yang Berkelanjutan Guna Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

2. Ditjian Ekonomi

10 Juni – 6 Agustus: Kajian Aktual – 2 “Revitalisasi Pengelolaan Peternakan Sapi Nasional Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

7 Juli – 2 Oktober: Kajian Berlanjut “Harmonisasi Berbagai Peraturan dan Perundang-Undangan Sistem Perekonomian Nasional Terhadap Konstitusi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

1 – 30 September: Kajian Quick Response – 1 “Current Strategic Issues September 2015”.

3. Ditjian Sosial Budaya

18 Juni – 26 Agustus: Kajian Aktual – 2 “Optimalisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkkoba Melalui Pendekatan Sosial Budaya Guna menyelamatkan Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

1 Juli – 31 Agustus: Kajian Skenario 2045

27 Agustus – 23 September: Kajian Aktual – 3 “Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Guna Mengangkat Harkat dan Martabat Anak Sebagai Tunas Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

4. Ditjian Hankam

11 Agustus – 2 Oktober: Kajian Aktual – 3 “Membangun Integrasi dan Fungsi Intelijen Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

30 Juli – 26 Oktober: Kajian Berlanjut “Membangun TNI Sebagai Kekuatan Maritim Tingkat Regional Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

5. Ditjian Internasional

2 Maret – 28 Agustus: Kajian Berlanjut – 1 “Strategi Implementasi ASEAN Economic Community 2015 Guna Mewujudkan Indonesia sebagai Driving Force ASEAN Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

18 Juni – 31 Agustus: Kajian Berlanjut – 2 “Strategi Implementasi Economic Community (AEC) 2015 Guna Mewujudkan Indonesia sebagai Driving Force ASEAN Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

18 Juni – 10 Juli: Revisi Hanjar Pancasila (R)
18 Juni – 10 Juli: Revisi Hanjar UUD NRI 1945 (R) (KONSISNAS)
18 Juni – 10 Juli: Revisi Hanjar NKRI (R) (SEMBELNEG)
18 Juni – 10 Juli: Revisi Hanjar BTI (R) (TRANSLAI)
26 -28 Juli: Evaluasi Dampak Taplai Kbs di Surabaya
29 – 31 Juli: Dialog KBS di Batam
27 Juli – 2 Agustus: Adeksi – 38 (PROGBANG)
3 – 9 Agustus: Taplai Pesantren Madura (APBNP) (TRANSLAI)
5 – 11 Agustus: Taplai Malang (R) (IDIOPADNAS)
13 – 15 Agustus: Evaluasi Dampak Makassar
18 – 20 Agustus: Evaluasi Dampak Lampung
19 – 28 Agustus: Dialog KBD di Batam (SEMBELNEG)
23 – 25 Agustus: Evaluasi Dampak Medan
4 – 10 September: Taplai Pesantren Solo (APBNP) (KONSISNAS)
9 – 11 September: Evaluasi Dampak Banjarmasin
16 – 22 September: Evaluasi Dampak Palembang
28 September – 4 Agustus: Taplai Diplomat – III (ABNP)
30 September – 2 Oktober: Evaluasi Dampak Manado
24 Agustus – 13 September: Taplai Pemuda (APBNP) (SEMBELNEG)

*Selamat
Menuunaiikan
Ibadah Puasa 1436H*

